



PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA



Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Perubahan

“RPJMD-P”

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah satunya perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan daerah dan perubahan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 9 dan angka 23 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
18. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berkenaan dengan perubahan kewenangan daerah, nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja daerah serta perubahan kebijakan nasional yang mendasar lainnya, maka Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dengan demikian RPJMD Perubahan ini merupakan penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2019 hingga Tahun 2024.

Penyusunan RPJMD Perubahan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan reviu dan evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, daya saing dan pelayanan pemerintahan di semua bidang serta mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik dalam lingkup wilayah yang meliputi keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional maupun lingkup waktu yang menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tahunan daerah, mengefektifkan dan fokus penanganan beberapa isu strategis daerah yang dapat dicapai dalam sisa waktu periode perencanaan lima tahunan ketiga ini yang akan berakhir pada tahun 2024 berbasis holistik, integratif, tematik dan spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kebutuhan yang bersifat formal dan wajib dilakukan sebagaimana tuntutan regulasi dengan dukungan legitimasi yang komprehensif. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMD Provinsi.

Dokumen RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana acuan utama yang digunakan dalam melakukan Perubahan RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 bagian c dan ayat 3. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan kebijakan

nasional sehingga dianggap perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pasal 8 menyatakan bahwa penyesuaian bertahap terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota sebelum peraturan Menteri tersebut berlaku dilakukan mulai tahun 2020. Permendagri tersebut juga dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya perubahan struktur keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana sebelumnya untuk struktur pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, kemudian pada struktur belanja yang sebelumnya terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Isu kedua yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya adalah isu pandemi Covid-19, dimana pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Awalnya *World Health Organization* (WHO) menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia yang disebut dengan *corona virus* di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, kemudian kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain, termasuk Indonesia. Pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada akhir Maret 2020 yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia, merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan politik maupun ekonomi. Nyatanya seluruh sendi kehidupan masyarakat terdampak oleh adanya pandemi ini. Tidak hanya ekonomi, sosial budaya

masyarakat dan religi pun tidak luput dari pandemi ini. Perkembangan tersebut mendorong Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Kubu Raya terdampak cukup berat, antara lain:

1. Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya. Pada PDRB, lima sektor mengalami pertumbuhan terendah yaitu transportasi dan pergudangan (-32,46 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (-11,72 persen), jasa lainnya (-10,32 persen), jasa pendidikan (-6,43 persen) serta perdagangan besar dan eceran (-3,98 persen). Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya menurun secara drastis dari tahun 2019 di angka 5,72 persen menjadi -2,43 persen pada tahun 2020. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan pada tahun 2020 di angka 3,61 persen realisasinya 7,14 persen.
2. Perubahan sosial budaya masyarakat. Kebijakan *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB memaksa masyarakat harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru di berbagai tataran kehidupan, seperti pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya.
3. Refocusing anggaran pemerintah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Adanya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini menjadi salah satu alasan dilakukan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Mekanisme dan tahapan penyusunan RPJMD merupakan pijakan awal dalam perencanaan strategis pembangunan daerah sebagai implementasi regulasi yang disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Langkah awal perencanaan pembangunan merupakan indikator penting untuk dipedomani sebagai panduan dalam menyusun berbagai program dan kegiatan yang meliputi peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sublimasi antara rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ditetapkan secara berjangka RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, serta disinkronkan dengan berbagai kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan utamanya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Barat serta RTRW Kabupaten. Dokumen ini juga menyelaraskan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang dipertajam dengan sejumlah kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergisitas kebijakan dan sinkronisasi program secara horisontal maupun vertikal antar tingkat pemerintahan.

Dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang berisikan visi, misi, strategi, dan program yang menjembatani capaian pembangunan saat ini dengan capaian 5 (lima) tahun ke depan secara lebih terarah. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan berarti, yang dimanifestasikan lewat indikator tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif baik walaupun belum optimal, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan tingkat kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara rata-rata, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan. Kinerja berbagai indikator makro tersebut merupakan agregasi dari berbagai capaian dari berbagai kegiatan di berbagai bidang.

Sejalan dengan prinsip dan semangat Pemerintah Daerah Kubu Raya melalui konsep *Kepong Bakol*, perubahan RPJMD juga diharapkan mampu mengakomodir isu-isu strategis pembangunan dengan lebih maksimal. *Kepong Bakol* merupakan pengejawantahan konsep gotong royong berbasis kearifan lokal yang mengelaborasi keterlibatan banyak pihak baik internal maupun eksternal (skala nasional maupun internasional) untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada.

Konsep ini menjadi semangat baru bagi Kabupaten Kubu Raya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Seperti misalnya upaya *kepong bakol* untuk penguatan ketahanan pangan yang meliputi bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui lima upaya, yaitu penguatan UMKM dan industri pengolahan, penguatan sistem ketenagakerjaan, pemulihan aktivitas pariwisata, penguatan kelompok ponpes/masyarakat yang menjadi sentra inovasi ekonomi lokal sekaligus menjadi kelompok/wadah penanggulangan kemiskinan serta penguatan infrastruktur dengan peningkatan interoperabilitas serta transportasi/konektivitas. Inovasi digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik juga menjadi hirauan penting dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan. Tidak pula dilupakan isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, serta perhatian atas penyandang disabilitas.

1.2. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen terkait lainnya yang bersifat perencanaan sektoral.

Dokumen RPJMD periode 2019-2024 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kubu Raya pada tahun 2029.

1.3.1. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, serta RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 bahwa Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang akan menjadi sasaran dua puluh tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPN dibagi kedalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 memperhatikan RPJMN ke empat yaitu RPJMN Tahun 2020-2024, yang pada saat ini masih merupakan rancangan teknokratik.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, tema yang diusung adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.** Terdapat 5 (lima) fokus pembangunan yang ditetapkan, yaitu:

1. Fokus pembangunan infrastruktur yaitu menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, yaitu: Kawasan Industri Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan, dan Tambak-Tambak Perikanan.
2. Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
3. Fokus mendorong investasi dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.
4. Fokus reformasi birokrasi melalui reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Fokus penggunaan APBN yaitu menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun agenda pembangunan dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024 terdapat 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

1.3.2. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2019-2024, harus berpedoman juga pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD tahap ke tiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Adapun prioritas RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil);
2. Penguatan, peningkatan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah secara merata di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya;

3. Penguatan produk lokal usaha mikro dan kecil dengan jaminan pasar sistemik dan peningkatan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Pemantapan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
5. Penguatan UMKM dan industri pengolahan, penguatan sistem ketenagakerjaan, pemulihan aktivitas pariwisata, penguatan kelompok ponpes/masyarakat yang menjadi sentra inovasi ekonomi lokal sekaligus menjadi kelompok/wadah penanggulangan kemiskinan serta penguatan infrastruktur dengan peningkatan interoperabilitas serta transportasi/konektivitas.
6. Pemasaran produk berbasis digital (digital marketing) dengan membuat aplikasi berbasis web dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan *e-commerce*.
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan pemberdayaan perempuan, serta memperhatikan penyandang disabilitas.

1.3.3. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada tanggal 5 Maret 2019. Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah:

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu:

1. **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa

didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan Masyarakat yang Tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 harus memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terutama untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat namun tidak ada kewenangannya di kabupaten, seperti urusan kelistrikan, ataupun sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat yang memerlukan dukungan daerah seperti penanganan *stunting* dan peningkatan status Desa Mandiri. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 52 sampai dengan pasal 56. Termasuk dalam hal ini adalah penjabarannya dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perubahan SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dibawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra SKPD.

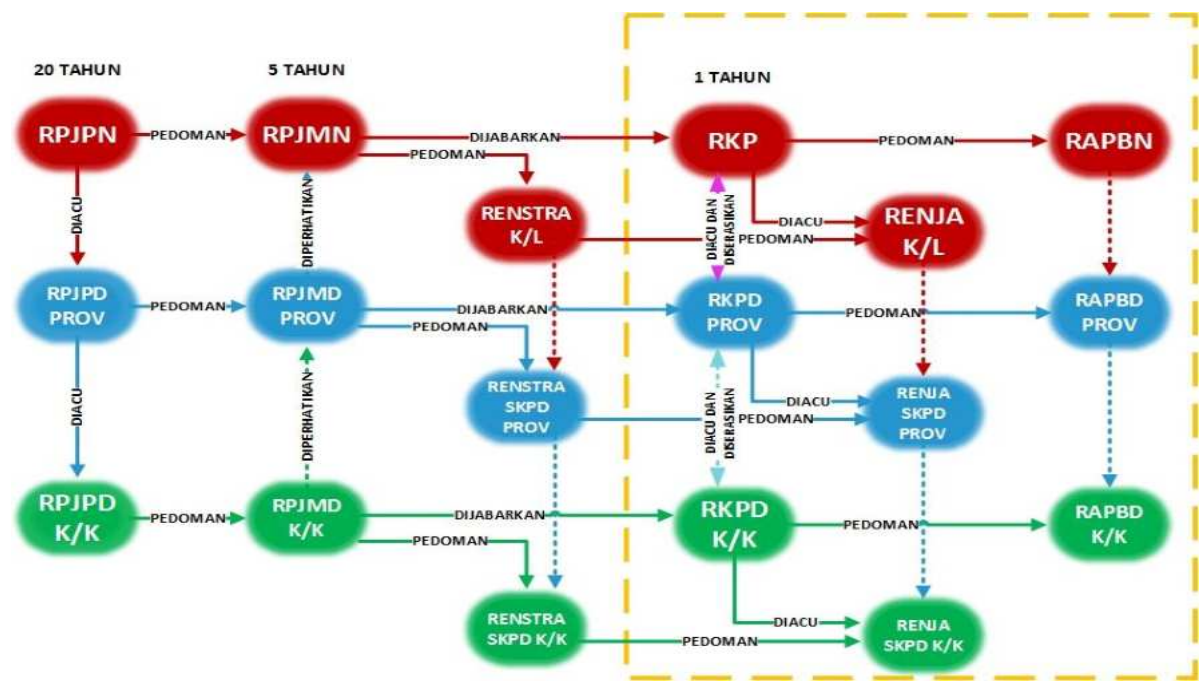
1.3.5. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD khususnya RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, RKPD juga mengacu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam Rangka memberikan arah dalam pentahapan pencapaian visi jangka menengah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD sesuai dengan periodisasi tahunan dalam RPJMD. Penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2.
Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



1.3.6. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Penelaahan rencana tata ruang

bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi:

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga memperhatikan RTRWN, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten/Kota berbatasan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota berbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kawasan Metropolitan Pontianak.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan SKPD Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga terjadi konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, sehingga akan memudahkan dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 antara lain meliputi:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan;

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
10. Menyesuaikan dengan Perubahan dan Perbaikan Regulasi dan Aturan yang Terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2024 disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD Perubahan, berisikan tentang latar belakang dengan mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan RPJMD, kedudukan RPJMD dalam RPJP, serta keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek geografi dan demografi memuat penjelasan tentang karakteristik lokasi dan wilayah serta demografi. Aspek kesejahteraan masyarakat memuat penjelasan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum menjelaskan mengenai kondisi umum aspek pelayanan umum yang meliputi fokus layanan urusan wajib konkrue, fokus layanan urusan wajib tidak konkrue dan fokus urusan pilihan. Sedangkan aspek daya saing meliputi fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) kinerja keuangan masa lalu antara lain kinerja pelaksanaan APBD, neraca Daerah; (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu antara lain proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan (3) kerangka pendanaan antara lain proyeksi pendapatan dan belanja dan perhitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan yang menampilkan masalah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal Perubahan RPJMD. Isu strategis yang diangkat merupakan permasalahan pembangunan yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, dan regional. Dalam penyajian isu strategis dikemukakan mengenai manfaat/pengaruh isu-isu tersebut di masa mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai pernyataan tekad yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Juga mengenai konsistensi, sinergitas antara

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, serta RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, yang selanjutnya memberikan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Restra Perubahan Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan rencana pembangunan RPJMD selama 5 tahun sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam regulasi pendukung perencanaan daerah. Penjelasan dalam bab ini juga menjelaskan tentang masa transisi perencanaan program memasuki periode akhir masa jabatan dan tahap awal perencanaan Bupati dan Wakil Bupati terpilih guna menjaga sinergitas dan kesinambungan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke depan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif $\pm 6.985,24 \text{ Km}^2$ atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat $0^{\circ}13'40,83''$ sampai dengan $1^{\circ}00'53,09''$ Lintang Selatan, serta $109^{\circ}02'19,32''$ sampai dengan $109^{\circ}58'32,16''$ Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak

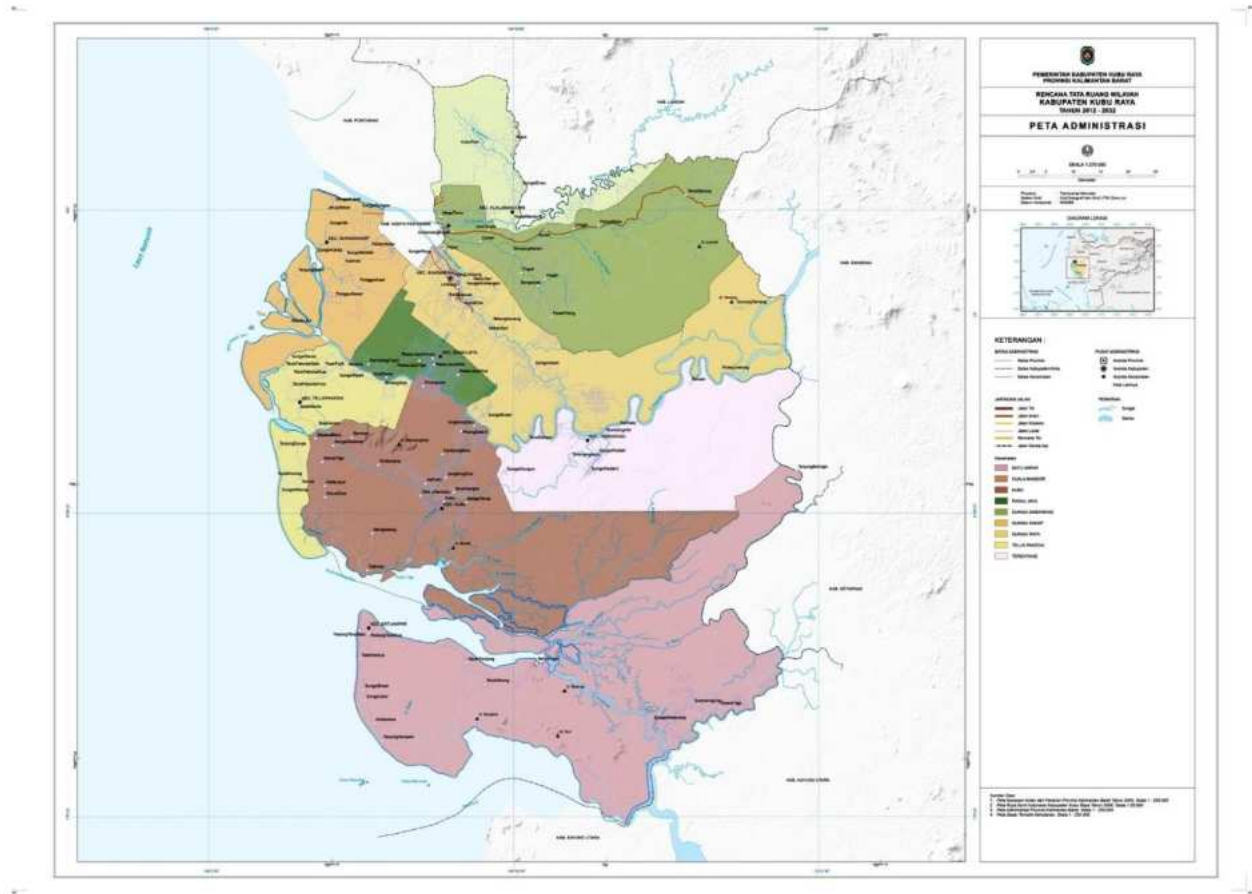
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 118 desa. Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan
Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			118	6.985,24	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, 2020

Kecamatan dengan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah 2.002,70 km² atau 28,67 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Rasau Jaya dengan luas wilayah 111,07 km² atau 1,59 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Sungai Raya dan Kubu dengan jumlah 20 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kuala Mandor B dengan jumlah 5 desa.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036, Pasal 8 disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Metropolitan Pontianak, meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu (*Central Bussiness District* atau CBD).

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 Km² (7.408 Km × 194 Km = 1.630,68 Km²);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;

- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan; Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

Tabel 2.2.
Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan
Kabupaten Kubu Raya

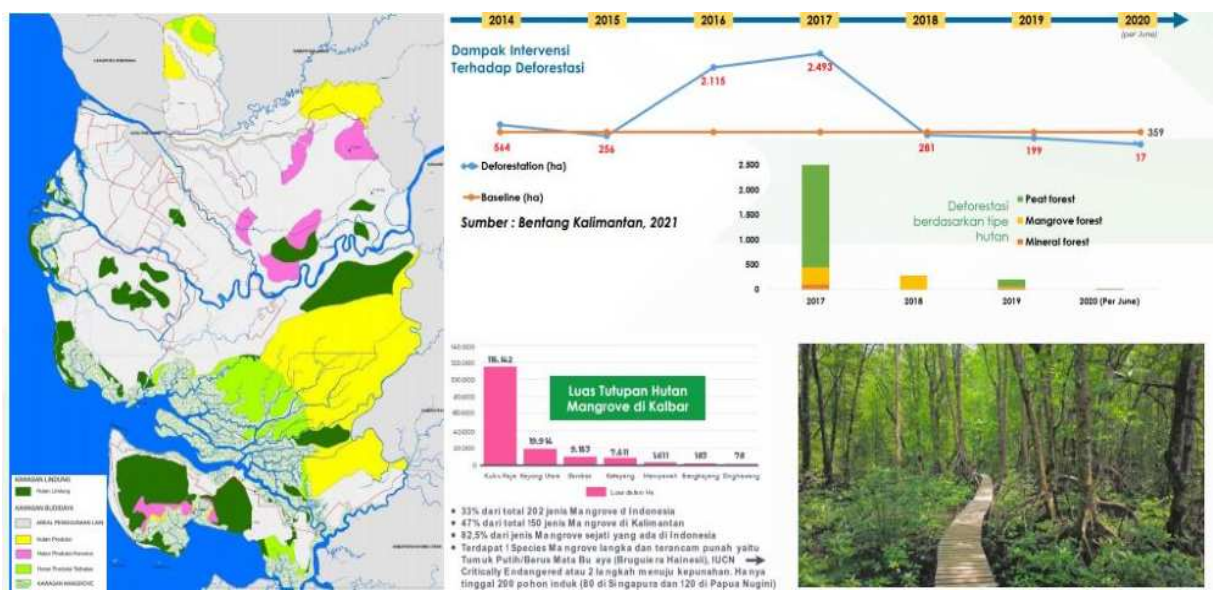
No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
A	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG		
1	Hanyut	00.01.24	109.24.21
B	KECAMATAN BATU AMPAR		
2	Gelanggang	00.44.45	109.33.36
3	Padang Tikar	00.48.37	109.20.35
4	Selatseh	00.53.42	109.21.43
5	Tenggara Mandi	00.53.08	109.24.25
6	Perling	00.39.04	109.27.41
7	Teluk Air I	00.43.47	109.33.51
8	Teluk Air II	00.45.32	109.36.06
9	Teluk Air III	00.43.39	109.35.19
10	Sejenuh Air Tawar	00.41.34	109.36.48
11	Pulau Buntung	00.41.04	109.37.59
12	Munggu' Linang	00.44.03	109.39.02
C	KECAMATAN SUNGAI KAKAP		
13	Kurnia	00.11.12	109.07.04
14	Nyamok	00.05.37	109.10.23
15	Keladi	00.11.18	109.06.27
16	Sepok Laut	00.13.37	09.07.22
17	Sepok Perupuk	00.08.22	109.06.31
18	Tanjung Saleh	00.07.10	109.09.21
19	Tempurung	00.06.39	109.07.20
20	Tai Minyak	00.05.37	109.10.23
21	Beting Tengah	00.11.35	109.04.11

No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
D	KECAMATAN KUBU	00.36.45	109.18.33
22	Burung Besar	00.36.37	109.18.42
23	Burung Kecil	00.35.57	109.16.06
24	Dabong	00.36.34	109.17.39
25	Tiga	00.34.36	109.19.46
26	Muara Kubu	00.36.37	109.22.58
27	Bidara	00.40.02	109.30.21
28	Pakawal	00.41.25	109.29.27
29	Berembang		
E	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	00.21.23	109.11.30
30	Pelombak		
F	KECAMATAN SUNGAI RAYA		
31	Tanjung Sapi	00.22.08	109.37.05
32	Limbung	00.13.52	109.48.58
33	Buntut Limbung	00.16.06	109.45.59
34	Keranji	00.12.35	109.47.42
35	Teluk Bayur	00.15.05	109..54.46
36	Jambu	00.13.57	109.56.49
37	Separoh	00.11.23	109.55.23
38	Benuang	00.12.34	109.53.35
39	Sekancil	00.09.33	109.54.19

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum DEPDAgRI Tahun 2008

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan *Mangrove* dan gambut. Kawasan *Mangrove* Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun jumlah kawasan *Mangrove* tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2021 menunjukkan tutupan Hutan *Mangrove* di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9 persen diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya (Data Bentang Kalimantan, 2021). Data *Mangrove* di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat di grafik di bawah ini.

Gambar 2.2.
Hutan Mangrove di Kalimantan Barat



Sumber : Bentang Kalimantan, 2021

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) spesies *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari 33 spesies *mangrove* sejati (*true mangrove*) dan 34 spesies *mangrove* ikutan (*associate mangrove*). Dari 67 spesies tersebut terdapat 1 spesies *mangrove* langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*). Spesies ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nuigini). Di Kabupaten Kubu Raya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu NGO yaitu SAMPAN, spesies Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*) atau istilah lokal masyarakat di Kabupaten Kubu Raya disebut Tumuk Putih hanya terdapat 7 batang pohon saja yang terdapat di Hutan desa Tanjung Harapan dengan status *Critically Endangered* (CN) (SAMPAN, 2018).

Mengingat pentingnya fungsi kawasan *mangrove* tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah negara ke 4 terbesar yang miliki lahan gambut di dunia (*Wetland International*, 2008). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Departemen Pertanian, di Tahun 2011 tercatat luas lahan gambut di Indonesia \pm 14,9 Juta

Ha. Pulau Sumatera memiliki $\pm 6,4$ Juta Ha (43 persen), Pulau Kalimantan $\pm 4,8$ Juta Ha (32 persen) dan Papua memiliki $\pm 3,7$ Juta Ha (25 persen).

Di Kalimantan Barat terdapat $\pm 1,68$ Juta Ha lahan gambut. Dan dari $\pm 1,68$ Ha Juta lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80 persen dari target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu:

1. KHG Batu Ampar-1;
2. KHG Batu Ampar-2;
3. KHG Kuala Mandor;
4. KHG Kubu;
5. KHG Kubu-Terentang;
6. KHG Sungai Ambawang;
7. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
8. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
9. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
10. KHG Teluk Pakedai; dan
11. KHG Terentang-Batu Ampar.

Kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

2.1.1.3. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - > 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief > 10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - > 60 m.

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang

mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial.

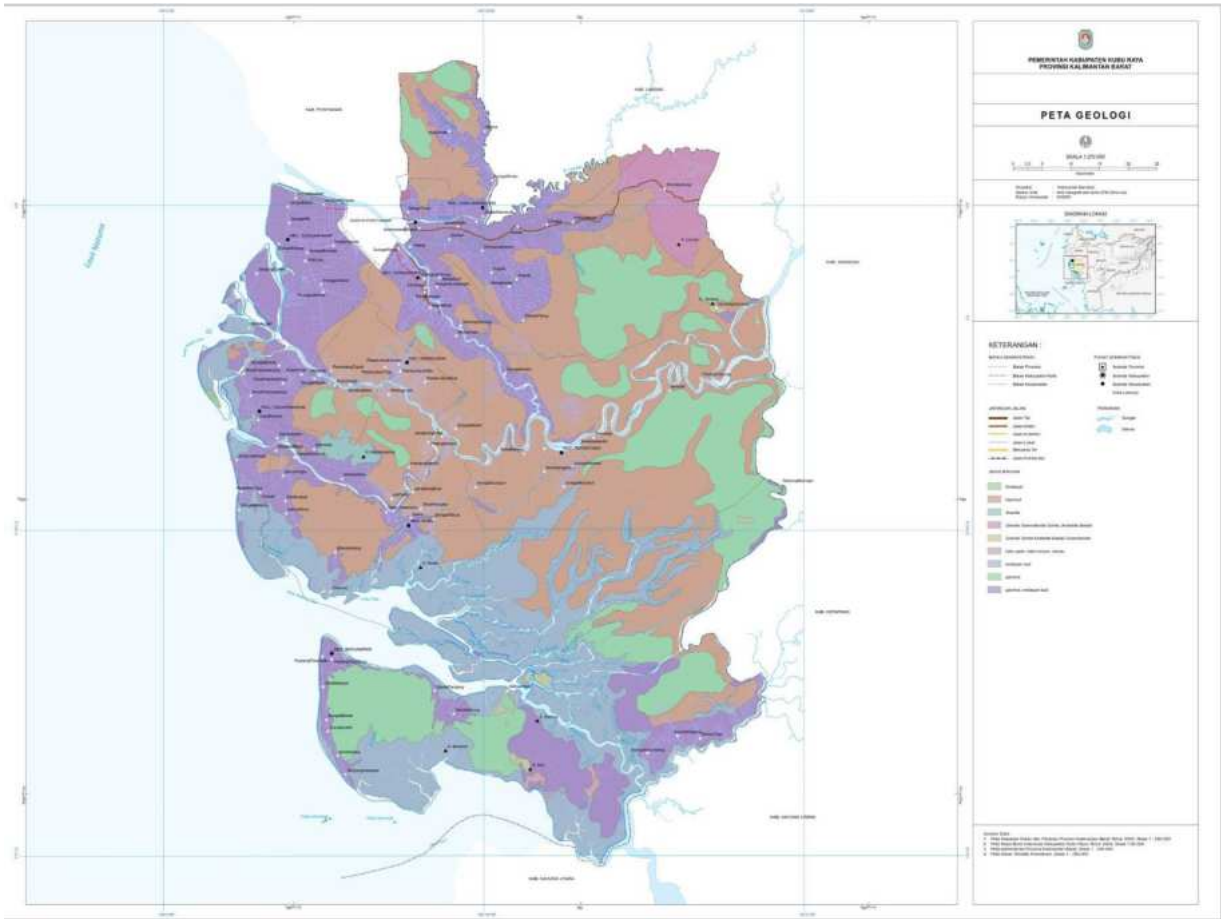
Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada di antara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, *gleisol*, *organosol* dan regosol.

1. Aluvial, jenis tanah aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol*, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau Tanah Gambut atau Tanah Organik, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30 persen untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20 persen untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60 persen, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.3. sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya



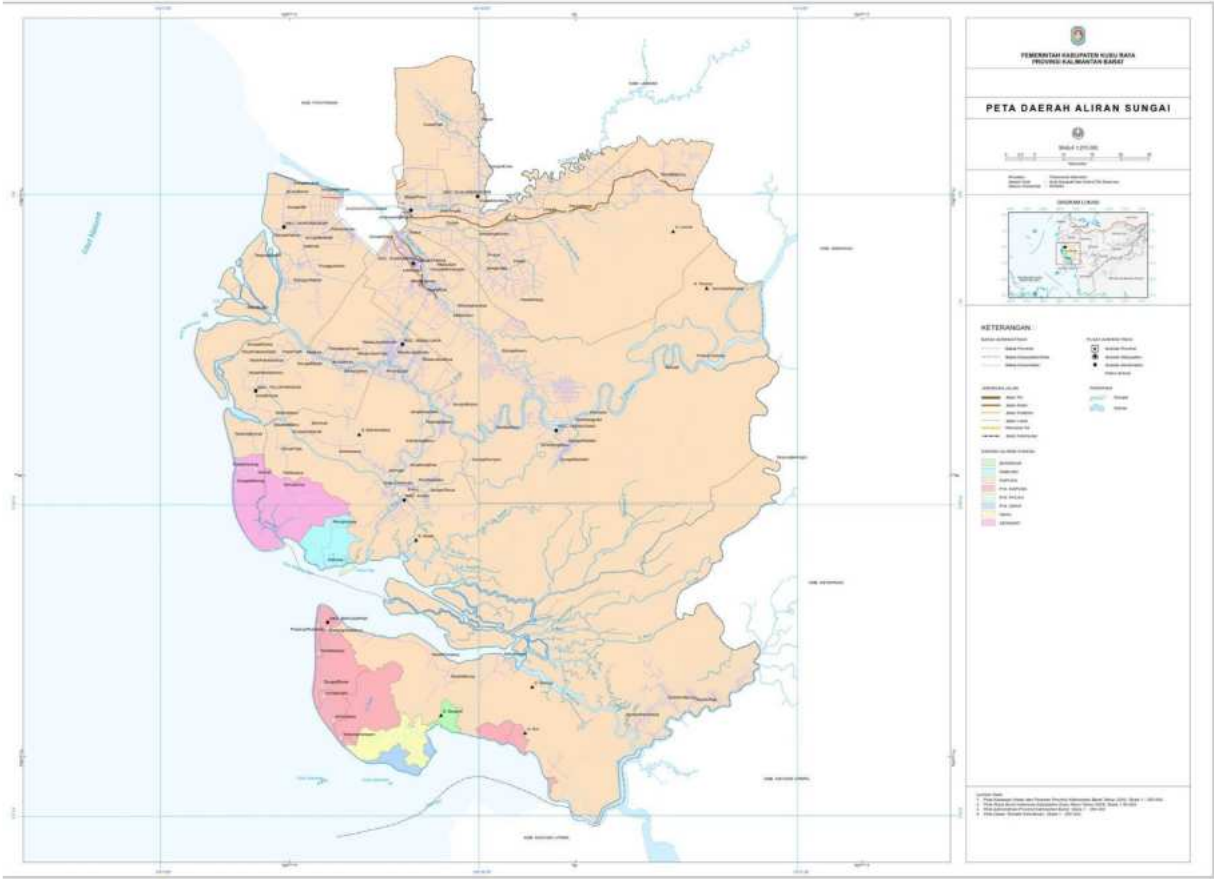
2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar).

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.4. sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya



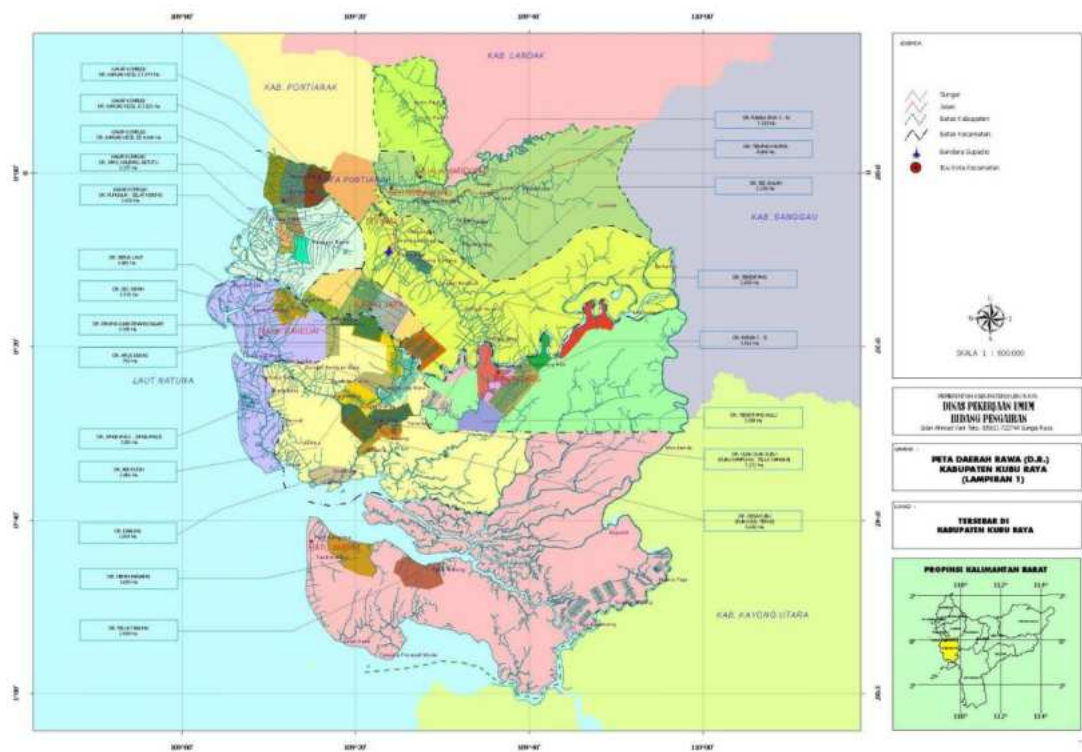
Sedangkan untuk Daerah Irigasi Rawa (DIR) dan Daerah Irigasi (DI) terdiri dari:

1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Nasional, terdiri atas 3 (tiga) DIR yaitu DIR. Teluk Bayur, DIR. Kubu Komplek dan DIR. Kerawang Komplek.
2. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR. Kapuas Kecil I, DIR. Kapuas Kecil II, DIR. Tebang Kacang, DIR. Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR. Jawi – Kalimas – Betutu, DIR. Punggur Selat Kering, DIR. Pinang Komplek, DIR. Olak-Olak Kubu dan DIR. Teluk Nibung.
3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten, terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yaitu DIR. Air Putih, DIR. Ambangah, DIR. Ambarawa, DIR. Arus Deras, DIR. Bemban, DIR. Betuah, DIR. Biong, DIR. Dabung, DIR. Durian, DIR. Dusun Obyek S. Durian, DIR. Gunung Tamang, DIR. Jalo, DIR. Jangkang I + II, DIR. Jawa Tengah, DIR. Kapuas Kecil III, DIR. Kapur, DIR. Korek, DIR. Kuala Dua, DIR. Kuala Karang, DIR. Kuala Mandor A, DIR. Kuala Mandor B, DIR. Kubu Padi, DIR. Lais, DIR. Lingga, DIR. Lintang

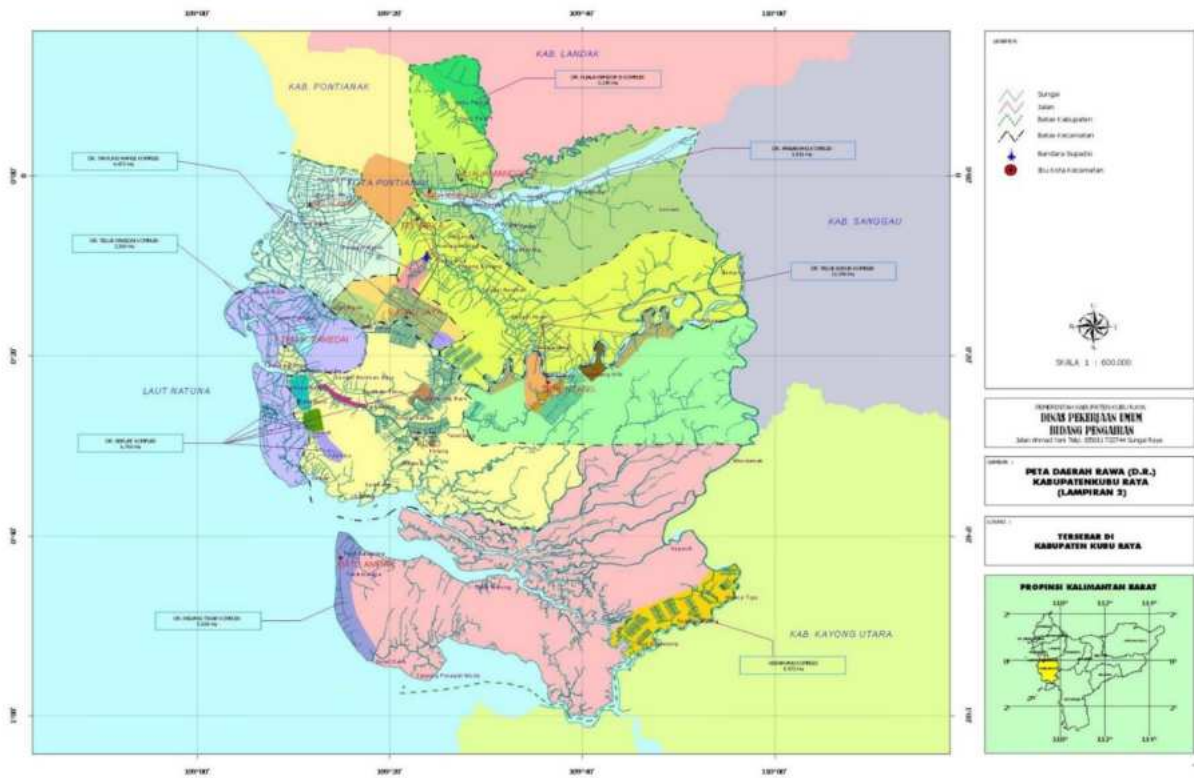
- Batang, DIR. Loncek, DIR. Mengkalang, DIR. Nipah Panjang, DIR. Padang Tikar, DIR. Padang Tikar I, DIR. Padang Tikar II, DIR. Pancaroba, DIR. Pancaroba Sungai, DIR. Pasak, DIR. Pasak Piang, DIR. Puguk, DIR. Pulau Limbung, DIR. Pulau Nyamuk, DIR. Radak I + II, DIR. Retok, DIR. S. Jawi, DIR. Selat Remis, DIR. Sepuk Keladi, DIR. Sepuk Laut, DIR. Sepuk Perupuk, DIR. Simpang Kanan, DIR. Suka Maju, DIR. Sungai Ambawang Kuala, DIR. Sungai Bulan, DIR. Sungai Enau, DIR. Sungai Nibung, DIR. Sungai Nipah, DIR. Sungai Selamat – Seruat, DIR. Sungai Tempayan, DIR. Tamang, DIR. Tanjung Bunga, DIR. Tanjung Harapan, DIR. Tanjung Saleh, DIR. Tapah, DIR. Tasik Malaya, DIR. Teluk Gelam, DIR. Teluk Kapuas, DIR. Teluk Lerang dan DIR. Terentang.
4. Daerah Irigasi (DI) Kabupaten, terdiri dari 8 (delapan) DI yaitu DI. Baharu Ambawang, DI. Bemban Barat, DI. Bemban Timur, DI. Ence Manan, DI. Nuri, DI. Padu Empat, DI. Samak dan DI. Radak.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.5. sebagai berikut:

Gambar 2.5.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya



Gambar 2.6.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kubu Raya Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 284 mm. Jumlah curah hujan berdasarkan catatan BMG Supadio pada tahun 2020 adalah 263 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 27⁰ Celsius.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat
3. Kawasan peruntukan pertanian

- 4. Kawasan peruntukan perkebunan
- 5. Kawasan Peruntukan perikanan
- 6. Kawasan peruntukan pertambangan
- 7. Kawasan peruntukan permukiman
- 8. Kawasan peruntukan industri
- 9. Kawasan peruntukan pariwisata
- 10. Kawasan peruntukan lainnya

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 masih didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,4 persen.

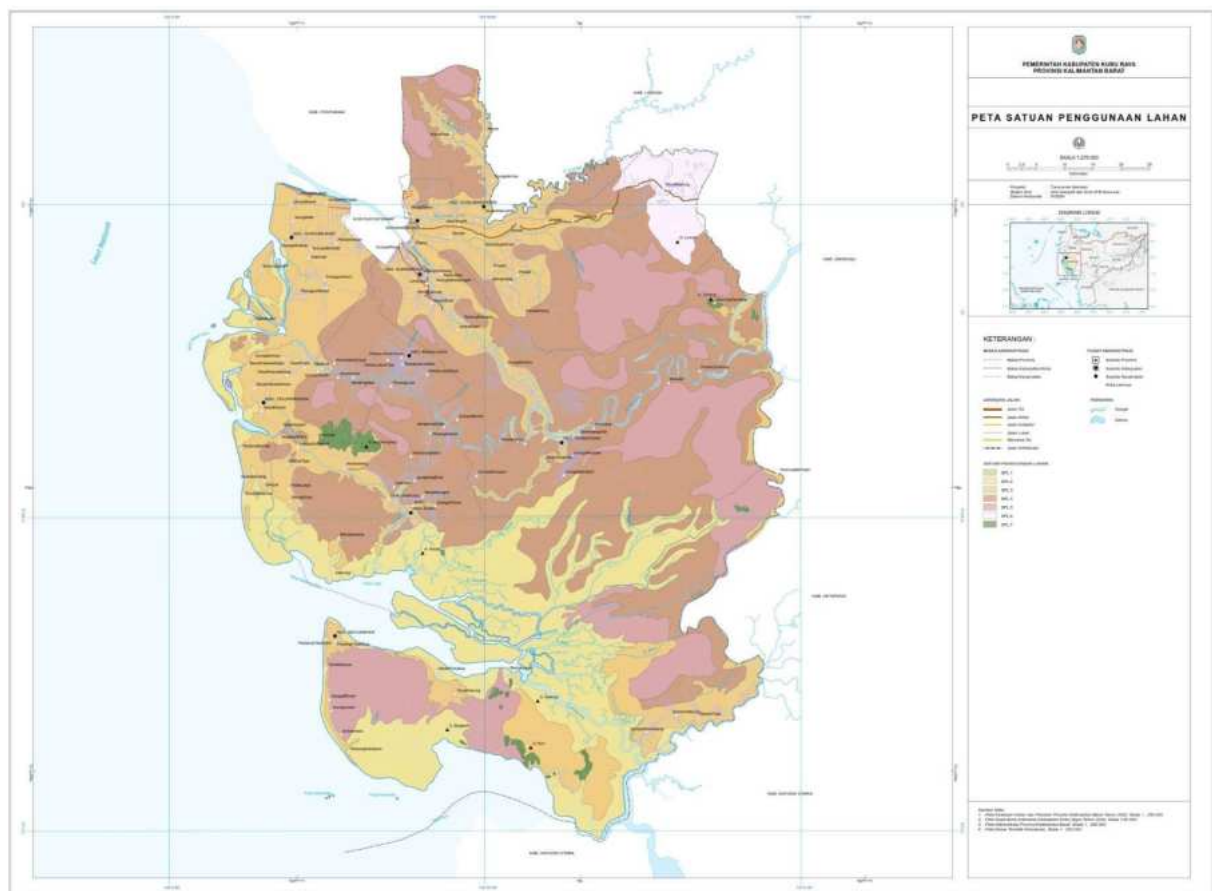
Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No.	Penggunaan	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Pertanian	705.083,00	324.745,00	310.142,00	194.297,00
	a. LAHAN SAWAH	78.866,00	78.866,00	78.866,00	890,00
	- Irigasi	2.111,00	2.111,00	2.111,00	890,00
	- Tadah Hujan	16.801,00	16.801,00	16.801,00	0,00
	- Pasang Surut	59.133,00	59.133,00	59.133,00	0,00
	- Rawat Lebak (polder, rembesan)	821,00	821,00	821,00	0,00
	b. LAHAN BUKAN SAWAH	626.217,00	245.879,00	231.276,00	193.407,00
	- Tegal/Kebun	27.002,00	27.002,00	27.002,00	8.338,00
	- Ladang/Huma	19.404,00	19.404,00	19.404,00	190,00
	- Pekebunan	175.510,00	199.473,00	184.870,00	184.879,00
	- Hutan Rakyat	28.621,00	0,00	0,00	0,00
	- Padang Pengembalaan/Rumput	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hutan Negara	355.400,00	0,00	0,00	0,00
	- Sementara tidak Diusahakan	11.585,00	0,00	0,00	0,00
	- Lainnya (Tambak, Kolam, Empang)	8.695,00	0,00	0,00	0,00
2	Lahan Bukan Pertanian	67.775,00	67.775,00	67.775,00	67.775,00
KABUPATEN KUBU RAYA		772.858,00	392.520,00	377.917,00	262.072,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2021

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.7. berikut:

Gambar 2.7.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah *hinterland* Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalaman Sanggau-Kapuas Hulu.

Tabel 2.4.
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Kubu Raya

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1)	1.	Kec. Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1.	Desa Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar)	1.	Desa Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
		2.	Kec. Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2.	Desa Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2.	Desa Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
		3.	Kec. Kubu (I-III/B/D/2)	3.	Desa Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3.	Desa Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4.	Kec. Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4.	Desa Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4.	Desa Korek (Kec. Sungai Ambawang)

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

- I – IV : Tahapan pengembangan
- A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan
 - A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - A/2 Pengembangan baru
 - A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
 - C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - C/2 Pengembangan baru
 - C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
 - D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
 - D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana
- E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
 - E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - E/2 Pengembangan baru
 - E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Kakap);
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar;
3. PPK (Pusat Kegiatan Kawasan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Desa Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Desa Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Desa Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Desa Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
4. PPL (Pusat Kegiatan Lingkungan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi Desa Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Desa Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Desa Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Desa Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district*, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang;
2. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar;
3. Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap;

4. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Teluk Pakedai;
5. KTM Terentang meliputi Kecamatan Terentang dan Kecamatan Batu Ampar;
6. Kawasan Peternakan;
7. Kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
8. Kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
 - a. Minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Desa Padang Tikar Dua, Desa Nipah Panjang, Desa Batu Ampar, dan Desa Sungai Jawi;
 - b. Minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
 - c. Minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sepuk Laut; dan
 - d. Minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam, Desa Kuala Karang, dan Desa Tanjung Bunga.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Teluk Pakedai.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa. Pada saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup:

1. Kawasan rawan abrasi.
 - a. Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - b. Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya.
2. Kawasan rawan gelombang pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.
3. Kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang.
4. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang.

Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang
5. Kawasan rawan kebakaran.

Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas :

 - a. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang.

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Perkembangan Kependudukan

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 tahun 2020 tercatat sebanyak 610.103 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 312.027 jiwa dan 298.076 jiwa penduduk perempuan. Dapat diketahui bahwa

kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2020 adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu 235.386 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2020 adalah Kecamatan Terentang yaitu 13,743 jiwa.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan Tahun 2015-2020

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sungai Raya	227.714	215.778	219.082	231.772	232.781	235.386
2	Kuala Mandor B	29.025	32.154	31.978	29.624	28.919	28.211
3	Sungai Ambawang	76.797	79.323	80.229	80.400	81.428	82.443
4	Terentang	13.135	13.546	13.452	13.508	13.622	13.743
5	Batu Ampar	36.472	36.486	36.610	36.490	36.827	36.627
6	Kubu	42.455	45.662	45.188	43.051	42.940	43.335
7	Rasau Jaya	30.334	31.740	31.583	30.881	30.925	30.745
8	Teluk Pakedai	20.177	21.493	21.486	21.054	21.060	20.745
9	Sungai Kakap	121.393	123.375	122.698	117.783	119.058	118.868
Total		597.502	599.557	602.306	604.563	607.560	610.103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2021

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksi jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (dependency ratio) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 15-19 tahun, diikuti kelompok umur 20-24 tahun dan kelompok usia 5-9 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia produktif yang cukup besar di Kabupaten Kubu Raya. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020			
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4 Thn	23.423	21.611	45.034
5 – 9 Thn	30.272	28.096	58.368
10 – 14 Thn	29.162	27.055	56.217
15 – 19 Thn	28.862	27.295	56.157
20 – 24 Thn	29.019	27.885	56.904
25 – 29 Thn	26.615	25.570	52.185
30 – 34 Thn	25.818	25.229	51.047
35 – 39 Thn	24.716	24.090	48.806
40 – 44 Thn	22.680	21.829	44.509
45 – 49 Thn	18.806	18.338	37.144
50 – 54 Thn	16.577	16.030	32.607
55 – 59 Thn	12.629	12.068	24.697
60 – 64 Thn	9.385	9.041	16.541
65 – 69 Thn	5.965	5.524	18.426
70 – 74 Thn	3.878	3.986	7.864
> 74 Thn	4.220	4.429	8.649
Jumlah	312.027	298.076	610.103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020				
Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611201	Sungai Raya	120.187	115.199	235.386
611202	Kuala Mandor B	14.531	13.680	28.211
611203	Sungai Ambawang	42.223	40.220	82.443
611204	Terentang	7.192	6.551	13.743
611205	Batu Ampar	18.826	17.801	36.627
611206	Kubu	22.243	21.092	43.335
611207	Rasau Jaya	15.602	15.143	30.745
611208	Teluk Pakedai	10.760	9.985	20.745
611209	Sungai Kakap	60.463	58.405	118.868
Jumlah		312.027	298.076	610.103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.8.
Jumlah Wajib KTP Per Kecamatan dan Realisasi Tahun 2020

Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611201	Sungai Raya	84.238	81.950	166.188
611202	Kuala Mandor B	10.149	9.507	19.656
611203	Sungai Ambawang	29.037	27.756	56.793
611204	Terentang	4.912	4.530	9.442
611205	Batu Ampar	13.414	12.651	26.065
611206	Kubu	15.583	14.918	30.501
611207	Rasau Jaya	10.885	10.685	21.570
611208	Teluk Pakedai	7.466	7.067	14.533
611209	Sungai Kakap	41.570	41.152	82.722
Jumlah		217.254	210.216	427.470

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.9.
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	2020
1	Sungai Raya	67.884
2	Kuala Mandor B	7.801
3	Sungai Ambawang	22.844
4	Terentang	4.098
5	Batu Ampar	10.692
6	Kubu	12.946
7	Rasau Jaya	9.402
8	Teluk Pakedai	6.130
9	Sungai Kakap	34.692
Total		176.489

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara natural, laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena adanya mutasi penduduk yang dikarenakan adanya kelahiran, kematian, datang dan pergi/pindah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang yaitu 3,18 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kubu. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Menurut Kecamatan, 2020

No	Kecamatan	Keterangan	
		Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Sungai Raya	234.087	2,15
2	Kuala Mandor B	27.342	1,33
3	Sungai Ambawang	83.085	2,27
4	Terentang	13.235	2,68
5	Batu Ampar	35.856	0,77
6	Kubu	42.052	1,39
7	Rasau Jaya	30.346	2,51
8	Teluk Pakedai	20.287	0,76
9	Sungai Kakap	123.102	1,91
Kabupaten Kubu Raya		609.392	1,91

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada 2019 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami kenaikan dari 5,82 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,62 persen. Walaupun secara nominal, PDRB ADHB konstan tahun 2019 meningkat sebesar 50,2 juta per kapita per tahun akan tetapi laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen. Walaupun tidak signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun terakhir, akan

tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,83 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 18,28 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,72 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selama 2020 mengalami kontraksi disebabkan adanya penurunan pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, utamanya angkutan udara. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mana terdapat larangan untuk bepergian masuk ataupun keluar Kalbar. Penurunan pertumbuhan Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga menjadi penyebab yang mempengaruhi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 37,49 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tidak mencapai setengah dari semua kategori lapangan usaha. Tujuh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan sisanya tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,88 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,34 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13 persen; Real Estate sebesar 3,46 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,35 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 37,49 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif lebih dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 32,46 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,72 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,43 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 10,32 persen.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,09 juta rupiah. PDRB Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 50,26 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Namun menurun di tahun 2020 menjadi 47,48 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Tabel 2.11.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Kat.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,65	12,38	12,07	12,04	13,05
B	Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,23	3,26	3,30	3,49
C	Industri Pengolahan	31,84	31,66	31,71	32,40	34,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,31	0,32	0,33	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
F	Konstruksi	12,06	12,14	11,92	11,75	11,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,12	9,84	9,75	9,86	9,87
H	Transportasi dan Pergudangan	10,84	12,01	12,68	11,97	8,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,63	1,61	1,63	1,51
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,21	3,20	3,23	3,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	1,36	1,34	1,30	1,30
L	Real Estat	3,02	2,90	2,89	2,87	3,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	3,50	3,50	3,52	3,95
P	Jasa Pendidikan	4,09	3,89	3,84	3,87	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,66	0,63	0,64	0,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,87	0,84	0,83	0,84	0,80
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Kubu Raya, 2020

<div>Tabel 2.12.</div> <div>Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)</div>						
Kat.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,55	5,80	4,66	6,06	3,88
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	5,06	5,96	5,75	-0,95
C	Industri Pengolahan	5,20	5,34	4,18	8,31	-0,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,29	5,08	4,18	4,93	16,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,41	7,13	2,00	9,33	6,89
F	Konstruksi	9,58	8,93	5,50	3,13	-0,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,32	5,61	4,97	7,09	-3,98
H	Transportasi dan Pergudangan	10,55	13,66	10,38	-2,64	-32,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29	5,89	4,32	7,41	-11,72
J	Informasi dan Komunikasi	11,02	7,44	7,67	6,24	8,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,38	6,55	6,71	2,92	-1,16
L	Real Estat	4,27	4,49	2,84	5,05	3,46
M,N	Jasa Perusahaan	8,11	4,33	6,24	6,41	-3,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,39	4,44	5,21	5,02	5,35
P	Jasa Pendidikan	6,76	5,10	3,50	6,43	-6,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	1,76	4,10	7,67	37,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,25	4,86	4,07	9,04	-10,32
Produk Domestik Regional Bruto		6,37	6,54	5,25	5,72	-2,43

Sumber : PDRB Kabupaten Kubu Raya, 2020

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 34,01 persen (angka ini meningkat dari 31,84 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,05 (naik dari 12,65 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,84 persen (turun dari 12,06 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,87 persen (turun dari 10,12 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,20 persen.

Tabel 2.13.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Kat.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,65	12,38	12,07	12,04	13,05
B	Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,23	3,26	3,30	3,49
C	Industri Pengolahan	0,30	0,31	0,32	0,33	0,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,31	0,32	0,33	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
F	Konstruksi	12,06	12,14	11,92	11,75	11,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,12	9,84	9,75	9,86	9,87
H	Transportasi dan Pergudangan	10,84	12,01	12,68	11,97	8,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,63	1,61	1,63	1,51
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,21	3,20	3,23	3,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40
L	Real Estat	3,02	2,90	2,89	2,87	3,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	3,50	3,50	3,52	3,95
P	Jasa Pendidikan	4,09	3,89	3,84	3,87	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,66	0,63	0,64	0,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,87	0,84	0,83	0,84	0,80
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1. Industri Pengolahan, 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3. Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 2.14, pada tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar berada pada sub kategori perkebunan yaitu sebesar 9,64 persen. Sementara itu, sub kategori peternakan tumbuh sebesar 5,55 persen, tanaman holtikultura

tumbuh sebesar 7,62 persen, jasa pertanian sebesar 3,10 persen, tanaman pangan tumbuh sebesar 12,11 persen, serta perikanan sebesar 3,89 persen. Di sisi lain, sub kategori kehutanan dan penebangan kayu mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen di tahun 2020. Sub kategori kehutanan dan penebangan kayu mulai membaik seiring dengan pertumbuhan pada sub kategori industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya pada tahun yang sama.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan Sub Kategori Pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,55	5,80	4,46	6,32	7,86
1. Pertanian	3,79	6,50	4,87	7,02	8,75
a. Tanaman Pangan	-9,72	3,45	-4,53	8,27	12,11
b. Tanaman Hortikultura	8,72	6,24	5,87	5,67	7,60
c. Tanaman Perkebunan	8,00	8,20	7,84	7,82	9,64
d. Peternakan	6,72	5,96	6,19	5,37	5,55
e. Jasa Pertanian	6,18	4,95	4,23	3,95	3,10
2. Kehutanan	-0,52	-0,30	-0,18	0,11	1,01
3. Perikanan	4,45	3,17	3,51	3,18	3,89

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya masuk dalam konteks diversifikasi Arthur Lewis (teori migrasi) yang membagi perekonomian atas perekonomian perdesaan dan perkotaan. Dalam prespektif perekonomian, transformasi ideal sektor perekonomian ditunjukkan dengan perubahan sektor pertanian ke industri sebagai mesin penggerak ekonomi suatu daerah (*pattern of develomment, hollis chenery*). Terkait dengan hal tersebut, pergerakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya, ditunjang dengan tingginya peran sektor industri yang didukung dengan sektor pertanian dan jasa penunjang lainnya. Namun demikian, secara perlahan terjadi kondisi lompatan, dimana sektor jasa (tersier) mengambil alih peran sektor sekunder, sebagai penunjang sektor pertanian (primer). Dari sisi ini, pergeseran terhadap sektor basis tersebut, diikuti dengan sektor lainnya yang selama ini merupakan sektor dimana cukup besar dalam menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

Tabel 2.15.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	21.135,94	23.700,99	26.343,57	29.110,82	28.932,31
ADHK	15.416,53	16.424,30	17.287,11	18.275,88	17.832,61
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	38.096,00	42.103,00	46.143,00	50.249,00	47.477,00
ADHK	27.787,00	29.177,00	30.280,00	31.547,00	29.263,00
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,56	5,00	3,78	4,18	-7,24
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	554,81	562,92	570,91	579,33	609,39
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,72	1,46	1,42	1,47	1,91

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.2.1.2. Laju Inflasi

Fluktuasi nilai PDRB dapat digunakan untuk mengetahui tingkat daya beli masyarakat di suatu wilayah. Dengan mengetahui angka nilai inflasi maka akan dapat diketahui nilai uang secara riil. Nilai inflasi yang terkendali menunjukkan perekonomian suatu daerah yang berkualitas. Nilai inflasi yang digunakan adalah nilai inflasi Kota Pontianak.

Pada tahun 2020 Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kubu Raya sebesar 144,28 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 137,14 atau mengalami inflasi harga produsen sebesar 5,21 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 13,63 persen, diikuti oleh transportasi dan pergudangan sebesar 8,78 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,32 persen. Sedangkan kategori yang mengalami inflasi paling rendah adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,80 persen, kemudian jasa pendidikan sebesar 2,25 persen.

Tabel 2.16.
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Kubu Raya (%)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan PDRB	6,37	6,56	5,25	5,72	-2,43
2.	Laju Inflasi (Kota Pontianak)	5,20	5,21	6,63	5,20	5,21

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018 = 100 dibandingkan IHK 2012 = 100, khususnya mengenai cakupan kota, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018 = 100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok.

Tabel 2.17.
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (%)

No.	Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	5,31	0,77	3,82
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,12	3,59	2,59
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3,37	6,64	3,51
4	Sandang	4,95	4,48	2,84
5	Kesehatan	3,24	5,20	4,31
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,98	8,14	5,49
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,18	2,68	6,09
8	Umum	3,88	3,86	3,99

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2018

No.	Kelompok Pengeluaran	2019	2020
	Umum	103,86	105,98
1	Makanan, Minumam dan Tembakau	103,60	108,91
2	Pakaian dan Alas Kaki	105,28	104,53
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	101,61	102,18
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,38	105,03
5	Kesehatan	114,85	120,41
6	Transportasi	104,75	102,86
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,83	100,20
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	103,63	104,30
9	Pendidikan	104,87	105,72

No.	Kelompok Pengeluaran	2019	2020
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,06	106,90
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,56	108,37

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2021

Dampak riil pergerakan inflasi yang dihitung berdasarkan IHK akan terasa memberikan dampak secara riil terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Dengan kondisi geografis yang terpisahkan oleh wilayah perairan, tekanan perubahan IHK terhadap biaya distribusi ke wilayah-wilayah pedalaman, akan dibebankan kepada konsumen, sehingga *purchasing power* menjadi rendah.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut.

2.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.

Tabel 2.18.
Kinerja Pendidikan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf (%)	92,84	92,56	92,17	91,59	90,24
2.	Rata Lama sekolah (Thn)	6,57	6,58	8,46	8,49	7,37
3.	Harapan Lama Sekolah	12,84	13,21	13,59	13,64	13,82
4.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI/Paket A	113,83	101,61	114,18	108,24	106,40
	- SMP/MTs/Paket B	95,64	90,02	97,80	116,12	98,88
	- SMA/SMK/MA/Paket C	72,70	61,39	97,08	80,31	99,58
5.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	99,72	91,61	96,56	96,58	97,63
	- SMP/MTs/Paket B	89,08	83,85	82,26	81,11	98,88
	- SMA/SMK/MA/Paket C	66,27	53,39	52,26	53,24	99,58
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	92,25	92,32	93,55	92,93	92,36
	- SMP/MTs/Paket B	94,58	96,40	98,16	113,89	104,48
	- SMA/SMK/MA/Paket C	70,53	80,44	83,23	80,40	64,01

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah berarti jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, tahun 2019 sebesar 8,49 tahun, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 7,37 tahun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 rata-rata penduduk Kabupaten Kubu Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 (satu) SMP. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah cenderung belum menunjukkan perubahan yang signifikan, yakni rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai lulus SD.

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua dengan salah satu strateginya adalah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi APS semakin terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

2.2.2.2. Kesehatan

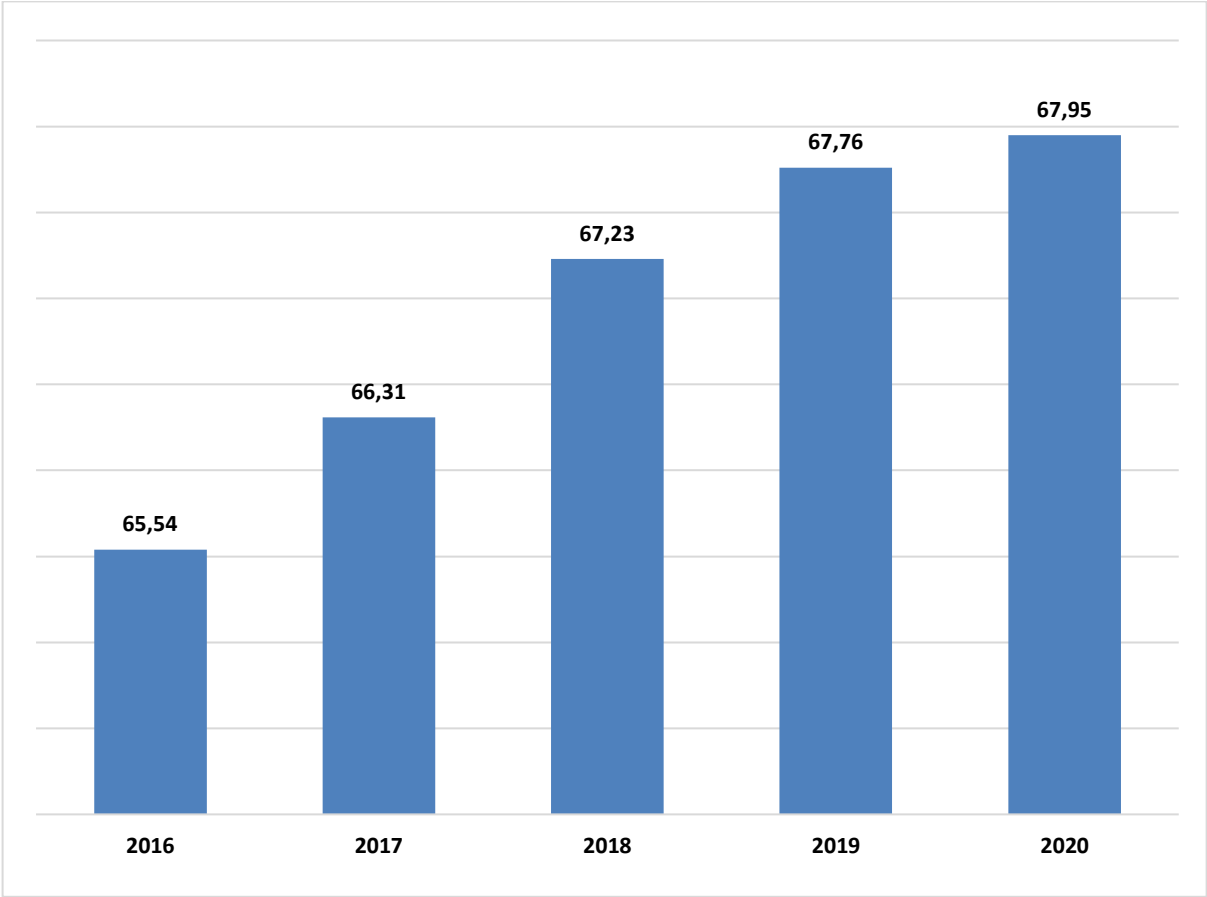
Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2020) Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari metode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2020 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-3 (tiga) dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kendatipun secara relatif terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk angka harapan hidup, komponen IPM pada tahun 2020 mencapai 70,59 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan angka harapan hidup sebesar 70,43 tahun. Peningkatan terhadap angka harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.19.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka IPM	65,54	66,31	67,23	67,76	67,95
2.	Peringkat di Provinsi Kalimantan Barat	3	3	3	3	3

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Grafik 2.1.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

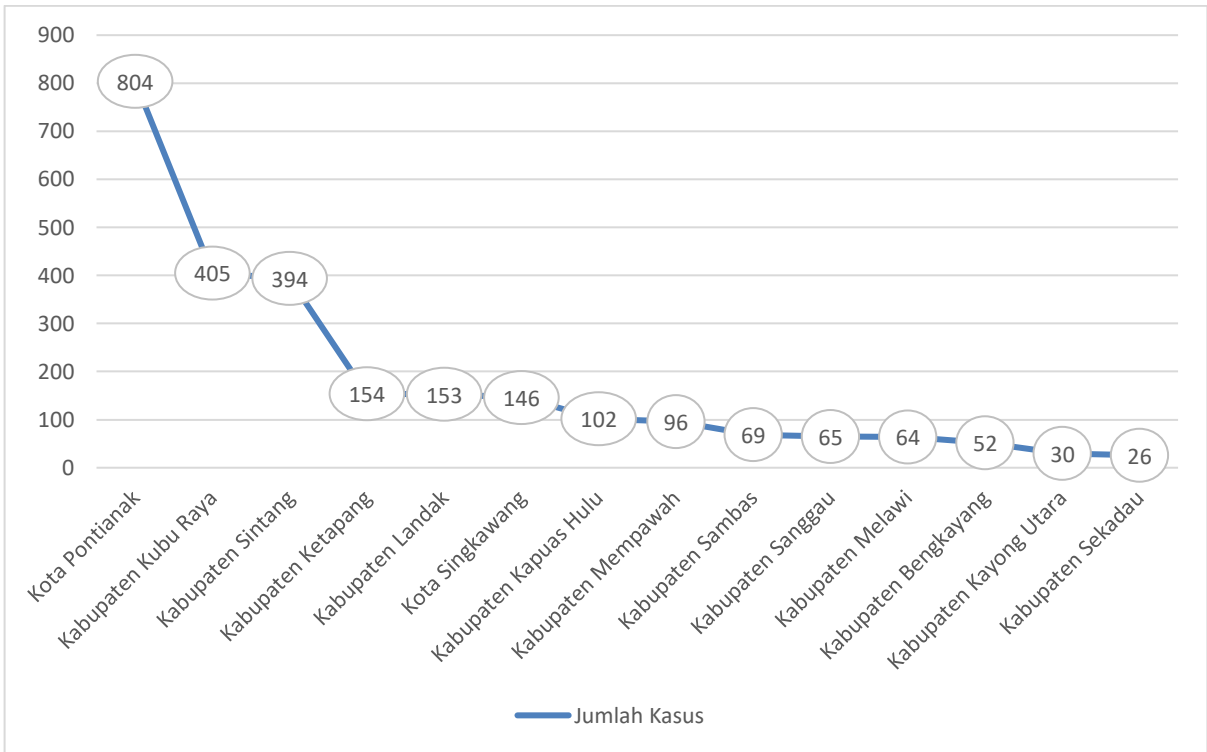


Tabel 2.20.
Kinerja Kesehatan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus)	60	33	38	31	30
2.	Angka Harapan Hidup	69,77	69,80	70,04	70,69	70,59
3.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	29	22	16	33	N/A
4.	Stunting	29,30	34,80	25,60	23,63	13,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2021

Grafik 2.2.
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2020
* Update data pada tanggal 5 Desember 2020

Selain terkait dengan penegakan protokol kesehatan (prokes), pencegahan penularan Virus Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya disebabkan posisinya sebagai kawasan penyangga ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, termasuk mencari perumusan terbaik guna memastikan roda perekonomian terus berputar. Berikut data sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya per tanggal 25 Oktober 2021.

Tabel 2.21.
Sebaran Pelaku Perjalanan, Suspek, Kontak Erat *Probable* dan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya

No.	Puskesmas	Konfirmasi							
		Kubu Raya				Luar Wilayah			
		Jumlah Kasus	Dirawat/ Isolasi	Sembuh	Meninggal	Jumlah Kasus	Dirawat/ Isolasi	Sembuh	Meninggal
1	Batu Ampar	94	0	93	1	0	0	0	0
2	Padang Tikar	55	1	50	4	0	0	0	0
3	Sui Kerawang	49	1	48	0	0	0	0	0
	Total Kecamatan Batu Ampar	198	2	191	5	0	0	0	0

No.	Puskesmas	Konfirmasi							
		Kubu Raya				Luar Wilayah			
		Jumlah Kasus	Dirawat/ Isolasi	Sembuh	Meninggal	Jumlah Kasus	Dirawat/ Isolasi	Sembuh	Meninggal
4	Terentang	20	0	20	0	0	0	0	0
5	Radak	50	0	49	1	0	0	0	0
	Total Kecamatan Terentang	70	0	69	1	0	0	0	0
6	Kubu	107	0	105	2	1	0	1	0
7	Air Putih	56	0	52	4	0	0	0	0
	Total Kecamatan Kubu	163	0	157	6	1	0	1	0
8	Teluk Pakedai	50	0	47	3	0	0	0	0
	Total Kecamatan Teluk Pakedai	50	0	47	3	0	0	0	0
9	Sungai Kakap	360	1	351	8	11	0	11	0
10	Punggur	47	0	46	1	0	0	0	0
11	Sungai Rengas	153	1	147	5	0	0	0	0
	Total Kecamatan Sungai Kakap	560	2	544	14	11	0	11	0
12	Rasau Jaya	232	1	217	14	2	0	2	0
	Total Kecamatan Rasau Jaya	232	1	217	14	2	0	2	0
13	Sungai Durian	716	0	694	22	6	0	6	0
14	Sungai Raya Dalam	653	1	631	21	35	0	35	0
15	Sungai Asam	90	0	90	0	0	0	0	0
16	Korpri	531	0	510	21	1	0	1	0
	Total Kecamatan Sungai Raya	1.990	1	1.925	64	42	0	42	0
17	Sungai Ambawang	225	0	215	10	4	0	4	0
18	Lingga	57	0	54	3	0	0	0	0
19	Parit Timur	26	1	25	0	0	0	0	0
	Total Kecamatan Sungai Ambawang	308	1	294	13	4	0	4	0
20	Kuala Mandor B	43	0	42	1	0	0	0	0
	Total Kecamatan Kuala Mandor B	43	0	42	1	0	0	0	0
	TOTAL	3.614	7	3.486	121	60	0	60	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.2.1.3. Kemiskinan

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang cukup tinggi sayangnya tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003).

Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (*basic need*) dengan pendekatan teori Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada beberapa pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minimum Regional (UMR).

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan hingga tiga tahun berturut sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat

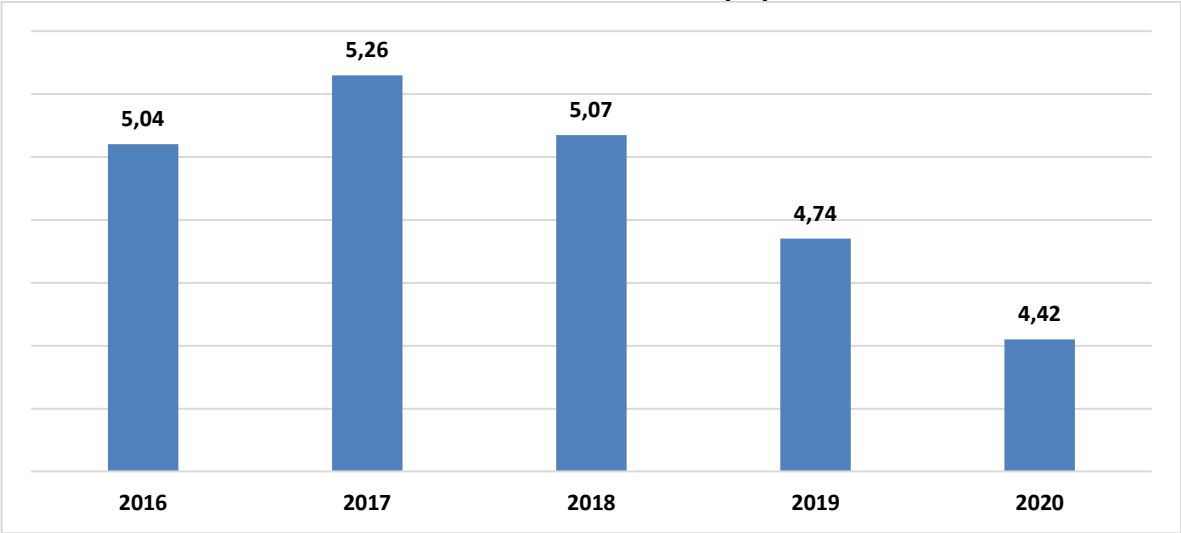
diakibatkan karena Kabupaten Kubu Raya termasuk salah satu kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi. Terdapat penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya yang terjadi dari tahun 2016, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Namun pada tahun berikutnya secara berturut-turut jumlah penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan sehingga berada diangka 4,42 persen di tahun 2020.

Tabel 2.22.
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kemiskinan 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.830	29.530	28.860	27.370	25.900
2.	Persentase Kemiskinan (%)	5,04	5,26	5,07	4,74	4,41

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Grafik 2.3.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2015-2020 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 merupakan yang terendah selama periode empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok termiskin semakin mendekat dari garis kemiskinan yang artinya akan semakin mudah untuk kelompok termiskin untuk keluar dari kemiskinan. Hal yang sama juga terlihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2018 dan tahun 2020 juga merupakan angka terendah selama periode empat tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin semakin kecil. Dapat diartikan bahwa ketimpangan antara sesama penduduk miskin juga semakin kecil. Meski demikian, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih harus terus ditingkatkan. Hasilnya di tahun 2020 indeks P1 (kedalaman kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan dan berada diangka 0,62. Sedangkan indeks P2 (keparahan kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya juga mengalami kenaikan mencapai 0,14. Sementara di rata-rata Provinsi Kalimantan Barat indeks P1 sebesar 1,01 dan P2 sebesar 0,23 di Tahun 2020. Dengan asumsi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berdampak kurang baik kepada upaya mengurangi derajat kesejahteraan diantara penduduk miskin.

Tabel 2.23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2016	0,77	1,29	0,17	0,32
2017	0,75	1,19	0,21	0,27
2018	0,63	1,23	0,14	0,29
2019	0,75	1,14	0,17	0,26
2020	0,62	1,01	0,14	0,23

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

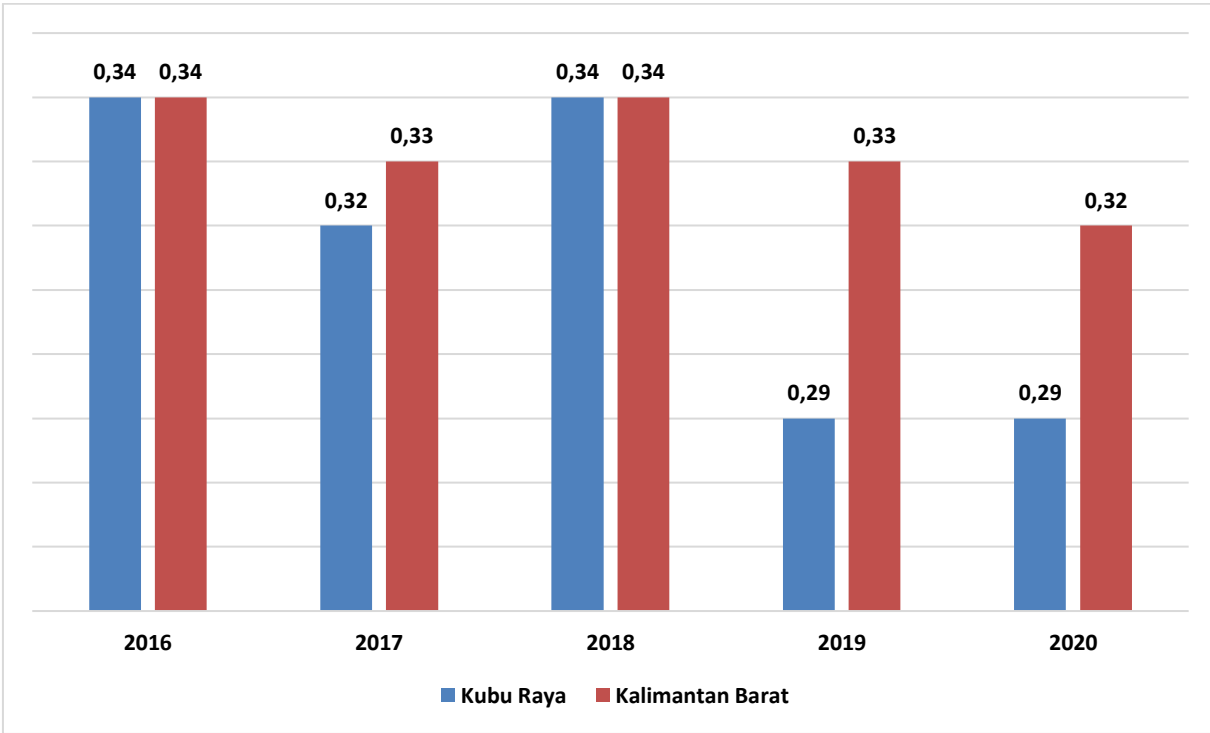
Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh antara seluruh kelompok penduduk berdasarkan pendapatannya. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan 2018 namun kemudian berkurang pada tahun 2019 dan tahun 2020. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Kubu Raya semakin baik.

Tabel 2.24.
Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Gini	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2016	0,34	0,34
2017	0,32	0,33
2018	0,34	0,34
2019	0,29	0,33
2020	0,29	0,32

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Grafik 2.4.
Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

2.2.1.4. Kesempatan Kerja

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas). TPAK Kalimantan Barat pada Agustus 2020 sebesar 68,83 persen dan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,51 persen maka angka TPAK tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan

perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,35 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 53,86 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,24 persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen poin.

Tabel 2.25.
Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja	N/A	254.314	252.023	518.546	290.584
	Bekerja	N/A	239.273	239.325	266.776	269.826
	Pengangguran	N/A	15.041	12.698	251.770	20.758
2.	Bukan Angkatan Kerja	N/A	143.669	153.050	145.691	138.564
	Sekolah	N/A	47.464	42.305	38.051	N/A
	Mengurus Rumah Tangga	N/A	80.037	96.917	85.250	N/A
	Lainnya	N/A	16.168	13.830	22.390	N/A
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	63,90	62,22	64,48	67,71
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	5,91	5,04	5,62	7,14

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2017 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 250 unit dengan jumlah siswa sebanyak 10.635 siswa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka Putus Sekolah idealnya adalah 0 persen. Pada tahun 2017, Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,83 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,57 persen. Angka Putus Sekolah SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP dan SMU, berkorelasi dengan Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonomi untuk membantu orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Perkembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 sebesar 18,00, SMP sebesar 14,00 dan SMU sebesar 18,00. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya cukup ideal.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yakni pada tahun 2015 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya sebesar 66,73 persen, tahun 2016 sebesar 76,58 persen dan pada tahun 2017 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan menjadi 78,56 persen. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Persentase guru yang sudah bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 34,86 persen mengalami

peningkatan apabila dibandingkan dari tahun 2016 yang baru sebesar 33,49 persen.

Tabel 2.26.
Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
1	Baik	798	350	N/A
2	Rusak Ringan	1.690	556	N/A
3	Rusak Sedang	25	21	N/A
4	Rusak Berat	20	11	N/A
5	Rusak Total	0	0	N/A
	Jumlah	2.533	931	
1	% Baik	31,50	37,59	N/A
2	% Rusak Ringan	66,71	59,72	N/A
3	% Rusak Sedang	0,98	2,25	N/A
4	% Rusak Berat	0,78	1,18	N/A
5	% Rusak Total	0,00	0,00	N/A

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.27.
Urusan Konkuren Bidang Pendidikan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf (AMH)	97,75	97,76	92,17	91,59	90,24
2	IPM	65,54	66,31	67,23	67,76	67,95
	- Angka Harapan Hidup (AHH)	69,77	69,80	70,04	70,69	70,59
	- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,84	13,21	13,59	13,64	13,89
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	6,57	6,58	6,81	6,82	6,83
	- Pengeluaran Perkapita (ribuan rupiah)	8.145,12	8.430,21	8.532,34	8.773,42	8.709,08
3	Angka Putus Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	0,57	0,83	0,43	0,08	0,05
	- APS SMP/MTs	0,67	1,69	0,63	0,33	0,22
	- APS SMA/MA/SMK	0,24	1,03	0,92	0,29	0,10
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	92,25	92,32	93,55	92,93	89,17

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	- APS SMP/MTs	94,58	96,40	98,16	113,89	104,48
	- APS SMA/MA/SMK	70,53	80,44	83,23	80,40	64,01
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- APM SD/MI	99,72	91,61	96,56	96,58	89,17
	- APM SMP/MTs	89,08	83,85	82,26	81,11	79,56
	- APM SMA/MA/SMK	66,27	53,39	52,26	53,24	49,99
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- APK SD/MI	113,83	101,61	114,18	108,24	103,14
	- APK SMP/MTs	95,64	90,02	97,80	116,12	94,11
	- APK SMA/MA/SMK	72,70	61,39	97,08	80,31	70,64
7	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)					
	- APT SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- APT SMP/MTs	99,97	98,43	99,97	99,98	100,00
	- APT SMA/MA/SMK	99,98	99,81	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Sekolah PAUD/TK	227	250	250	256	100
	- Jumlah Sekolah SD/MI	533	537	537	544	540
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	227	235	237	240	283
	- Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	87	93	127	137	102
9	Jumlah Murid (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Murid TK/PAUD	10.620	10.635	10.680	11.205	3.713
	- Jumlah Murid SD/MI	76.765	74.598	71.429	71.444	73.159
	- Jumlah Murid SMP/MTs	33.185	33.188	32.124	32.072	32.898
	- Jumlah Murid SMA/SMK/MA	17.701	17.184	22.387	23.474	13.383
10	Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Guru TK/PAUD	977	1.086	1.086	4.164	366
	- Jumlah Guru SD/MI	4.286	4.260	4.260	2.309	4.703

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	- Jumlah Guru SMP/MTs	2.348	2.388	2.362	1.479	757
	- Jumlah Guru SMA/SMK/MA	943	951	1.360	7.952	893
11	Rasio Murid Terhadap Guru					
	- Rasio Murid Terhadap Guru TK/PAUD	10	10	10	10	10
	- Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	16	18	17	17	17
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	18	14	14	14	14
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	18	18	16	17	17
12	Angka Melanjutkan (AM)					
	- AM SMP	102,58	111,52	104,97	50,00	53,58
	- AM SMA	68,26	74,67	78,55	100,00	104,61
13	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah SD dalam kondisi baik	684	727	766	721	713
	- Sekolah SMP dalam kondisi baik	403	363	404	395	386
	- Sekolah SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	318	359	372	368	342
14	Ketersediaan Sekolah					
	- Ketersediaan SD/MI	533	537	537	544	545
	- Ketersediaan SMP/MTS	227	235	237	240	240
	- Ketersediaan SMA/MA	87	93	95	N/A	N/A
	- Ketersediaan SMK	26	30	32	N/A	N/A
	- Ketersediaan TK	227	250	250	256	263
15	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	76,58	78,56	75,67	78,48	78,92
16	Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi	33,49	34,86	39,11	23,75	33,75

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020
Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Mengurai permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Dari perhitungan IPM, rata-

rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik dan terus mengalami kenaikan dan sudah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih di bawah angka rata-rata lama sekolah yang diwajibkan yaitu 9 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di tahun 2014 adalah 7,55 tahun dan di tahun 2018 sudah mencapai 8,46 tahun. Artinya peluang peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan tingkat dasar 9 tahun sudah cukup besar dan diharapkan dapat dicapai dalam masa akhir RPJMD ke-3 ini.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya adalah 6,83 tahun, dimana angka ini hanya naik sebesar 0,01 dari tahun 2019. Untuk mencapai target rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2024 mencapai 7,20, maka dibutuhkan terobosan-terobosan yaitu dengan strategi peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai suatu wadah kegiatan pembelajaran masyarakat yang programnya antara lain pendidikan kesetaraan (A, B dan C), pendidikan keaksaraan, pendidikan kewarganegaraan, kerumahtanggaan, dan lain-lain. Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 15 PKBM, tapi dari segi jumlah dirasakan masih kurang dan belum merata di semua kecamatan.

Tabel 2.28.
Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
1	P9908484	PKBM SIMPATI	Kubu	Jl. Diponegoro TR 12 Desa Jangkang Satu
2	P9908485	PKBM MARGA JAYA	Rasau Jaya	Patok 33 Dusun Banjar Rejo Desa Rasau Jaya II
3	P9952915	SKB KUBU RAYA	Rasau Jaya	Jl. Jendral Sudirman No. 45 Rasau Jaya
4	P9908486	PKBM AINUL YAQIN	Sungai Ambawang	Jl. Trans Kalimantan Gg. Seribut Desa Jawa Tengah
5	P2970101	PKBM ANGGREK	Sungai Ambawang	Jl. Trans Kalimantan
6	P9908780	PKBM PROKINDO	Sungai Kakap	Jl. Primer Desa Jeruju Besar
7	P9948187	PKBM ADAM	Sungai Raya	Jl. Adisucipto Perumahan Teluk Mulus Blok H.11
8	P9934733	PKBM AYO MAJU	Teluk Pakedai	Dusun Suka Harja
9	P9947905	PKBM MERDEKA	Terentang	Jalan Poros Utama No. 09
10	P9996716	PKBM BERKAT MANDIRI	Sungai Kakap	Jl. Parit Berkat Rt.15/Rw.06 Punggur Besar

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
11	P2970104	PKBM HARAPAN KITA	Sungai Kakap	Jl. Pramuka Komplek PHK Blok 1/88
12	P9970519	PKBM KHADIJAH	Sungai Raya	Jl. Wonodadi 2 No. 22 Rt.004/Rw.011
13	P2970519	PKBM APRILIA	Sungai Raya	Jl. A. Yani 2/Arteri Supadio Km 3,5
14	P9970252	PKBM SIRATUL JANNAH	Rasau Jaya	Jl. Rasau Jaya, Kuala Dua
15	P9908490	PKBM HASANAH	Terentang	Desa Teluk Bayur

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Indikator pendidikan dapat diklasifikasikan : 95 – 100 berkategori paripurna, 90 – 94,99 berkategori utama, 85 – 89,99 berkategori madya, 80 – 84,99 berkategori pratama, kurang dari 80 berkategori kurang. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, maka kinerja bidang pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya bahwa aspek pendidikan dan mutu pendidikan masih kurang. Akses Pendidikan dengan nilai rata-rata 78,89 persen termasuk kategori kurang, dirinci atas indikator meluas sebesar 68,41 persen termasuk kategori kurang, indikator merata sebesar 70,51 persen termasuk kategori kurang dan indikator berkeadilan sebesar 97,74 persen termasuk kategori paripurna. Sedangkan aspek mutu pendidikan dengan rata-rata nilai 71,86 persen termasuk kategori kurang, yang dirinci menjadi indikator mutu siswa sebesar 90,86 persen termasuk kategori utama, indikator mutu guru sebesar 66,55 persen termasuk kategori kurang dan indikator mutu prasarana sebesar 58,19 persen termasuk kategori kurang. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 78,89 persen termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 84,04 persen termasuk kategori pratama, dan jenjang SMA dengan nilai 73,73 persen termasuk kategori kurang, dengan rata-rata angka dikdasmen sebesar 78,89 persen juga termasuk kategori kurang. Secara umum kinerja Kabupaten Kubu Raya sebesar 78,89 persen dan termasuk kategori kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29.
Pencapaian Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Kubu Raya 2019/2020

Aspek	SD	SMP	SMA	Dikdasmen	Jenis
AKSES PENDIDIKAN					
a. Merata	65,63	71,40	57,05	64,69	KURANG
b. Meluas	77,83	74,73	58,93	70,50	KURANG
c. Berkeadilan	96,25	93,33	99,66	96,42	PARIPURNA
MUTU PENDIDIKAN					
a. Siswa	92,06	99,55	99,76	92,72	UTAMA
b. Guru	71,57	67,04	62,86	67,15	KURANG
c. Prasarana	40,10	55,11	49,98	48,40	KURANG
Kinerja	73,91	76,86	71,37	73,31	KURANG
	KURANG	PRATAMA	KURANG	KURANG	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Adapun data detail sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
Nilai Indikator Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SMA	Dikdasmen
Akses yang Meluas					
1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	96,55	81,92	96,03	91,50
3	Persentase Perpustakaan (% Perpus)	73,74	64,56	51,97	63,42
4	Persentase Ruang UKS (% RUKS)	26,63	64,14	54,33	48,37
5	Persentase Tempat Olahraga (% TOR)	99,81	95,36	88,19	94,45
6	Persentase Laboratorium (% Lab)	-	62,45	13,54	25,33
Akses yang Merata					
7	Angka Partisipasi Murni (APM)	91,80	84,17	53,06	76,34
8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100,00	91,93	63,70	85,21
9	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	100,00	100,00	92,33	97,44
10	Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM)	77,59	100,00	71,55	83,05

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SMA	Dikdasmen
11	Satuan Biaya (SB)	-	-	-	-
Akses yang Berkeadilan					
12	Perbedaan Gender APK (PG APK)	94,86	98,33	97,30	96,83
13	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	95,15	98,20	95,85	96,40
14	Persentase Siswa Swasta (% S-Swt)	100,00	100,00	100,00	100,00
Mutu dari Segi Siswa					
1	Persentase Siswa Baru TK (% SB TK)	48,55	-	-	48,55
2	Angka Mengulang (AU)	98,08	98,97	99,19	98,75
3	Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)	100,00	99,73	99,27	99,67
4	Angka Lulusan (AL)	100,00	99,97	100,00	99,99
5	Angka Putus Sekolah (APS)	99,57	99,37	99,08	99,34
6	Rata2 Lama Belajar (RLB)	97,75	99,26	99,52	98,85
Mutu dari Segi Guru					
7	Persentase Guru Layak (% GL)	68,71	79,72	90,44	79,62
8	Persentase Guru Sertifikasi (% GS)	50,82	27,27	23,01	33,70
9	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	95,38	90,71	72,87	86,32
Mutu dari Segi Prasarana					
10	Persentase Sekolah Akreditasi A & B (% SA-AB)	32,59	28,69	22,05	27,78
11	Persentase Ruang Kelas baik (% RKb)	66,26	80,48	88,26	78,33
12	Persentase Perpustakaan baik (% Perpusb)	60,10	54,25	81,82	65,39
13	Persentase Ruang UKS baik (% RUKSb)	72,73	80,26	68,12	73,70
14	Persentase Laboratorium baik (% Labb)	-	70,95	66,28	45,74

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Pertumbuhan pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya semakin baik. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya juga terus bertambah. Pondok pesantren ini juga bisa menjadi pilihan utama bagi para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.31.
Daftar Lembaga Pondok Pesantren Umum di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
1	510361120001	Abdussalam	Parit Surabaya, Desa Pasak	Sungai Ambawang
2	510061120002	Nahdlatul Athfal	Parit Adam, RT 02 RW 04, Desa Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
3	510061120003	Raudhatul Ulum I Meranti	Dusun Meranti, Desa Puguk	Sungai Ambawang
4	510061120004	Raudhatul Ulum Khaliliyah	Parit Surabaya, Desa Pasak	Sungai Ambawang
5	510061120005	Mambaul Ulum I	Kampung Baru, Desa Simpang Kanan	Sungai Ambawang
6	510061120006	Tuh Fatul Athfal	Jl. Rasau Jaya Gang Utama RT 04 RW 06, Dusun Keramat 2 Desa Kuala Dua	Sungai Raya
7	510061120007	Raudhatul Mubtadiin	Parit Banyu Ates, Desa Pasak Piang RT 02 RW 02	Sungai Ambawang
8	510061120008	Mambaul Ulum	Parit H. MaksuM , Punggur Kecil RT 17 RW 15	Sungai Kakap
9	510061120009	Al Hidayah	Parit Naim, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
10	510061120011	Darul Hidayah	Jl. Sultan Agung Patok 5, Desa Rasau Jaya Satu	Rasau Jaya
11	510061120012	Al Aziz	Jl. Parit Timur Dusun Maju Bersama RT 02 RW 01, Desa Pasak	Sungai Ambawang
12	510061120015	Haebat Islam	Jl. Soekarno Hatta,Gang Pesantren Gontong, Desa Parit Baru	Sungai Raya
13	510061120017	Hidayatul Muhsinin	Jl. Perdamaian, Desa Pal Sembilan	Sungai Kakap
14	510061120018	Mansyaul Ulum	Dusun Teluk Lerang, Desa Kuala Mandor A	Kuala Mandor B
15	510061120019	Miftahul Ulum	Jl.Karya Desa Sui Ambangah RT 03 RW 02	Sungai Raya
16	510061120020	Miftahul Ulum	Jl. Parit Berkat Punggur Besar	Sungai Kakap
17	510061120021	Nurul Furqon	Parit Husin Desa Punggur Kecil	Sungai Kakap

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
18	510361120022	Al Mas'udiyah	Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Parit Bhakti Suci, Desa Kuala Dua	Sungai Raya
19	510061120023	Rubath Naqsabandiyah	Parit Mas, Desa Madusari	Sungai Raya
20	510061120024	Mambaul Ulum	Dusun Sui Jawi, Desa Korek	Sungai Ambawang
21	510061120025	Nurul Hikmah	Dusun II Teluk Harapan, Desa Sepuk Laut	Sungai Kakap
22	510061120026	Nurussyamsi Wal Qomar	RT 04 RW 04 Dusun Kencana Utama, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
23	510061120027	Miftahul Ulum	Jl. Trans Kalimantan Parit Masigi, Desa Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
24	510061120028	Nahdatut Tullab	Parit Bunga Baru Darat RT 01 RW 02 Desa Madu Sari	Sungai Raya
25	510061120029	Al Khairiyah	Parit Sampang Baru RT 11 RW 15 Desa Lingga	Sungai Ambawang
26	510061120030	Darun Nasyiin	Sungai Pelaik, Simpang Kanan RT 02 RW 01	Sungai Ambawang
27	510061120033	Miftahul Ulum	Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Parit Sumber Bahagia, Sungai Asam	Sungai Raya
28	510061120034	Sunan Ampel	Parit Harum, Desa Sui Asam	Sungai Raya
29	510061120036	Al Muttaqin	Dusun Belidak Hulu RT 003 RW 004, Desa Pasak Piang	Sungai Ambawang
30	510061120037	Darud Da'wah	Jl. Pelita III Desa Punggur Kecil	Sungai Kakap
31	510061120038	Hidayatul Mubtadien	Jl. Trans Kalimantan, Parit Masigi Desa Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
32	510061120039	Al Ikhlas	Parit Cahaya Baru, Desa Kuala Mandor B	Kuala Mandor B
33	510061120040	Miftahul Khairat	Jl. Karya Desa Sungai Ambangah	Sungai Raya
34	510061120041	Nahdatul Ulum	Jl. Kalimas Hulu, Desa Pal IX	Sungai Kakap
35	510061120042	Darul Musabbihin	Parit Bakti Suci II, Desa Mekar Sari	Sungai Raya
36	510061120043	Nurul Amin	Parit Semangat Baru, Desa Kubu Padi	Kuala Mandor B

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
37	510061120044	As Shidiqiyah	Jl Raya Sungai Itik RT 025 RW 004 , Dusun Melati, Desa Sungai Itik	Sungai Kakap
38	510061120045	Ainul Ulum	Jl. Trans Kalimantan KM 14 Parit Seribut Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang
39	510061120046	Hidayatul Muslimin I	Parit Sembin, Jl. Arteri Supadio,Desa Sungai Raya	Sungai Raya
40	510061120047	Mubayyinul Ulum	SP I, Dusun Madani RT 02 RW 11 Desa Mekarsari	Sungai Raya
41	510061120048	Bustanul Mubtadiien	Gang Selat Madura Dusun Keramat II Desa Kuala Dua	Sungai Raya
42	510061120049	Al Habib Sholeh Bin Alwi Al Haddad	Jl. Trans Kalimantan Parit Masigi, Desa Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
43	510061120050	Hidayatul Muttaqin	Jl.Zakia Baru, TR I, RT 01 RW 08, Desa Tebang Kacang	Sungai Raya
44	510061120051	Hidayatul Mubtadiin	Kampung Baru, Desa Simpang Kanan	Sungai Ambawang
45	510061120052	Raudlatul Jannah	Dusun Meranti, Desa Puguk	Sungai Ambawang
46	510061120053	Hidayatul Mubtadiien	Jl. Kuala Dua Parit Haji Ali, Desa Kuala Dua	Sungai Raya
47	510061120054	Mambaul Ulum	Parit Percis, Desa Sungai Asam	Sungai Raya
48	510061120055	An Nur	Jl. Raya Sungai Berembang RT 04 RW 02 Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap
49	510061120056	Raudlatul Firdaus	Jl. Trans Kalimantan KM 17 Siak Alina, Desa Durian	Sungai Ambawang
50	510061120057	Darul Ulum	Jl. Soeharto Desa Kuala Dua	Sungai Raya
51	510061120058	Darut Tauhid	Desa Tebang Kacang	Sungai Raya
52	510061120059	Hidayatul Muslimin II	Jl Raya Desa Kapur, Parit Pak Reweng, Desa Kapur	Sungai Raya
53	510061120060	Khulafaur Rasyidin	Jl. A Yani II Sungai Raya	Sungai Raya
54	510061120061	An Nuriyah	Dusun Tanjung Pasir, Desa Kuala Mandor A	Kuala Mandor B

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
55	510061120062	Nurul Ulum	Jl. Munggu Mas, Desa Sungai Enau	Kuala Mandor B
56	510061120063	Al Muhajirin	Jl. Sultan Agung Gang Kauman, Desa Rasau Jaya	Rasau Jaya
57	510061120064	Sunan Ampel	Jl. Jenderal Soedirman No. 48 Dusun Suka Damai RT 005 RW 002, Desa Rasau Jaya	Rasau Jaya
58	510061120065	Anta Al Amin	Parit Tengah, Desa Mekarsari	Sungai Raya
59	510061120067	Madrasatul Quran	Jl. Pramuka Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap
60	510061120068	Tahfidzul Qur'an	Parit Bugis Desa Kapur	Sungai Raya
61	510061120069	Al Faqihil Muqoddam	Jl. Parit Gondang Legi, Desa Durian	Sungai Ambawang
62	510061120070	Darul Fikri	Jl. Sungai Belidak Gang H. Jelai Dusun Karya Tani RT 04 RW 01, Desa Sungai Belidak	Sungai Kakap
63	510061120071	Nurul Tauhid	Parit Akop Tenaga Baru, Sungai Asam	Sungai Raya
64	510061120072	Darul Falah	Jalan Bujama, Parit Keraka, Desa Pal IX	Sungai Kakap
65	510061120073	Muinul Islam	Jalan Primer Jeruju Darat, RT 02 RW 01, Dusun Karaya Utama, Desa Jeruju Besar	Sungai Kakap
66	510061120074	Ad - Da'wah Madinatul Qur'an	Jl. Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda, Kecamatan Sungai Kakap	Sungai Kakap
67	510061120075	Maulana Sulthan Muhammad	Jl. Mega Timur Parit Selatan	Sungai Ambawang
68	510361120083	Baitul Mubaroq	Parit Serong RT 037 RW 010, Desa Pal IX, Kec. Sungai Kakap	Sungai Kakap
69	512361120070	Darul Hijrah	Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B	Kuala Mandor B
70	510361120070	Al Mansyur	Jl. Abdurrahman Wahid No. 29, RT 04 RW 04, Desa Kuala Dua	Sungai Raya

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
71	510361120071	Al Baariq	Jl. Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang
72	510361120175	Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat	Jl. Bani Suyuti, Dsn. Kencana Ungu, Desa Sui Malaya	Sungai Ambawang
73	510361120174	Raudlatul Hikam Ismailiyah	Jl. Selat Bantan Dusun Sejahtera, Desa Sui Kupah	Sungai Kakap
74	Dalam Proses Pusat	Serumpun Cahaya	Jl. Parit Jawi, Desa Punggur Besar	Sungai Kakap
75	Dalam Proses Pusat	Nurul Yaqin	Jl. Sui Adung RT 02 RW 06	Sungai Raya
76	Dalam Proses Pusat	Nurul Jadid	Jl. Raya Kumpai, Gang Karang Anyar	Sungai Raya

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menekan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya penanganan kasus-kasus kematian bayi dan gizi buruk, pada dasarnya

bersifat multisektor yang memerlukan intervensi dari OPD lain. Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan trend yang fluktuatif. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi, faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran BUMIL (Ibu Hamil) dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdektesi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif BUMIL (Ibu Hamil) memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas.

Kondisi gizi buruk memiliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti “Gerakan Masyarakat” sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka penderita gizi buruk yang cenderung meningkat setiap tahun walaupun tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 16 orang, namun jumlahnya Kembali meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 33 orang. Dari aspek derajat kesehatan pada Angka Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dan penanganan balita gizi buruk mengalami peningkatan, namun Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan jumlah penderita gizi buruk mengalami fluktuatif. Aspek pelayanan kesehatan keluarga pada pelayanan BUMIL K1, pelayanan BUMIL K4, pemeriksaan BUMIL, Imunisasi (UCI), persalinan Nakes, Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Pelayanan Kontrasepsi mengalami fluktuatif.

Tabel 2.32.
Urusan Konkuren Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
DERAJAT KESEHATAN							
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,77	69,80	70,04	70,43	70,59
2.	Angka Kematian Balita	Kasus	7	1	1	0	3
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	15	11	14	16	12
4.	Angka Kematian Bayi	Kasus	60	33	38	31	32
5.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Kasus	31	22	16	33	35
6.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	96,77	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Jumlah Penderita Gizi Kurang	Kasus	306	382	547	743	913
8.	Jumlah Penderita <i>Stunting</i>	%	29,30	34,80	25,60	23,63	13,40
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA							
1.	Pelayanan BUMIL K1	%	95,40	92,50	95,76	97,05	92,64
2.	Pelayanan BUMIL K4	%	86,20	91,20	88,38	89,11	87,12
3.	Pemeriksaan BUMIL	%	90,02	84,80	80,90	N/A	N/A
4.	Imunisasi (UCI)	%	72,00	97,00	90,00	N/A	N/A
5.	Imunisasi Dasar Lengkap	%	73,60	79,00	70,40	N/A	N/A
6.	Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	%	85,50	84,80	88,06	88,74	86,86
7.	Rasio Pelayanan Komplikasi Kebidanan	%	37,20	42,52	62,22	57,07	46,69
8.	Pelayanan Kontrasepsi	%	53,70	47,07	72,94	69,03	68,13
KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN							
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis	Orang	562	589	589	447	536
	a. Tenaga Medis (Dokter)	Orang	14	41	41	30	41
	b. Tenaga Kebidanan/Keperawatan	Orang	465	465	465	370	412
	c. Tenaga Psikologi Klinis	Orang	0	0	0	0	0
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	3	3	12
	e. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	26	26	26	26	20
	f. Tenaga Gizi	Orang	31	31	31	25	27
	g. Tenaga Kesehatan Tradisional	Orang	0	0	0	0	0
	h. Apoteker	Orang	5	5	5	5	0
	i. Teknik Kefarmasian	Orang	18	18	18	22	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.33.
Jumlah Penderita Wabah Penyakit Menular

No.	Wabah Penyakit Menular	Jumlah Penderita				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muntaber	8.392	11.399	8.712	6.711	6.162
2.	Demam Berdarah	603	65	189	383	101
3.	Infeksi Saluran Pernafasan	0	0	0	0	8.715
4.	Campak	85	25	52	7	0
5.	Malaria	18	0	0	0	0
6.	Kasus HIV/AIDS	25	13	27	31	60
7.	Covid-19	0	0	0	0	405

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan interkoneksi antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 154/DPUPR/2017 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya, untuk Jalan Kabupaten sebanyak 62 ruas dengan panjang total 646,17 Km. Dimana 18 ruas diusulkan alih status menjadi Jalan Propinsi. Secara detail ruas jalan di Kabupaten Kubu Raya dengan status Jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.34
Daftar Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
1	001	Supadio – Sekunder C	JN. KM 8,1 / Persimpangan	JK. KM 7,7 / Persimpangan	12,25	Sungai Raya – Rasau Jaya	JK	
2	002	Sungai Raya Dalam – Punggur	JN. KM 0,0 / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan Parit To’om	10,30	Sungai Raya – Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
3	003	Kapur – Kumpai	Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	Pasar Kumpai	13,41	Sungai Raya	JK	Diusulkan Menjadi JP
4	004	Kumpai – Tebang Kacang	Tugu AMD / Persimpangan	Batas Desa Tebang Kacang – Desa Sungai Asam	17,44	Sungai Raya	JK	Diusulkan Menjadi JP
5	005	Kuala Dua – Mekar Sari	JP. KM 14,6 / Jembatan	Batas Desa Mekar Sari – Sungai Asam	15,96	Sungai Raya	JK	Diusulkan Menjadi JP
6	006	Sungai Asam – Sukalanting	Batas Desa Mekar Sari – Sungai Asam	Dermaga Penyeberangan	12,75	Sungai Raya	JK	Diusulkan Menjadi JP
7	007	Kuala Dua – Parit Ngabeh	JP. KM 4,5 / Persimpangan	Persimpangan Parit Ngabeh	7,46	Sungai Raya	JK	
8	008	Jl. Wonodadi I	JN. KM 6,8 / Persimpangan	JP. KM 11,5 / Persimpangan	1,45	Sungai Raya	JK	
9	009	Jl. Wonodadi II	JN. KM 6,8 / Persimpangan	Persimpangan Parit Ngabeh	2,27	Sungai Raya	JK	
10	010	Jl. Parit Bugis	JN. KM 5,5 / Persimpangan	JP. KM 10,7 / Persimpangan	2,10	Sungai Raya	JK	
11	011	Jl. Madu Sari	JN. KM 5,5 / Persimpangan	JK. KM 3,7 / Persimpangan	5,25	Sungai Raya	JK	
12	012	Jl. Parit H. Mukhsin	JN. KM 6,9 / Persimpangan	JK. KM 4,6 / Persimpangan	5,58	Sungai Raya	JK	
13	013	Jalan Hutan Kota – Sekunder C	JK. KM 4,0 / Persimpangan	JK. KM 5,5 / Persimpangan	6,87	Sungai Raya – Rasau Jaya	JK	
14	014	Jl. Sungai Durian Laut	JP. KM 0,0 / Persimpangan	Dermaga	0,70	Sungai Raya	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
15	015	Nipah Kuning – Jeruju Besar	Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar	11,12	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
16	016	Sungai Kakap – Jeruju Besar	JP. KM 18 / Jembatan	Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar	5,82	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
17	017	Sungai Kakap – Punggur	JP. KM 14,7 / Jembatan	Jembatan / Persimpangan Parit To'om	13,80	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
18	018	Punggur – Parit Sarem	Persimpangan / Jembatan	Dermaga Penyeberangan	15,03	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
19	019	Kota Baru – Punggur	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	JK. KM 8,1 / Persimpangan	10,55	Sungai Kakap	JK	
20	020	Jl. Cendana	JK. KM 3,2 / Persimpangan	Parit Keladi / Persimpangan	4,13	Sungai Kakap	JK	
21	021	Jl. Parit Penjara	JP. KM 9,6 / Persimpangan	Parit Keladi / Persimpangan	2,50	Sungai Kakap	JK	
22	022	Jalan Parit Keladi	JP. KM 12,8 / Persimpangan	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	8,94	Sungai Kakap	JK	
23	023	Sungai Kakap – Tanjung Intan	Persimpangan Pasar Sungai Kakap	Dusun Tanjung Intan	8,81	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
24	024	Jl. Lingkar Pasar Sungai Kakap	Persimpangan Pasar Sungai Kakap	Kantor Polsek Sungai Kakap	0,95	Sungai Kakap	JK	
25	025	Jeruju Besar – Sungai Kupah	JK. KM 10,9 / Jembatan	Dusun Tanjung Intan	10,74	Sungai Kakap	JK	Diusulkan Menjadi JP
26	026	Mega Timur – Sungai Tempayan	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B	10,57	Sungai Ambawang	JK	Diusulkan Menjadi JP
27	027	Jl. Ampera	JN. KM 2,2 / Persimpangan	JN. KM 5,0 / Persimpangan	3,74	Sungai Ambawang	JK	
28	028	Durian – Pasak Piang	JN. KM 5,0 / Persimpangan	Simpang 3 / Persimpangan	28,38	Sungai Ambawang	JK	Diusulkan Menjadi JP

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
29	029	Korek – Pasak Piang	JN. KM 18,2 / Persimpangan	Persimpangan	14,71	Sungai Ambawang	JK	Diusulkan Menjadi JP
30	030	Kuala Mandor B – Sungai Enau	Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B	Persimpangan Menuju Desa Retok	15,65	Kuala Mandor B	JK	Diusulkan Menjadi JP
31	031	Sungai Enau – Kubu Padi	Persimpangan Menuju Desa Retok	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Landak	21,10	Kuala Mandor B	JK	Diusulkan Menjadi JP
32	032	Sungai Enau – Retok	Persimpangan Menuju Desa Retok	Sungai / Batas Kabupaten Kubu Raya – Landak	3,75	Kuala Mandor B	JK	Diusulkan Menjadi JP
33	033	Sekunder C – Punggur	JP. KM 10,1 / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan Parit To'om	14,45	Rasau Jaya – Sungai Kakap	JK	
34	034	Sekunder C – Bintang Mas I	JK. KM 5,5 / Persimpangan	Jembatan Bintang Mas 1	9,57	Rasau Jaya	JK	
35	035	Rasau Jaya – Parit Sarem	JP. KM 16,1 / Persimpangan	Persimpangan Dermaga Parit Sarem	17,33	Rasau Jaya	JK	Diusulkan Menjadi JP
36	036	Rasau Jaya – Sungai Bulan	JP. KM 13,8 / Persimpangan	Dermaga Sungai Bulan B	18,42	Rasau Jaya – Sungai Raya	JK	
37	037	Lingkar Pasar Baru Rasau Jaya	JP. KM 15,7 / Persimpangan	JP. KM 15,8 / Persimpangan	0,52	Rasau Jaya	JK	
38	038	Jalan Bhakti	JP. KM 14,4 / Persimpangan	JK. KM 4,4 / Persimpangan	5,37	Rasau Jaya	JK	
39	039	Sungai Nipah – Selat Remis	Dermaga Penyeberangan	Jembatan / Pasar Sungai Gorah	13,10	Teluk Pakedai	JK	
40	040	Sungai Nipah – Sungai Deras	JK. KM 1,3 / Jembatan / Persimpangan	Batas Kecamatan Teluk Pakedai – Kubu / Jembatan	14,65	Teluk Pakedai	JK	
41	041	Selat Remis – Teluk Gelam	Jembatan / Pasar Sungai Gorah	Dermaga Penyeberangan	9,33	Teluk Pakedai	JK	
42	042	Dermaga Pinang Luar – Simpang Pinang Luar	Dermaga Penyeberangan	Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar	2,10	Kubu	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
43	043	Pinang Luar – Pinang Dalam	Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar	Batas Desa Pinang Dalam – Kampung Baru	19,42	Kubu	JK	
44	044	Kampung Baru – Air Putih	Batas Desa Pinang Dalam – Kampung Baru	Dermaga Penyeberangan	8,83	Kubu	JK	
45	045	Jangkang I – Jangkang II	Dermaga Penyeberangan	Persimpangan Menuju Dermaga	11,54	Kubu	JK	
46	046	Jangkang II – Dermaga	Persimpangan Menuju Dermaga	Dermaga Penyeberangan	1,60	Kubu	JK	
47	047	Jangkang II – Teluk Nangka	Dermaga Penyeberangan	Jembatan TR 9 / Persimpangan	4,62	Kubu	JK	
48	048	Teluk Nangka – Kubu	Jembatan TR 9 / Persimpangan	Jembatan Masjid Kubu	1,46	Kubu	JK	
49	049	Lingkar Kota Kubu	Dermaga Pasar Kubu	Dermaga Pasar Kubu	3,05	Kubu	JK	
50	050	Kubu – Sungai Terus	Jembatan / Persimpangan	Jembatan Saluran Sekunder	3,82	Kubu	JK	
51	051	Air Putih – Ambawang	Jembatan / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan	7,95	Kubu	JK	
52	052	Teluk Empening – Permata	Dermaga Penyeberangan	Jembatan	9,19	Terentang	JK	
53	053	Permata – Terentang Hilir	Dermaga Terentang	Persimpangan Menuju SMA	1,66	Terentang	JK	
54	054	Terentang Hilir – Radak I	Persimpangan Menuju SMA	Jembatan TR 16 (Desa Radak I)	2,72	Terentang	JK	
55	055	Teluk Empening – Teluk Bayur	Persimpangan	Dermaga Penyeberangan	2,41	Terentang	JK	
56	056	Terentang Hilir – Terentang Hulu	Persimpangan Menuju SMA	Sungai	9,60	Terentang	JK	
57	057	Radak II – Terentang Hulu	Jembatan TR 16 (Desa Radak II)	Jembatan / Kantor Desa Terentang Hulu	14,34	Terentang	JK	
58	058	Medan Seri – Padang Tikar	Dermaga Padang Tikar	Persimpangan Masjid	2,58	Batu Ampar	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
59	059	Padang Tikar – Tanjung Harapan	Persimpangan Mesjid	Sungai / Selat Sekh	24,39	Batu Ampar	JK	
60	060	Batu Ampar – Padang Tikar	Dermaga Batu Ampar	Persimpangan Masjid	43,84	Batu Ampar	JK	
61	061	Batu Ampar – Karang Anyar	Persimpangan	Dermaga Penyeberangan	34,98	Batu Ampar	JK	
62	062	Sungai Kerawang – Muara Tiga	Dermaga Kerawang	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara	29,30	Batu Ampar	JK	
					646,17			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Kondisi jalan pada tahun 2020 sebagian besar mengalami kerusakan. Dari 646.173 Km panjang jalan keseluruhan, yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik sebesar 43 persen (274,85 Km), kondisi sedang 18 persen, kondisi rusak 22 persen, dan jalan yang mengalami rusak berat mencapai 17 persen dari total panjang jalan yang ada.

Tabel 2.35.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No.	Kondisi	2017	2018	2019	2020
1	Baik	211,708	245,217	252,598	274,853
2	Sedang	212,105	183,871	183,864	116,724
3	Rusak Ringan	113,188	56,203	53,669	138,877
4	Rusak Berat	109,170	160,882	156,042	115,719
	Jumlah	529,357	646,173	646,173	646,173

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.36.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No.	Jenis Permukaan	2017	2018	2019	2020
1	Aspal / <i>Asphalted</i>	146,006	214,770	220,311	252,850
2	Kerikil / <i>Gravel</i>	15,600	34,807	257,534	10,865
3	Tanah / <i>Soil</i>	157,146	143,329	30,262	151,381
4	Lainnya / <i>Others</i>	327,421	253,267	138,006	231,077
	Jumlah / Totals	529,357	646,173	646,173	646,173

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di lingkungan perumahan. Perkembangan pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut :

Tabel 2.37.
Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

NO	Year	Panjang Jalan	Number of Location	
		Distance of Street	Desa (Village)	Kecamatan (District)
1	2 0 2 0	183,45	91	9
2	2 0 1 9	191,70	96	9

NO	Year	Panjang Jalan	Number of Location	
		Distance of Street	Desa (Village)	Kecamatan (District)
3	2 0 1 8	63,00	95	9
4	2 0 1 7	200,90	62	9
5	2 0 1 6	58,18	53	9

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.38.
Jumlah Jembatan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

No.	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	0	N/A	1.822	1.937	2.048
2	Sedang	12	N/A	9	7	4
3	Rusak Ringan	6	N/A	620	521	415
4	Rusak Berat	6	N/A	75	61	49
	Jumlah	24	-	2.526	2.526	2.526

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak, minum, maupun mencuci atau mandi. Bagi daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di pedalaman, penggunaan air bersih masih secara tradisional bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Atau di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Total air bersih/air minum yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai 2.936.197 m³ dengan 18.206 pelanggan. Sebagian besar konsumen PDAM di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 adalah rumah permanen dengan jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 2.398.950 m³. Sedangkan pemakaian terkecil air bersih adalah Hidran Umum sebesar 482 m³. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39.
Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih Yang Disalurkan Dirinci
Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan	Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)
1	Hidran Umum/Sosial Umum	6	482
2	Rumah Ibadah/Sosial Khusus	140	43.141
3	WC Umum	0	0

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan	Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)
4	Panti Asuhan	0	0
5	Yayasan Sosial	15	2.364
6	Sekolah Negeri	16	4.901
7	Rumkit Pemerintah	0	0
8	Rumah Kumuh	0	0
9	Rumah Semi Permanen	69	16.214
10	Rumah Permanen	15.357	2.398.950
11	Pertokoan Dalam Gang	659	94.104
12	Rumah Ruko	10	669
13	Ruko Perdagangan	1.670	274.409
14	Industri Rumah Tangga	6	1.061
15	Instansi Pemerintah	51	20.547
16	Rumah Mewah	149	17.662
17	Industri Besar	15	20.550
18	Niaga Besar	40	38.295
19	Niaga Menengah	3	2.848
	2 0 2 0	18.206	2.936.197
	2 0 1 9	17.446	2.674.402
	2 0 1 8	16.734	2.483.439
	2 0 1 7	15.544	2.094.332
	2 0 1 6	14.871	1.714.142

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana detail terkait pengaturan ruang dan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini masih dalam tahapan penyusunan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan, maka dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Agar pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan efektif dan efisien diperlukan

penetapan kawasan perdesaan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2018 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Perdesaan yang sudah berstatus prioritas nasional sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Adapun data selengkapnya adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.40.
Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya Sampai Tahun 2020

No.	Kawasan Perdesaan	Penetapan Peraturan Bupati	RPKP	Status KPPN
1	Agropolitan Rasau Raya	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Sudah
2	Agropolitan Kuala Mandor Terigas	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Belum
3	Pertanian Terpadu Sungai Kakap	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
4	Rice Estate Teluk Pakedai	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Belum
5	Pesisir Pantai Teluk Pakedai	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
6	Pesisir Batu Ampar	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
7	Pesisir Pantai Padang Tikar	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
8	Pembangunan Kubu Bertuah	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
9	Agropolitan Ambassador	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, di mana masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Di Kabupaten Kubu Raya, untuk kawasan kumuh, mengacu pada Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 114/DPUPRPRKP/2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2021, terdata seluas 258,92 Ha yang tersebar di 9 kecamatan. Secara detail Kawasan Kumuh di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.41.
Kawasan Kumuh Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

No	Lokasi	Luas Kawasan (Ha)	Data Kependudukan		Tingkat Kekumuhan		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			Jumlah Penduduk	Kepadatan	Nilai	Tingkat		
1	Dusun Cempaka	24,65	± 1.048 KK	± 81 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	Legal	C3/6
2	Dusun Merdeka	17,91	± 217 KK	± 31 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	Legal	C3/6
3	Dusun Sungai Ambawang Kuala	6,78	± 255 KK	± 191 Jiwa/Ha	26	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
4	Kuala Mandor B	5,38	± 54 KK	± 37 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
5	Rasau Jaya Umum	13,69	± 124 KK	± 38 Jiwa/Ha	28	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
6	Selat Remis	14,42	± 219 KK	± 57 Jiwa/Ha	34	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
7	Padang Tikar Satu	46,13	± 487 KK	± 42 Jiwa/Ha	25	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
8	Padang Tikar Dua	17,29	± 391 KK	± 88 Jiwa/Ha	36	Kumuh Ringan	Legal	C3/6
9	Batu Ampar	51,99	± 367 KK	± 31 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
10	Kubu	20,87	± 239 KK	± 46 Jiwa/Ha	32	Kumuh Ringan	Legal	C3/6
11	Permata	7,55	± 115 KK	± 68 Jiwa/Ha	26	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
12	Sungai Kakap	32,26	± 231 KK	± 29 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	Legal	C5/9
	Total	37,73						

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Adapun Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kubu Raya secara umum adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.42.
Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kubu Raya

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Pembangunan Rumah Tinggal (Unit)	11.846	17.766	19.058	11.244	7.342
Pembangunan Rumah Layak Huni (Unit)	417	363	557	1.330	3.120

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pembinaan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Tabel 2.43.
Banyaknya Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
1	Batu Ampar	0	1
2	Terentang	0	0
3	Kubu	1	0
4	Teluk Pakedai	1	0
5	Sungai Kakap	7	1
6	Rasau Jaya	5	0
7	Sungai Raya	107	7
8	Sungai Ambawang	17	1
9	Kuala Mandor B	1	0
	2 0 2 0	139	10
	2 0 1 9	137	8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2021

Perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2020 terdata sebanyak 139 organisasi masyarakat dan 10 lembaga swadaya masyarakat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dengan jumlah 137 organisasi masyarakat dan 8 lembaga swadaya masyarakat. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, rehabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertiban umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan perkebunan skala besar membawa resiko terjadinya penguasaan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi maupun konflik lainnya terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan ketertiban umum dan penegakkan Perda, peran Satpol PP sebagai garda Kabupaten cukup efektif melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejenisnya), maupun dalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.44.
Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
1	Bangunan Liar	227	Kabupaten Kubu Raya
2	Pedagang Kaki Lima	227	Kabupaten Kubu Raya
3	Gelandangan dan Pengemis	18	Kabupaten Kubu Raya
4	Reklame/Spanduk/Baliho/Pamflet Liar	0	Kabupaten Kubu Raya
5	Kost/Hotel/Penginapan/Losmen	35	Kabupaten Kubu Raya
6	Layang-layang	51	Kabupaten Kubu Raya
7	Anak Sekolah	24	Kabupaten Kubu Raya
8	Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet	32	Kabupaten Kubu Raya
9	Unjuk Rasa	2	Kabupaten Kubu Raya
	2020	616	Kabupaten Kubu Raya

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, 2020

Aspek kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan secara terkoordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Provinsi Kalimantan Barat, BASARNAS Kalimantan Barat, Manggala Agni, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Pihak Swasta/Korporasi dan masyarakat.

Tabel 2.45.
Banyaknya Bencana Daerah yang Terjadi di Kabupaten Kubu Raya
Dirinci Menurut Kecamatan 2018-2020

No.	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Batu Ampar	0	0	0
2	Terentang	0	3	1
3	Kubu	0	0	1
4	Teluk Pakedai	3	1	0
5	Sungai Kakap	7	3	1
6	Rasau Jaya	1	0	0
7	Sungai Raya	9	18	8
8	Sungai Ambawang	6	3	12
9	Kuala Mandor B	2	5	7
	Jumlah	28	33	31

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurus penderita cacat, sehingga Dinas Sosial belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhabilitasi.

Tabel 2.46.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial

Indikator Kinerja	No	Tahun	Jumlah Penduduk	Segmen					Total	%
			Data Agregat Semester I	PBI APBN (Jamkesmas)	PPU (Pekerja Penerima Upah)	PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)	BP (Bukan Pekerja)	PBI APBD (Jamkesda)		
Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta JKN	1	2014	596.430	184.498	30.310	11.092	4.256	0	230.156	38,59
	2	2015	597.098	184.498	45.814	24.284	3.247	4.371	262.214	43,91
	3	2016	597.764	193.135	56.025	30.570	3.306	4.353	287.389	48,08
	4	2017	601.356	196.157	74.191	41.564	3.410	5.434	320.756	53,34
	5	2018	603.407	205.966	92.656	52.235	3.957	11.756	366.570	60,75
	6	2019	605.787	242.926	103.316	41.478	4.118	54.555	446.393	73,69
	7	2020	610.103	234.794	109.630	44.124	3.422	46.065	438.035	71,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 didominasi oleh fakir miskin. Adapun rincian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.47.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Ditangani Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	(ABT) Anak Balita Terlantar Penderita Gizi Buruk dan Kurang	-	-	-	1	-	-	-	-
2	(AT) Anak Terlantar	-	-	-	1	-	-	-	-
3	(ABHUK) Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	-	-	-	59	46	46	46	46
4	(AJ) Anak Jalanan	-	1	-	-	-	-	-	-
5	(ADK) Anak Jalanan Kedisabilitasan	-	-	-	104	90	90	135	135
6	(AKTK) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
7	(AMPK) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	1	-	-	-	-
8	(LUT) Lanjut Usia Terlantar	-	201	-	1.654	-	-	-	-
9	(PD) (Penyandang Disabilitas	-	11	-	192	360	360	429	429
10	(TS) Tuna Susila	-	-	-	26	-	-	-	-
11	(GL) Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(PM) Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-
13	(PL) Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	(KM) Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(BWBLP) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(ODHA) Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(NAPZA) Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Zat Adiktif	-	2	-	-	-	-	-	-
18	(KTR) Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	(KTK) Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	(PMBS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
21	(KBA) Korban Bencana Alam	239	1.053	2.980	12.539	-	-	-	-
22	(KBS) Korban Bencana Sosial	61	364	14	32	-	-	-	-
23	(PRSE) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	(FM) Fakir Miskin	8.097	-	15.300	82.668	22.229	22.229	34.302	34.302
25	(KBSP) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
26	(KAT) Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		8.397	1.632	18.294	97.277	22.725	22.725	34.912	34.912

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2020 sebesar 67,71 persen. Hal tersebut berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 33 orang yang tidak terlibat secara aktif dalam Angkatan Kerja (menunggu pekerjaan). Sementara tingkat pengangguran di tahun 2020 sebesar 7,14 persen.

Tabel 2.48.
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

No	Indikator Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	*	63,90	62,22	64,48	67,71
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	5,91	5,04	5,62	7,14

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021
* Tahun 2016 data tidak tersedia

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	80.827	109.757	290.584
	Bekerja	68.018	101.808	269.826
	Pengangguran Terbuka	12.809	7.949	20.758
2.	Bukan Angkatan Kerja	35.558	103.006	138.564
Jumlah Total		216.385	212.763	429.148

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Dari sisi jumlah usia produktif, angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 lebih besar dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020 Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya sebanyak 290.584 sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 138.564. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 mencapai 20.758 orang.

Tabel 2.50.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Berusaha Sendiri	32.232	20.384	52.616
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	26.689	17.007	43.696
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	6.468	1.645	8.113
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	82.901	30.186	113.087
5	Pekerja Bebas di Bidang Pertanian	5.894	2.217	8.111
6	Pekerja Bebas di Bidang Non Pertanian	5.925	1.686	7.611
7	Pekerjaan Keluarga/Tidak Dibayar	7.909	28.683	36.592
Jumlah		168.018	101.808	269.826

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 sebanyak 15.041 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan jumlah 6.051 pencari kerja.

Tabel 2.51.
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
1	≤ SD	117.369	4.006	121.375
2	SMP	33.613	1.841	35.454
3	SMA	47.112	4.743	51.855

No.	Jenjang Pendidikan	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
4	SMK	14.266	1.308	15.574
5	D1/D2/D3	6.488	1.072	7.560
6	D4/S1/S2/S3	20.425	2.071	22.496
	Kubu Raya	239.273	15.041	254.314

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.
Aspek Pelayanan Umum
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,23	84,05	84,57	84,60	84,30
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,90	63,33	63,57	72,43	73,24
3	Status Kabupaten Layak Anak	-	-	-	Pratama	Pratama
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	53,4	53,4

Sumber : Dinas P3KB Kabupaten Kubu Raya, 2021

Kabupaten Kubu Raya mendapatkan penilaian Pratama untuk status kabupaten layak anak pada tahun 2019 dan tahun 2020

2.3.2.3. Pangan

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih mengandalkan konsumsi pangan pada komoditas beras dengan alternatif makanan pokok pengganti

beras pada komoditas ubi kayu, jagung dan ubi jalar. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.51. di bawah ini.

Tabel 2.53.
Komoditas Pangan Serta Ketersediaan Energi dan Protein
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Komoditas Pangan Nabati						
1.1.	Beras	Ton	97.643	176.225	0	0	0
1.2.	Jagung	Ton	3.306	6.411	4.075	9.727	3.338
1.3.	Kedelai	Ton	7	11	38	6	0,7
1.4.	Kacang Tanah	Ton	62	62	0	0	0
1.5.	Ubi Kayu	Ton	4.223	4.068	0	0	0
1.6.	Ubi Jalar	Ton	2.083	2.083	0	0	0
1.7.	Sayur	Ton	0	0	0	0	0
1.8.	Buah-Buahan	Ton	0	1.794	0	65.302	57.220
1.9.	Minyak Goreng	Ton	0	0	0	0	0
1.10.	Gula	Ton	0	0	0	0	0
2.	Produksi Komoditas Pangan Hewani						
2.1.	Daging Sapi dan Kerbau	Ton	227	643	1.417	1.027	753
2.2.	Daging Ayam	Ton	12.593	13.701	16.293	13.266	9.846
2.3.	Telur	Ton	4.436	4.436	0	0	0
2.4.	Susu	Ton	0	0	0	0	0
2.5.	Ikan	Ton	0	20.688	0	0	0
3.	Ketersediaan Energi dan Protein						
3.1.	Energi	Kalori / Kapita / Hari	2.027	2.027	0	0	0
3.2.	Protein	Kalori	60	60	0	0	0

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.4. Pertanian

Berdasarkan data dari Bagian Kerjasama dan Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dari tahun 2019-2020, melalui kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam program Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) telah menerbitkan 128 sertifikat hak atas tanah dan 51 Sertifikat Hak Pakai (SHP).

Tabel 2.54.
Sertifikat yang Dikeluarkan Melalui Kerjasama Badan Pertanahan Nasional dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2020

No.	Sertifikat	2019	2020
1	Sertifikat Hak Pakai (SHP)	35	16
2	Sertifikat Hak Atas Tanah	128	*

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021
 Keterangan : * Tahun 2020 tidak ada sertifikat yang terbit karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan pengukuran

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Keterbatasan penanganan permasalahan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel pada titik tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan terhadap aktivitas perusahaan besar, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.55.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Dokumen	
		AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan)
1	Batu Ampar	-	3
2	Terentang	-	1
3	Kubu	-	1
4	Teluk Pakedai	-	-

No.	Kecamatan	Jenis Dokumen	
		AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan)
5	Sungai Kakap	-	2
6	Rasau Jaya	-	1
7	Sungai Raya	1	1
8	Sungai Ambawang	-	8
9	Kuala Mandor B	-	2
	2 0 2 0	1	19
	2 0 1 9	3	19
	2 0 1 8	1	29
	2 0 1 7	1	10

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.56.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan				
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri	Pembangunan Perumahan	Pertambangan	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	1	-	2	-
2	Terentang	-	-	-	-	1
3	Kubu	-	-	-	1	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	1	-	-	1
6	Rasau Jaya	1	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	2	1	2	10
8	Sungai Ambawang	-	2	-	-	6
9	Kuala Mandor B	1	-	-	-	1
	2 0 2 0	2	6	1	5	19
	2 0 1 9	-	-	1	5	13
	2 0 1 8	-	2	2	5	20
	2 0 1 7	3	1	1	5	1
	2 0 1 6	1	4	7	3	6

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.57.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen
AMDAL Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan			
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri Pengolahan Kayu	Pembangunan Gedung	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	2 0 2 0	-	-	-	-
	2 0 1 9	-	-	1	2
	2 0 1 8	-	-	-	1
	2 0 1 7	-	1	-	-
	2 0 1 6	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.58. Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil						
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Memiliki E-KTP	318.257	346.379	362.476	389.859	418.335
2.	Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	400.288	420.822	449.896	468.523	484.542
3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	157.357	158.514	153.492	157.580	169.479
4.	Kepemilikan Akta Nikah	34.166	38.126	52.936	71.264	89.024
5.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sampai akhir tahun 2020, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 Kecamatan yang terbagi menjadi 118 desa, 459 dusun, 789 RW dan 3.168 RT. Perangkat desa yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 738 orang.

Tabel 2.59. Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020					
No.	Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT
1	Batu Ampar	15	54	95	227
2	Terentang	10	30	47	116
3	Kubu	20	71	128	306
4	Teluk Pakedai	14	46	53	163
5	Sungai Kakap	13	58	136	618
6	Rasau Jaya	6	27	60	223
7	Sungai Raya	20	81	162	946
8	Sungai Ambawang	15	67	76	391
9	Kuala Mandor B	5	25	32	178
	Kabupaten Kubu Raya	118	459	789	3.168

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.60.
Banyaknya Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Kepala Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Perangkat Desa			Jumlah Kepala Dusun	Jumlah Kepala Adat
		Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kepala Urusan Desa		
1	Batu Ampar	15	15	-	54	-
2	Terentang	10	10	-	30	-
3	Kubu	20	20	-	71	-
4	Teluk Pakedai	14	14	-	46	-
5	Sungai Kakap	13	13	-	58	-
6	Rasau Jaya	6	6	-	27	-
7	Sungai Raya	20	20	-	81	-
8	Sungai Ambawang	15	15	-	67	-
9	Kuala Mandor B	5	5	-	25	-
	Kabupaten Kubu Raya	118	118	-	459	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis perkembangan Indeks Desa Membangun seluruh Indonesia. Berdasarkan data IDM tersebut, dari 117 desa yang dinilai, sebagian besar desa (43,6 persen) di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam katagori berkembang. Meskipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penguatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembang (desa mandiri). Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2020 terdapat total 25 desa mandiri di Kabupaten Kubu Raya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61.
Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kubu Raya 2020

No.	Kecamatan	Status Desa					Jumlah
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Batu Ampar	0	2	8	5	0	15
2	Terentang	1	1	6	2	0	10
3	Kubu	1	13	4	2	0	20

No.	Kecamatan	Status Desa					Jumlah
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
4	Teluk Pakedai	1	2	11	0	0	14
5	Sungai Kakap	6	4	3	0	0	13
6	Rasau Jaya	1	3	2	0	0	6
7	Sungai Raya	10	3	7	0	0	20
8	Sungai Ambawang	5	2	7	0	0	14
9	Kuala Mandor B	0	0	3	2	0	5
Jumlah		25	28	43	6	1	117

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, 2021

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap desa yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, yang pada Tahun 2020 mencapai jumlah 475 unit.

Tabel 2.62.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jumlah Posyandu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pratama	27	41	35	36	35
2	Madya	290	300	353	372	341
3	Purnama	82	51	52	55	89
4	Mandiri	15	15	15	12	10

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan SKPD Dinas Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian

penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan dropping dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relatif terkendala.

Tabel 2.63.
Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut
Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
1	Batu Ampar	316	4.355
2	Terentang	187	2.440
3	Kubu	549	7.543
4	Teluk Pakedai	159	1.951
5	Sungai Kakap	1.369	12.110
6	Rasau Jaya	398	3.529
7	Sungai Raya	2.546	25.603
8	Sungai Ambawang	2.968	8.174
9	Kuala Mandor B	300	2.694
	2 0 2 0	8.792	68.399
	2 0 1 9	14.367	66.155
	2 0 1 8	14.121	65.283
	2 0 1 7	18.498	62.951
	2 0 1 6	17.891	62.733

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Gerakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kesehatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran. Untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 68.399 akseptor meningkat dari tahun 2019 yang sejumlah 66.155 akseptor. Menurut metode kontrasepsi akseptor peserta KB aktif yang paling banyak pada tahun 2020 adalah menggunakan suntikan, sebesar 31.158 peserta, pil sebesar 17.294 peserta.

Tabel 2.64.
Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
1	Batu Ampar	42	988	73	2.632	17	2	600	4.355
2	Terentang	122	582	33	1.182	42	6	473	2.440
3	Kubu	270	2.869	158	2.838	53	3	1.352	7.543
4	Teluk Pakedai	33	396	17	1.334	22	1	148	1.951
5	Sungai Kakap	901	2.838	177	7.159	147	39	849	12.110
6	Rasau Jaya	234	730	68	1.958	148	9	382	3.529
7	Sungai Raya	4.413	5.571	907	8.270	790	194	5.458	25.603
8	Sungai Ambawang	128	2.422	409	4.383	28	2	802	8.174
9	Kuala Mandor B	57	898	46	1.402	14	2	275	2.694
	2 0 2 0	6.201	17.294	1.888	31.158	1.261	258	10.339	68.399
	2 0 1 9	6.030	15.816	1.789	30.578	1.330	244	10.328	66.115
	2 0 1 8	6.296	18.619	1.832	26.944	1.361	306	9.889	62.283
	2 0 1 7	7.432	15.522	1.288	24.686	1.315	1.302	11.406	62.951
	2 0 1 6	8.229	14.872	1.366	22.731	1.246	1.156	13.173	62.733

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.65.
Akseptor KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
1	Batu Ampar	3	45	0	193	1	0	74	316
2	Terentang	21	26	2	92	6	0	40	187
3	Kubu	15	96	0	382	0	0	56	549
4	Teluk Pakedai	1	19	12	113	0	0	14	159
5	Sungai Kakap	27	309	15	919	1	0	98	1.369
6	Rasau Jaya	0	131	31	208	6	0	22	398
7	Sungai Raya	190	735	109	1.220	57	0	235	2.546

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
8	Sungai Ambawang	70	422	3	1.829	20	10	614	2.968
9	Kuala Mandor B	3	136	0	138	0	0	23	300
	2 0 2 0	330	1.919	172	5.094	91	10	1.176	8.792
	2 0 1 9	726	3.816	206	8.102	157	1	1.359	14.367
	2 0 1 8	1.079	3.010	225	7.142	165	27	2.445	14.121
	2 0 1 7	994	4.623	427	9.505	265	129	2.555	18.498
	2 0 1 6	1.262	4.528	433	9.208	251	280	1.929	17.891

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.66.
Banyaknya Sarana Pelayanan KB Nasional Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	KKB	PPKBD	DBS	Apotik	Kelompok KB/KS	Jumlah
1	Batu Ampar	5	20	0	0	0	25
2	Terentang	2	10	0	0	0	12
3	Kubu	3	20	0	0	0	23
4	Teluk Pakedai	1	14	0	0	0	15
5	Sungai Kakap	17	13	0	1	0	31
6	Rasau Jaya	1	6	0	1	0	8
7	Sungai Raya	32	20	0	10	0	62
8	Sungai Ambawang	7	15	0	0	0	22
9	Kuala Mandor B	1	5	0	0	0	6
	2 0 2 0	69	123	0	12	0	204
	2 0 1 9	-	-	-	-	-	-
	2 0 1 8	50	123	27	12	57	269
	2 0 1 7	51	123	38	11	57	280
	2 0 1 6	51	118	38	11	57	275

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten

Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

Tabel 2.67.
Aspek Perhubungan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Moda Angkutan Barang	1.385	1.552	2.283	4.632	4.616
Jumlah Moda Angkutan Umum	345	368	91	87	132
Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe C	135.756	36.142	137.353	119.497	59.824
Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	17.005	16.072	67.673	107.572	17.671
Jumlah Barang Melalui Dermaga	78.497	693.506	1.155.464	499.359	109.473
Jumlah Perusahaan Angkutan Penyeberangan	2	2	2	2	2
Jumlah Perusahaan Angkutan Sungai	121	135	134	148	78
Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.330.880	1.883.549	4.206.876	4.417.220	2.478.944
Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara	9.102	N/A	23.428	25.826	18.853

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Aktivitas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidang komunikasi dan informatika baik swasta maupun negeri, cukup diminati mengingat memiliki prospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

Tabel 2.68. Banyaknya Menara Telekomunikasi Dirinci Menurut Pemiliknya Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 – 2020					
No.	Pemilik Menara Telekomunikasi	2017	2018	2019	2020
1	PT. TELKOMSEL, Tbk	39	40	40	40
2	PT. INDOSAT, Tbk	30	30	30	30
3	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	17	17	17	17
4	PT. PROTELINDO	30	30	30	30
5	PT. XL AXIATA, Tbk	8	6	6	6
6	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	8	7	13	13
7	PT. HCPT	2	2	2	2
8	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	4	4	4	4
	Jumlah	138	136	142	142

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.69. Sarana Komunikasi Yang Dapat Digunakan Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020		
No.	Kecamatan	Sarana Komunikasi Yang Digunakan
1	Batu Ampar	Telepon Genggam (HP)
2	Terentang	Telepon Genggam (HP)
3	Kubu	Telepon Genggam (HP)
4	Teluk Pakedai	Telepon Genggam (HP)
5	Sungai Kakap	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel
6	Rasau Jaya	Telepon Genggam (HP)
7	Sungai Raya	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel
8	Sungai Ambawang	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel
9	Kuala Mandor B	Telepon Genggam (HP)

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha koperasi memiliki kendala utama yang bersifat internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal ini menimbulkan kendala lain yang lebih spesifik, yaitu kelemahan dalam pemodalan. Sebagaimana diketahui modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong sumber daya ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan oleh koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Pada tahun 2017, jumlah anggota yang dimiliki Koperasi KUD sebanyak 7.399 dan 29.253 anggota untuk Koperasi Non KUD.

Tabel 2.70. Jumlah Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020			
No.	Indikator	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	440	521
2	Jumlah UMKM	2.951	3.037

Sumber : DKUMPP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.71. Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020				
No.	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi
1	Batu Ampar	32	10	42
2	Terentang	17	3	21
3	Kubu	50	7	57
4	Teluk Pakedai	16	3	19
5	Sungai Kakap	48	12	60
6	Rasau Jaya	45	8	53
7	Sungai Raya	160	24	184
8	Sungai Ambawang	61	6	67
9	Kuala Mandor B	16	2	18
	2 0 2 0	445	75	521
	2 0 1 9	440	75	515
	2 0 1 8	427	75	502
	2 0 1 7	409	76	485
	2 0 1 6	409	76	485

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.72. Banyaknya Anggota KUD dan Non KUD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020				
No.	Kecamatan	KUD	Non KUD	Jumlah Anggota
1	Batu Ampar	716	1.645	2.361
2	Terentang	389	583	972
3	Kubu	1.684	1.999	3.683
4	Teluk Pakedai	2.047	724	2.771
5	Sungai Kakap	376	3.350	3.726
6	Rasau Jaya	420	4.448	4.868
7	Sungai Raya	291	11.119	11.410

No.	Kecamatan	KUD	Non KUD	Jumlah Anggota
8	Sungai Ambawang	1.478	6.380	7.858
9	Kuala Mandor B	84	544	628
	2 0 2 0	7.485	30.792	38.277
	2 0 1 9	7.476	30.965	38.441
	2 0 1 8	7.474	29.916	37.390
	2 0 1 7	6.758	28.466	35.204
	2 0 1 6	6.382	27.500	33.882

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut, makin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas, lebih mudah, cepat, terjangkau dan transparan.

Perkembangan nilai realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi.

Tabel 2.73.
Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMDN	7.743.131.140.000,00	1.233.953.670.000,00	955.681.670.000,00	743.640.560.000,00	451.570.000.000,00
2	Jumlah PMA	1.595.799.110.000,00	95.917.560.000,00	16.411.980.000,00	0,00	0,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.74.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi				Penyerapan Tenaga Kerja	
			Rencana (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Rencana (RibU US\$)	Realisasi (RibU US\$)	WNI	WNA
1	Sektor Primer	13	-	-	-	73.145,00	-	-
2	Sektor Sekunder	19	-	-	-	2.291,00	12	-
3	Sektor Tersier	29	-	-	-	101,00	-	-
	2 0 2 0	61	-	-	35.307,00	75.537,00	12	-
	2 0 1 9	15	-	-	-	3.414,80	108	-
	2 0 1 8	17	-	16.411,98	-	94.705,20	234	5
	2 0 1 7	12	-	95.917,56	79.665,00	-	689	19
	2 0 1 6	21	10.100,80	1.595.799,11	149.515,00	19.865,83	5.133	68

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.75.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi				Penyerapan Tenaga Kerja	
			Rencana (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Rencana (RibU US\$)	Realisasi (RibU US\$)	WNI	WNA
1	Sektor Primer	53	-	207.547,00	-	-	627	1
2	Sektor Sekunder	85	-	17.345,00	-	-	165	-
3	Sektor Tersier	275	-	226.678,00	-	-	230	2
	2 0 2 0	413	451.985,00	451.570,00	-	-	1.022	3
	2 0 1 9	180	-	743.640,56	-	-	887	-
	2 0 1 8	78	-	955.681,67	-	-	2.060	5
	2 0 1 7	54	516.355,33	1.233.953,34	-	-	4.044	19
	2 0 1 6	382	3.922.473,99	7.743.131,14	149.515,00	19.865,83	25.551	68

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga

diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.76.
Data Atlit Berprestasi Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2020

No.	Nama	Cabang Olahraga	Prestasi	Tingkat	Keterangan
I	Olahraga Prestasi				
1	Devi Safitri	Hapkido	Juara 1	Internasional	Tahun 2018
2	Feri Adurrahman Saleh	Angkat Berat	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
3	Idham Halid Lestaluhu	Atletik	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
4	Idham Halid Lestaluhu	Atletik	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
5	Tim Basket Putri	Basket	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
6	Arva'i dan Hermanti	Dayung	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
7	Kamarullah	Yudo	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
8	Dimas Angga Prayoga	Karate K 67 Kg	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
9	Ridho Drafian	Karate K 60 Kg	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
10	Tim Putra	Panahan	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
11	Tim Putri	Panahan	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
12	Susilawati	Panahan Seri 1	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
13	Susilawati	Panahan Seri 1 & 2	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
14	Triple Women 2M 1W	Pentaque	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
15	Irvan Nugroho	Taekwondo	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
16	Sri Agustriani	Taekwondo	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
17	Andi Wandira	Taekwondo	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
18	Indah Wulandari	Tinju	Juara 3	Nasional	Tahun 2019
19	Arbaim	Angkat Besi	Juara 3	Nasional	Tahun 2019
20	Fauzi	Atletik	Juara 3	Nasional	Tahun 2019
II	Olahraga Pelajar				
1	Josua TB	Silat	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
2	Ananda Dimas	Silat	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
3	Irja Arfian	Silat	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
4	M. Ridho	Bulu Tangkis	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
5	Ridho Ramadhan	Silat	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
6	Sartika Dwi Astuti	Silat	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
7	Samsul	Silat	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
8	Nabila Rizki	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
9	Devi Nurvita	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
10	Riswanto	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
11	Neggi Rahayu S	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
12	Chairul Nugraha P	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
13	Cindi Aulia	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018

No.	Nama	Cabang Olahraga	Prestasi	Tingkat	Keterangan
14	Nurhalizah Aulia	Silat	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
15	Mirawati	Bulu Tangkis	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
16	Sri Ekawati	Bulu Tangkis	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
17	Tim Putra	Bola Voly	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
18	M. Fiqri As'ad	Atletik	Juara 1	Provinsi	Tahun 2019
19	Hajjariah Anggraini	Karate	Juara 1	Provinsi	Tahun 2019
20	Nurmala	Karate	Juara 1	Provinsi	Tahun 2019
21	Nurmala	Karate	Juara 3	Nasional	Tahun 2019
22	Wuri Asmaul Hasanah	Angkat Besi	Juara 2	Nasional	Tahun 2019
23	Nurlaila	Bola Voly Pasir	Juara 1	Provinsi	Tahun 2020
24	Wara Prada Anisa	Angkat Besi	Juara 1	Provinsi	Tahun 2020
25	Elvira Tresia Naikef	Bola Voly Pasir	Juara 1	Provinsi	Tahun 2020
26	Khairiyah	Karate	Juara 1	Provinsi	Tahun 2020
III	Olahraga Tradisional				
1	Sofiansyah	Panahan OR Putra	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
2	Sofiansyah	Panahan Kualifikasi 1 Ronde	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
3	Sofiansyah	Panahan Kualifikasi 2 Ronde	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
4	Sofiansyah	Panahan Total Ronde Putra	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
5	Nurjanah	Panahan OR Nasional	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
6	Nurjanah	Panahan Kualifikasi 1 Ronde	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
7	Habil Mursidi	Lari 400 m Kelas T.37	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
8	Sri Suryani	Lempar Cakram K.F.44	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
9	Sri Suryani	Tolak Peluru K.F.44	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
10	Sri Suryani	Lempar Lembing K.F.44	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
11	Ismail	Lempar Lembing K.F.55	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
12	Abdul Hadi	Angkat Berat Kelas 55 Kg	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
13	Abdul Hadi	Angkat Berat Kelas 49 Kg	Juara 1	Provinsi	Tahun 2018
14	Eko Sumarsono Hadi	Panahan OR Aduan Putra	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
15	Yusriadi	Panahan Ronde Nasional	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
16	Yusriadi	Panahan Kualifikasi 1 Ronde	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
17	Nurjanah	Panahan Total Ronde	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018

No.	Nama	Cabang Olahraga	Prestasi	Tingkat	Keterangan
18	Nurjanah	Panahan Kualifikasi 2 Ronde	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
19	Ismail	Tolak Peluru	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
20	Abdul Hadi	Tolak Peluru K.F.56	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
21	Meriana	Bulu Tangkis Tunggal	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
22	Efendi	Renang 50 m Gaya Dada	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
23	Annisa Fenti Pratiwi	Lari 100 m	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
24	Rachmad	Lempar Cakram	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
25	Susanto	Lempar Lembing	Juara 2	Provinsi	Tahun 2018
26	Efendi	Renang 50 m Gaya Bebas	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
27	Susanto	Angkat Berat Kelas 80 Kg	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
28	Novel	Tenis Meja	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
29	Fitri Feriansyah	Lompat Jauh K.TRW	Juara 3	Provinsi	Tahun 2018
30	Tim Sumpit	Sumpit Tradisional	Juara 2	Provinsi	Tahun 2019 (Sintang)
31	Tim Sumpit	Sumpit Beregu	Juara 2	Provinsi	Tahun 2019 (Kalbar)

Sumber : Dinas Porapar, 2021

2.3.2.14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun untuk kepentingan lainnya. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistik, data lainnya yang dihasilkan oleh SKPD teknis dalam bentuk data pokok, profil juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2016-2020 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77. Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik						
No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indikator Makro pembangunan KKR	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Perekonomian Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta intensitas kegiatannya dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78. Invetarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020			
No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke Tingkat Nasional	Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta	Memperkenalkan karya kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ke Tingkat Nasional

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
2.	Gelar seni dan Budaya Daerah (6 etnis besar di Kubu Raya) dan Lomba Drumband Tingkat Sekolah Dasar	Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya	Perlunya ditingkatkan lagi intensitasnya gelaran apresiasi Seni Budaya
3.	Pelestarian aktualisasi adat dan budaya daerah : a. Wayang Kulit b. Bakar Wangkang c. Festival Sekapur Sirih - Qasidah - Hadrah d. Gawai Rakyat e. Naik Dango f. Makan Saprahan g. Robo'-Robo' h. Haul Raja Kubu	Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Rasau Jaya Kec. Sungai Ambawang Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Sungai Kakap, Kec. Kubu Kec. Kubu	Perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi kegiatan seni budaya Kabupaten Kubu Raya
4.	Pengiriman tim kreatif ke tingkat provinsi	Kota Singkawang	Pagelaran seni budaya yang bertujuan menjadikan seni budaya Kab. Kubu Raya agar dikenal masyarakat luas
5.	Pembentukan komunitas kreatif : a. Generasi pesona indonesia (Genpi) KKR b. Komunitas fashion dan tata rias c. Komunitas musik KKR	Kec. Sungai Raya	Perlunya pembinaan dan perhatian khusus

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.79.
Benda Cagar Budaya yang Sudah Dilestarikan
di Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
1.	Makam Ismail Mundu	Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai
2.	Makam Panglima Raja Kubu	Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar
3.	Keraton Kubu	Desa Kubu, Kecamatan Kubu
4.	Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut)	Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
5.	Padogi	Sui Samak, Kecamatan Sungai Ambawang
6.	Rumah Panjang (Betang)	Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang
7.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
8.	Makam Sultan Manggis	Suka Lanting, Kecamatan Sungai Raya
9.	Guci	Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang
10.	Masjid Nasrullah	Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan budaya baca masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Perkembangan teknologi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah buku yang dipinjam, demikian pula dengan penambahan fasilitas di perpustakaan seperti internet. Ada kecenderungan masyarakat mengunjungi perpustakaan untuk memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber bacaan ataupun penggunaan media *e-book*. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di selama periode 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.80.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)	2.446	9.659	5.161	7.551	2.171
2.	Jumlah Buku	4.609	1.500	2.455	6.247	2.830

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip belum adanya dukungan ketersediaan gedung arsip Kabupaten. Selain itu, pengelolaan arsiparis masih bersifat manual, belum dilakukan duplikasi secara digital. Tenaga pengelola yang berasal dari

fungsional hanya berjumlah 40 orang, yang keberadaannya tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan. Produksi penangkapan ikan pada tahun 2016-2020 adalah fluktuatif dan tertinggi di tahun 2020 berjumlah 24.019,36 ton. Demikian pula, produksi budidaya ikan mengalami fluktuatif dan tertinggi di tahun 2020 berjumlah 2.388,00 ton.

Tabel 2.81.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Penangkapan Ikan (ton)	23.805,00	23.594,68	23.311,44	23.381,33	24.019,36
2.	Produksi Budidaya Ikan (ton)	355,30	306,40	304,34	312,92	2.388,00
3.	Kontribusi Sektor Pertanian (Perikanan dan Kelautan) Terhadap PDRB (%)	12,65	12,38	12,07	12,04	13.05

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021
Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.3.2. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata, mengingat Kabupaten Kubu Raya memiliki poensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa jenis wisata, yaitu Wisata Alam (*mangrove* terbaik kedua di Indonesia setelah Papua dan habitat terlengkap di dunia), Wisata 13 Perhutanan Sosial, Wisata Pantai, Wisata Agro (kafe sawah dan buah-buah tropis), Wisata Belanja dan Kuliner, Wisata Budaya 6 etnis besar dengan total 36 event per tahunnya (masing-masing etnis ada event musik dan kesenian etnis, event permainan dan olahraga tradisional, event kuliner

tradisional, pakaian tradisional, upacara adat, foto dan lukisan etnik), Wisata Rohani dalam rangka revolusi moral (bukan hanya religi untuk agama tertentu saja), Wisata Olahraga (*track* sensasi gambut dan *track* sensasi *mangrove*).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya akan menimbulkan *multiplier effect*, yakni menumbuhkan kegairahan ekonomi masyarakat sekaligus memperbesar kesempatan/lapangan kerja di bidang-bidang:

- Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Usaha Penyediaan Akomodasi
- Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Usaha Kawasan Pariwisata
- Usaha Jasa Transportasi Wisata
- Usaha Daya Tarik Wisata
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Usaha Jasa Pariwisata
- Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- Usaha Jasa Tirta
- Usaha Spa

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang tercatat adalah sebanyak 19.339 wisatawan nusantara (lokal) dan 77 wisatawan mancanegara (asing). Jumlah tersebut menurun dari jumlah wisatawan di tahun 2019 dikarenakan terjadi pandemi covid-19.

Tabel 2.82.
Banyaknya Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

No.	Jenis Wisatawan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wisatawan Nusantara	47.166	49.578	54.280	28.288	19.339
2	Wisatawan Mancanegara	1.642	1.736	2.120	486	77

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.83.

Pertumbuhan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2016-2020 (%)

No.	Jenis Wisatawan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wisatawan Nusantara	-18,86	5,11	9,48	-47,89	-31,64
2	Wisatawan Mancanegara	-34,76	5,72	22,12	-77,08	-84,16

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.84.

Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Menurut Jenisnya

Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
A.	Wisata Alam	
1.	Batu Gajah	Batu Ampar
2.	Dermaga Batu Ampar	Batu Ampar
3.	Pantai Tasikmalaya	Batu Ampar
4.	Selat Teluk Air	Batu Ampar
5.	Selat Padang Tikar	Batu Ampar
6.	Hutan <i>Mangrove</i>	Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Kubu
7.	Bukit Ambawang	Kubu
8.	Gunung Wangkang	Kubu
9.	Pulau Bidara	Kubu
10.	Pulau Gelanggang	Kubu
11.	Pantai Patok 20	Rasau Jaya
12.	Bukit Tunggal	Sungai Ambawang
13.	Pulau Hanyut	Sungai Ambawang
14.	Danau Kongsu	Sungai Kakap
15.	Taman Agro Rekadana	Sungai Kakap
16.	Pantai TengkuYung di Desa Sungai Nibung	Teluk Pakedai
17.	Danau Tujuh	Terentang
18.	Pulau Binga	Terentang
B.	Wisata Minat Khusus	
1.	Taman Fantasi Gardenia	Sungai Raya
2.	<i>Waterpark Paradise Q</i>	Sungai Raya
3.	Transmart Studio Mini	Sungai Raya
4.	Habitat Buaya di Sungai Kering	Teluk Pakedai
5.	Habitat Buaya Muara	Sungai Kakap
6.	Rumah <i>Retret Constantine</i>	Sungai Ambawang
7.	Rumah Pelangi	Sungai Ambawang
C.	Situs Budaya	
1.	Makam Panglima Raja	Batu Ampar
2.	Makam Panglima Raja Kubu/Situs	Kubu
3.	Replika Istana Raja Kubu	Kubu
4.	Batu Masjid	Kubu
5.	Bekas Keraton/Situs	Kubu
6.	Guci/Artefak	Sungai Ambawang
7.	Padogi/Situs	Sungai Ambawang

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
8.	Rumah Panjang/Situs	Sungai Ambawang
9.	Bekas Keraton/Situs	Sungai Kakap
10.	Hien Bu Cheng Hua (Klenteng Tengah Laut)	Sungai Kakap
11.	Makam H. Fatah Mumbung	Sungai Kakap
12.	Mungguk Mas/Situs	Sungai Kakap
13.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya
14.	Makam Sultan Manggis	Sungai Raya
15.	Vihara Maitreya	Sungai Raya
16.	Makam H. Ismail Mundu	Teluk Pakedai
17.	Makam Kerajaan Kerta Mulia	Teluk Pakedai
18.	Masjid Nasrullah/Situs	Teluk Pakedai
19.	Masjid Batu	Teluk Pakedai
D.	Industri Pariwisata	
1.	Hotel Dangau	Sungai Raya
2.	Gardenia Resort & Spa	Sungai Raya
3.	Hotel/Villa Harmony In	Sungai Raya
4.	Penginapan <i>Family</i>	Sungai Raya
5.	<i>Homestay Family</i>	Sungai Raya
6.	Sun Set Restoran & Bar	Sungai Raya
7.	Rumah Makan Periuk	Sungai Raya
8.	Restoran Teratai Indah	Sungai Kakap
9.	Restoran Pantai Indah Kakap	Sungai Kakap
10.	Restoran Harmony In	Sungai Raya
11.	<i>Fresh Resto</i>	Sungai Raya
12.	Restoran Dangau	Sungai Raya
13.	<i>King's Crab</i> Restoran	Sungai Raya
14.	<i>Cafe Tanggoe</i>	Sungai Raya
15.	Restoran Papyrus	Sungai Raya
16.	Penangkaran Arwana	Sungai Raya
17.	Kerajinan Tikar Lampit	Sungai Ambawang
18.	Industri Pengolahan Sagu	Sungai Ambawang
19.	Industri Kerajina Keladi Air	Sungai Ambawang
20.	Industri Pembuatan Rebana	Rasau Jaya
21.	Industri Pembuatan Marning dan Rengginang	Rasau Jaya
22.	Industri Pengolahan Kelapa	Sungai Kakap
23.	Industri Pengolahan Arang Kelapa	Sungai Kakap
24.	Kerajinan Tikat Bede	Kuala Mandor B
25.	Industri Makanan Onde Ceplis	Terentang

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.85.
Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Usaha Pariwisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	13	13	10	10	10
2	Usaha Penyediaan Akomodasi	10	11	11	14	14
3	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	173	175	188	272	-

No.	Jenis Usaha Pariwisata	2016	2017	2018	2019	2020
4	Usaha Kawasan Wisata	-	-	-	-	-
5	Usaha Jasa Transportasi Wisata	-	-	-	-	-
6	Usaha Daya Tarik Wisata	20	21	25	25	25
7	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	17	17	18	20	-
8	Usaha Jasa Pariwisata	-	-	-	-	-
9	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	-	5	5	5	5
10	Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	-	-	-	-	-
11	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	-	-	-	-	-
12	Usaha Jasa Tirta	-	-	-	-	-
13	Usaha Spa	21	21	21	21	22

Sumber : Dinas Porapar Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya. Potensi sumber daya alam di sektor ini cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai.

Tabel 2.86.
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PADI					
1.1	Luas Tanam (Ha)	55.120,00	48.252,00	39.187,00	34.375,00	31.223,00
1.2	Luas Panen (Ha)	44.783,00	51.863,00	50.039,00	38.443,00	33.371,00
1.3	Produktivitas (Kw/Ha)	34,56	31,72	31,72	29,85	29,85
1.4	Produksi (Ton)	154.770,00	164.509,00	158.722,00	114.753,00	99.613,00
2.	JAGUNG					
2.1.	Luas Tanam (Ha)	1.720,00	2.901,30	1.661,40	1.418,00	1.629,00
2.2.	Luas Panen (Ha)	1.148,00	2.226,00	1.415,00	2.385,00	821,00
2.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	28,80	28,80	28,80	40,61	40,61
2.4.	Produksi (Ton)	3.306,00	6.411,00	4.075,00	9.727,00	3.338,00

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	KEDELAI					
3.1.	Luas Tanam (Ha)	14,00	39,00	5,00	4,20	0,50
3.2.	Luas Panen (Ha)	6,00	10,00	32,00	5,60	0,70
3.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	12,03	12,03	12,03	10,70	10,70
3.4.	Produksi (Ton)	7,00	11,00	38,00	6,00	0,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, 2021

Berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020 oleh Bank Indonesia, dalam program pengendalian inflasi triwulan 2 tahun 2020 dengan strategi ketersediaan pasokan pangan lewat program penguatan produksi, cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan perdagangan komoditas pangan, Kubu Raya telah menjadi salah satu bagian dari pencapaian pada program ini lewat tujuh Gabungan Kelompok Tani (yang terdiri dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang) yang telah berhasil melakukan panen raya padi yang menggunakan bibit unggul tropiko. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya benar-benar memperhatikan kualitas dan terus melakukan pengembangan di sektor pertanian. Dengan keunggulan sektor pertanian tersebut, kabupaten Kubu Raya dapat menghasilkan beras-beras lokal yang berkualitas.

Tabel 2.87.
Hasil Produksi Beras Setiap Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat (Ton)

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
Kabupaten Sambas	81.090	99.247	88.413
Kabupaten Bengkayang	13.669	21.336	18.648
Kabupaten Landak	47.440	60.536	58.345
Kabupaten Mempawah	30.939	40.057	41.266
Kabupaten Sanggau	30.802	50.104	38.826
Kabupaten Ketapang	36.631	64.061	61.070
Kabupaten Sintang	9.416	21.055	13.357
Kabupaten Kapuas Hulu	12.652	14.459	13.740
Kabupaten Sekadau	12.989	20.276	17.710
Kabupaten Melawi	2.416	6.881	5.782
Kabupaten Kayong Utara	27.160	24.939	28.973

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
Kabupaten Kubu Raya	54.412	68.539	63.321
Kota Pontianak	507	278	420
Kota Singkawang	5.975	7.244	8.117
Kalimantan Barat	366.098	499.012	457.987

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018-2020) Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah tertinggi kedua penghasil beras setelah Kabupaten Sambas, dengan jumlah produksi beras mencapai 63.321 ton di tahun 2020 atau sebesar 14 persen dari total produksi beras Provinsi Kalimantan Barat.

Selain keunggulan di bidang pertanian, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki keunggulan di bidang perkebunan yaitu salah satunya perkebunan kelapa. Kabupaten Kubu Raya merupakan sentra penghasil kelapa terbesar di Kalimantan Barat.

Tabel 2.88.
Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Dalam Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Kab/Kota	Luas Areal Menurut Keadaan Tanaman (Ha)			Total Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Rerata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Jumlah Petani (KK)
	Tanaman						
	Muda	Produksi	Tua/Rusak				
Sambas	2.080	15.636	4.768	22.484	13.596	870	12.234
Bengkayang	675	3.024	578	4.277	2.623	867	5.163
Landak	-	-	-	-	-	-	-
Mempawah	1.730	12.950	5.008	19.688	16.937	1.308	14.974
Sanggau	30	228	362	620	147	645	3.173
Ketapang	390	2.443	1.170	4.003	1.730	708	7.106
Sintang	-	386	322	708	144	373	1.378
Kapuas Hulu	3	105	30	138	21	200	231
Sekadau	-	3	10	13	1	333	45
Melawi	47	402	233	682	86	214	1.319
Kayong Utara	1.170	5.917	709	7.796	5.330	901	6.530
Kubu Raya	1.772	32.489	2.566	36.827	39.105	1.204	11.639
Singkawang	237	1.952	541	2.730	1.581	810	2.367
TOTAL	8.134	75.535	16.297	99.966	81.301	1.076	66.159

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat untuk perkebunan tanaman jenis kelapa dalam, kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan luas areal dan jumlah produksi kelapa dalam terbesar di Kalimantan Barat. Luas areal perkebunan sebesar 36.827 Ha dan total produksi kelapa dalam yang dihasilkan sebanyak 39.105 ton (angka sementara). Secara persentase kabupaten Kubu Raya menyumbangkan sebesar 48 persen dari keseluruhan produksi kelapa dalam yang dihasilkan di provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk luas areal sebesar 37 persen dari total keseluruhan areal lahan perkebunan kelapa dalam di provinsi Kalimantan Barat.

Jenis tanaman sayur dan buah semusim yang menjadi komoditas utama Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 adalah ketimun, kacang panjang dan semangka. Produksi ketimun pada tahun 2020 sebesar 13.858 kuintal, luas panen sebesar 271 hektar dengan demikian produktivitasnya mencapai 51,13 kuintal/hektar. Untuk komoditi kacang panjang memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 6.282 kuintal, 232 hektar dan 27,08 kuintal/hektar. Sedangkan komoditi semangka memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 6.230 kuintal, 133 hektar dan 46,84 kuintal/hektar.

Tabel 2.89.
Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenis Produksi	Luas Panan (Ha)	Produksi Panen (Kuintal)	Rata-Rata Produksi (Ton)
1	Bawang Daun	67,00	1.052,00	15,70
2	Bawang Merah	6,00	78,00	13,00
3	Bawang Putih	0,00	0,00	0,00
4	Bayam	19,00	122,00	6,42
5	Cabai Besar	77,00	856,00	11,12
6	Cabai Rawit	226,00	3.255,00	14,40
7	Kacang Panjang	232,00	6.282,00	27,08
8	Kangkung	95,00	1.048,00	11,03
9	Kentang	0,00	0,00	0,00
10	Ketimun	271,00	13.858,00	51,14
11	Kubis	1,00	5,00	5,00
12	Melon	13,00	307,00	23,62
13	Kol	34,00	347,00	10,21
14	Semangka	133,00	6.230,00	46,84

No.	Jenis Produksi	Luas Panan (Ha)	Produksi Panen (Kuintal)	Rata-Rata Produksi (Ton)
15	Terung	96,00	774,00	8,06
16	Tomat	51,00	660,00	12,94

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Untuk tanaman perkebunan, dibagi menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan usaha/hukum di atas tanah negara dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang, sedangkan diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Tanaman yang diusahakan oleh perkebunan besar adalah kelapa sawit yang sudah memproduksi secara konsisten. Pada tahun 2019 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 184.064 ton, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 236.293 ton. Sedangkan untuk luas tanaman produktif kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 72.747 hektar, artinya rata-rata produksi kelapa sawit mencapai 32,48 kuintal per hektar.

Produksi tanaman perkebunan lainnya seperti komoditi karet, kelapa dalam, dan kopi tidak mengalami peningkatan produksi yang signifikat. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan drastis yakni tanaman kelapa hibrida yang pada tahun 2019 mencapai 2.779 ton, menurun pada tahun 2020 dengan produksi sebanyak 1.446 ton.

Tabel 2.90.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (Ton)

No.	Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	14.436	15.353	15.353	15.380	15.422
2	Kelapa Dalam	36.585	39.105	39.105	39.105	38.810
3	Kelapa Hibrida	2.983	2.983	1.584	2.779	1.446
4	Kelapa Sawit	96.697	97.045	147.887	184.064	236.293
5	Kakao	37	37	39	39	33
6	Lada	215	235	230	230	186
7	Kopi	1.348	1.388	1.368	1.369	1.292
8	Pinang	527	608	608	608	652
9	Sagu	52	89	89	89	2.489
	Jumlah	152.880	156.843	206.263	243.663	296.623

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Untuk peternakan, dibedakan menjadi golongan ternak besar dan golongan ternak kecil. Pada tahun 2020 untuk golongan ternak besar, produksi sapi tercatat sebanyak 278.480 kg, turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 402.047 kg. Untuk golongan ternak kecil, produksi ternak yang terbanyak adalah babi yang mencapai 320.848 kg, sedangkan produksi kambing pada tahun 2020 adalah 52.449 kg. Sedangkan untuk produksi ayam pedaging pada juga mengalami penurunan, dari sebelumnya mencapai 13.266.551 kg pada tahun 2019, turun menjadi 9.846.466 pada tahun 2020. Untuk produksi ayam ras potong di Kabupaten Kubu Raya merupakan yang terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.91.
Produksi Ternak dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 (Kg)

No.	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil	
		Sapi	Kerbau	Babi	Kambing
1	Batu Ampar	8.499	-	3.419	2.917
2	Terentang	5.463	4.400	2.512	1.756
3	Kubu	10.927	-	-	4.050
4	Teluk Pakedai	10.623	-	4.954	2.223
5	Sungai Kakap	17.604	-	1.256	6.599
6	Rasau Jaya	13.507	-	54.498	5.310
7	Sungai Raya	201.082	-	5.234	12.942
8	Sungai Ambawang	8.802	-	217.155	15.590
9	Kuala Mandor B	1.973	-	31.820	1.062
	2 0 2 0	278.480	4.400	320.848	52.449
	2 0 1 9	402.047	12.480	655.723	45.496
	2 0 1 8	398.066	5.000	375.846	44.788
	2 0 1 7	283.032	3.000	360.065	52.647
	2 0 1 6	221.266	5.200	171.659	9.020

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.92.
Produksi Unggas dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 (Kg)

No.	Kecamatan	Ayam Ras		Ayam Buras	Itik
		Pedaging	Petelur		
1	Batu Ampar	102.500	-	113.369	890
2	Terentang	23.340	425	7.809	392
3	Kubu	88.087	-	569.160	690
4	Teluk Pakedai	180.943	-	40.210	3.603
5	Sungai Kakap	497.133	-	321.574	8.460
6	Rasau Jaya	4.126.114	70.560	368.500	1.400
7	Sungai Raya	1.520.895	-	52.827	3.130
8	Sungai Ambawang	2.565.626	189.840	87.039	4.026
9	Kuala Mandor B	741.828	-	100.330	2.907
	2 0 2 0	9.846.466	260.825	1.660.818	25.498
	2 0 1 9	13.266.551	359.520	1.646.287	31.911
	2 0 1 8	16.293.403	206.640	1.653.089	24.725
	2 0 1 7	13.866.532	85.445	1.514.908	28.276
	2 0 1 6	12.217.665	32.760	1.530.209	11.785

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.93.
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (Ton)

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	221	283	398	402	278
2	Kambing	9	53	44	45	52
3	Babi	172	360	375	655	320
4	Ayam Buras	1.530	1.515	1.653	1.645	1.660
5	Ayam Ras Pedaging	12.593	13.701	16.293	13.266	9.848
6	Ayam Ras Petelur	33	190	206	359	260
7	Itik/Itik Manila	12	28	24	31	25
Jumlah		10.445	14.570	18.993	16.403	12.443

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.94.
Produksi Daging Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (Ton)

No.	Kabupaten/Kota	Sapi	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik/Itik Manila
1	Kabupaten Sambas	897	73	202	367	3.933	293	43
2	Kabupaten Bengkayang	151	35	469	56	3.011	78	4
3	Kabupaten Landak	144	20	2.206	76	3.374	8	1
4	Kabupaten Mempawah	567	21	690	15	690	3	18
5	Kabupaten Sanggau	484	26	1.741	237	2.189	6	14
6	Kabupaten Ketapang	394	14	374	145	4.382	8	29
7	Kabupaten Sintang	334	32	494	70	4.432	4	7
8	Kabupaten Kapuas Hulu	139	3	210	155	1.017	-	1
9	Kabupaten Sekadau	174	6	444	82	1.623	8	3
10	Kabupaten Melawi	145	8	159	37	820	-	2
11	Kabupaten Kayong Utara	87	2	124	107	620	1	20
12	Kabupaten Kubu Raya	287	46	387	1.703	16.785	213	25
13	Kota Pontianak	1.126	122	893	77	8.912	-	96
14	Kota Singkawang	474	13	3.083	80	4.303	2.562	32
	2 0 2 0	5.403	421	11.476	3.207	56.091	3.184	295
	2 0 1 9	5.445	422	12.078	3.619	53.394	3.084	286
	2 0 1 8	5.535	421	11.620	3.175	54.943	3.151	670
	2 0 1 7	5.123	465	11.274	3.470	48.723	2.256	256
	2 0 1 6	5.306	358	18.058	3.744	40.771	2.367	221

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2018

Adapun data kelompok tani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Kubu Raya per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95.
Data Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jenis		
			Poktan	Gapoktan	Jumlah Anggota Poktan dan Gapoktan
1	Batu Ampar	15	198	15	4.222
2	Terentang	10	140	13	2.573
3	Kubu	20	215	18	5.390
4	Teluk Pakedai	14	102	15	2.419
5	Sungai Kakap	13	336	29	7.893
6	Rasau Jaya	6	124	7	3.011
7	Sungai Raya	20	337	29	7.880
8	Sungai Ambawang	15	300	34	6.801
9	Kuala Mandor B	5	73	5	1.771
	2 0 2 0	118	1.825	165	41.960
	2 0 1 9	121	1.688	154	35.233
	2 0 1 8	118	1.451	152	31.143
	2 0 1 7	118	1.451	149	26.045
	2 0 1 6	118	1.332	142	30.701

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.96.
Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	PNS	Non PNS	Swadaya
1	Batu Ampar	15	6	1	9
2	Terentang	10	4	2	7
3	Kubu	20	9	-	10
4	Teluk Pakedai	14	4	1	8
5	Sungai Kakap	13	10	-	14
6	Rasau Jaya	6	3	2	7
7	Sungai Raya	20	7	4	19
8	Sungai Ambawang	15	7	1	17

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	PNS	Non PNS	Swadaya
9	Kuala Mandor B	5	4	1	7
Jumlah		118	54	12	98

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.3.4. Kehutanan

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 4 (empat) jenis hutan yang termasuk dalam Areal Dalam Kawasan yang luasannya mengalami perubahan dari tahun 2016. Untuk Hutan Lindung (HL), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 171.477 Ha menjadi 143.124 Ha. Untuk Hutan Produksi (HP), luas kawasannya mengalami penambahan dari 98.104 Ha menjadi 134.136 Ha. Untuk Hutan Produksi Konversi (HPK), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 53.042 Ha menjadi 27.877 Ha. Sedangkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), luas kawasannya mengalami penambahan dari 65.770 Ha menjadi 66.916 Ha.

Tabel 2.97.
Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Kubu Raya (Ha)
Tahun 2020

No.	Jenis Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	143.124
2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	-
3	Hutan Produksi Terbatas	66.916
4	Hutan Produksi Tetap	134.136
5	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	27.877
6	Perairan	13.054
Jumlah Luas Hutan dan Perairan		385.107

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan di segala bidang pembangunan. Hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang terbatas. Dengan kondisi tersebut maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan baik untuk menjamin ketersediaannya yang

berkelanjutan guna kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Potensi pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98.
Potensi Pertambangan dan Penggalian Dirinci Menurut Jenis Bahan Tambang dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

No.	Kecamatan	Jenis Tambang/Galian	Keterangan
1	Batu Ampar	Andesit/Dasit (AM), Granit/Diorit/Granodiorit, Batuan, Bauksit	-
2	Terentang	Bauksit, Batu Bara, Pasir Sungai	-
3	Kubu	Granit, Pasir Sungai, Batuan, Tanah Urug	-
4	Teluk Pakedai	Pasir Kuarsa, Tanah Urug	-
5	Sungai Kakap	Gas Methan (CH4)	-
6	Rasau Jaya	Gambut	-
7	Sungai Raya	Pasir Sungai, Gambut	-
8	Sungai Ambawang	Bauksit, Pasir Kuarsa, Gambut	-
9	Kuala Mandor B	Pasir Sungai	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.3.6. Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup penting. Berdasarkan data perusahaan perdagangan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 180 perusahaan perdagangan dengan jumlah SIUP terbesar dimiliki oleh jenis pedagang menengah sejumlah 99 usaha atau 55,00 persen dari total SIUP yang dikeluarkan.

Tabel 2.99.
Banyaknya Perusahaan Perdagangan yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Perdagangan Besar	Perdagangan Menengah	Perdagangan Kecil	Perdagangan Mikro	Jumlah
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	1	-	-	1
5	Sungai Kakap	2	8	-	-	10
6	Rasau Jaya	2	-	-	-	2

No.	Kecamatan	Perdagangan Besar	Perdagangan Menengah	Perdagangan Kecil	Perdagangan Mikro	Jumlah
7	Sungai Raya	41	91	11	-	143
8	Sungai Ambawang	11	9	3	-	23
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	2 0 1 9	56	109	14	-	179
	2 0 1 8	9	65	-	-	74
	2 0 1 7	104	14	158	-	276
	2 0 1 6	120	35	234	-	389
	2 0 1 5	101	25	289	-	415

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Tabel 2.100.
Banyaknya Perusahaan UTTP Menurut Jumlah Pedagang yang Masuk
Dalam Program Tera dan Tera Ulang Di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Pedagang	Jumlah UTTP
1	Batu Ampar	278	490
2	Terentang	74	154
3	Kubu	59	59
4	Teluk Pakedai	59	76
5	Sungai Kakap	349	569
6	Rasau Jaya	267	229
7	Sungai Raya	267	441
8	Sungai Ambawang	65	89
9	Kuala Mandor B	107	153
	2 0 2 0	1.525	2.260
	2 0 1 9	1.525	2.260
	2 0 1 8	1.525	2.260
	2 0 1 7	1.525	2.260
	2 0 1 6	1.774	2.966

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.3.7. Perindustrian

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sektor industri yang berkembang di Kabupaten Kubu Raya adalah sektor industri kecil yang didominasi oleh Industri Makan dan Minum.

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 561 perusahaan, dimana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang hanya 485 perusahaan/usaha, atau meningkat 15,67 persen. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap perusahaan Industri Besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 tercatat sebesar 17.898 orang, naik sekitar 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai investasinya pada kelompok industri kecil menengah, dari nilai total investasi tahun 2020 sebesar 94,72 miliar rupiah, dengan nilai investasi terbesar pada industri makanan sebesar 23,17 miliar rupiah. Sedangkan pada golongan industri besar, nilai investasi terbesar terdapat pada jenis usaha industri kelapa sawit dengan nilai investasi 427 miliar rupiah atau 28,67 persen dari total nilai investasi industri besar di tahun 2020 yang berjumlah 1.489,52 miliar rupiah.

Tabel 2.101.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
1	Makanan	343	1.069	23.170.654.000
2	Minuman	25	140	5.613.076.000
3	Pengolahan Tembakau	2	12	381.600.000
4	Pakaian Jadi	1	4	36.750.000
5	Tekstil	14	43	253.300.000
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	10	48.950.000
7	Barang dari Kayu, Gabus, Rotan dan Bambu	56	332	2.401.864.000
8	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10	17	237.146.000
9	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	29	4.172.000.000
10	Industri Karet dan Bahan dari Karet	2	8	168.000.000
11	Industri Barang dari Plastik	3	42	1.595.000.000
12	Barang Galian Bukan Logam	6	118	17.404.318.000
13	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	20	109	15.194.788.000

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
14	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2	4	200.000.000
15	Industri Alat Angkutan Lainnya	5	38	10.139.197.000
16	Furniture	29	156	3.514.178.000
17	Pengolahan Lainnya	30	77	109.138.000
18	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4	58	2.288.745.000
19	Industri Mesin dan Perlengkapannya	1	5	200.000.000
20	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	24	7.600.000.000
	2 0 2 0	561	2.295	94.728.704.000
	2 0 1 9	485	1.532	10.724.351.000
	2 0 1 8	462	1.611	11.945.236.000
	2 0 1 7	457	1.576	10.607.236.000

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.102.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Industri Besar
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
1	Kayu Lapis	7	5.760	177.832.560.000
2	Sawmill	17	3.389	52.379.525.000
3	Dowel, Moulding	20	4.367	61.786.119.000
4	Furniture	6	532	10.279.807.000
5	<i>Particle Board</i>	5	1.516	175.448.200.000
6	Pengetaman	3	32	540.378.000
7	Kusen/Daun Pintu Jendela	3	171	20.556.700.000
8	Baja Lapis Seng	2	92	12.196.851.000
9	Galangan Kapal	4	144	12.728.225.000
10	Kimia	7	367	55.953.775.000
11	<i>Crum Rubber</i>	3	528	226.120.000.000
12	Remiling Karet	2	262	193.136.100.000
13	Percetakan	2	117	16.534.120.000
14	Garam Beryodium	1	29	162.000.000

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
15	Air Minum Dalam Kemasan	3	14	1.071.000.000
16	Industri Kelapa Sawit	3	251	427.230.432.000
17	Industri Penyosohan Beras	1	16	14.075.000.000
18	Industri Alat Angkut Lainnya	1	25	218.000.000
19	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	67	15.599.612.000
20	Industri Barang dari Semen, Kapus, Gips dan Asbes	3	152	10.950.000.000
21	Industri Mainan Anak	1	52	3.416.454.000
22	Industri Pengolahan Es Krim	1	15	1.311.750.000
	2 0 2 0	98	17.898	1.489.526.507.000
	2 0 1 9	97	17.763	1.402.296.076.000
	2 0 1 8	97	16.863	1.402.292.584.000
	2 0 1 7	97	17.763	1.402.296.176.000

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakannya transmigrasi adalah untuk meratakan penyebaran penduduk di wilayah nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib

Realisasi dari target yang ditetapkan belum memenuhi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
 - a. Desa Sungai Radak Dua SP 1, target 224 dan realisasi 200 (tahun 2006/2007)
 - b. Desa Sungai Radak Dua SP 2, target 275 dan realisasi 205 (tahun 2007/2009)
 - c. Desa Terentang Hulu SP 1, target 250 dan realisasi 200 (tahun 2010/2011)

Realisasi dari target yang ditetapkan yang memenuhi/melebihi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
 - a. Desa Permata, target 300 dan realisasi 300 (tahun 2012)
 - b. Desa Sungai Radak Satu SP 1, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2013)
2. Kecamatan Kubu :
 - a. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2004)
 - b. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2006)
 - c. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2007)
3. Kecamatan Sungai Raya :
 - a. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2010)
 - b. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2012)
 - c. Desa Sungai Bulan C, target 40 dan realisasi 40 (tahun 2014)
4. Kecamatan Teluk Pakedai :
 - a. Desa Teluk Pakedai Hulu, target 100 dan realisasi 150 (tahun 2012)

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita. Konsumsi per kapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (*basic needs*), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, serta penunjang lainnya.

Dengan angka kondisi ekonomi makro yang dibayangi dengan inflasi sebesar 5,17 persen akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya cenderung meningkat, dibandingkan dengan tahun 2015 dimana dengan inflasi sebesar 6,63 persen pengeluaran masyarakat hanya sebesar 9.890,21. Pada tahun dengan rasio pengeluaran Rumah Tangga sebesar 116,21 persen, yang berarti kenaikan TDL, kendatipun berdampak pada daya beli akan tetapi relatif tidak terlalu mengganggu pengeluaran penduduk. Dengan membandingkan rata-rata pengeluaran terhadap inflasi, terlihat bahwa angka inflasi berpengaruh besar terhadap tingkat pengeluaran penduduk

Tabel 2.103.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT	11.052,21	12.253,38	13.320,77	14.224,68	14.474,97
2.	Jumlah RT	128.435,00	131.161,00	N/A	N/A	N/A
3.	Rasio	116,21	107,04	N/A	N/A	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Sementara itu, rasio pengeluaran untuk keperluan non rumah tangga berfluktuatif dan rata-rata pengeluaran non makanan selama tahun 2019-2020 rasionya sebesar 1,85 persen.

Tabel 2.104.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Rumah Tangga Non Makanan 2019 dan 2020

No.	Uraian	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	446.349,00	481.387,00
2.	Total Pengeluaran	963.157,00	1.015.328,00
3.	Rasio	2,16	2,11

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.105.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dan 2020

No	Kelompok Barang	2019	2020
1.	Makanan	516.608	533.941
	a. Padi-padian	67.508	71.855

No	Kelompok Barang	2019	2020
	b. Umbi-umbian	3.925	4.404
	c. Ikan	60.156	59.532
	d. Daging	18.897	18.312
	e. Telur	30.517	32.143
	f. Sayur-sayuran	33.695	38.139
	g. Kacang-kacangan	7.561	8.914
	h. Buah-buahan	15.968	15.891
	i. Minyak dan lemak	11.281	13.248
	j. Bahan minuman	17.719	18.947
	k. Bumbu-bumbuan	13.041	12.332
	l. Konsumsi lainnya	12.561	12.491
	m. Makanan dan minuman	142.860	151.356
	n. Rokok	75.919	76.376
2.	Non Makanan	446.349	481.387
	a. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	249.849	247.485
	b. Barang dan jasa	99.116	116.674
	c. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	31.573	28.446
	d. Barang-barang tahan lama	22.471	28.432
	e. Pajak dan asuransi	26.544	47.908
	f. Keperluan pesta dan upacara	16.995	12.451
JUMLAH		963.157	1.015.328

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Di sisi lain besarnya angka konsumsi berarti kemampuan investasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi relatif kecil, karena sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari prespektif ekonomi pembangunan (P.Todaro), besarnya angka konsumsi justru kontra produktif dengan kemajuan daerah. Persentase pengeluaran makanan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 mengalami peningkatan sementara pengeluaran non makanan mengalami penurunan. Dengan melihat perbandingan pengeluaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa indeks kesejahteraan penduduk Kabupaten Kubu Raya secara bertahap sudah relatif semakin membaik.

Tabel 2.106.
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kubu Raya 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1.	Persentase Pengeluaran Makanan	53,64	52,59
2.	Persentase Pengeluaran Non Makanan	46,34	47,41

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

2.4.2.1. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melaui jaringan Perumda Air Minum Tirta Raya mengalami peningkatan dari 2016-2020. Permasalahan utama Perumda Air Minum Tirta Raya selain dari aspek finansial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

Tabel 2.107.
Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih

No.	Persentase Menggunakan Air Bersih	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Raya	14.871	15.544	16.734	17.446	251.887

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.4.2.2. Fasilitas Listrik

Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut data PT. PLN (Persero) Wilayah V Rayon Rasau Jaya pada tahun 2017, banyaknya produksi listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4.814.392 KWH dengan jumlah daya tersambung sebesar 29.491.256 VA. Adapun jumlah pelanggan untuk tahun 2017 sebanyak 40.440 pelanggan, naik 5,80 persen dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.108.
Jumlah RT yang telah teraliri dan belum teraliri listrik PLN
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT yang Sudah Teraliri PLN	Jumlah RT yang Belum Teraliri PLN	Persentase (%)
1	Batu Ampar	8.152	5.958	2.194	73,09
2	Terentang	1.072	0	1.072	0,00
3	Kubu	112	0	112	0,00
4	Teluk Pakedai	383	0	383	0,00
5	Sungai Kakap	528	203	325	38,45
6	Rasau Jaya	4	0	4	0,00
7	Sungai Raya	0	0	0	0,00
8	Sungai Ambawang	0	0	0	0,00
9	Kuala Mandor B	1.640	1.114	526	67,93
	Kabupaten Kubu Raya	11.891	7.275	4.616	61,18

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.109.
Daftar Kecamatan yang Belum/Sudah Menyampaikan
Data Kebutuhan Listrik (PLN)
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Belum	Sudah	Lengkap/Belum Lengkap
1	Batu Ampar		√	Belum Lengkap
2	Terentang		√	Belum Lengkap
3	Kubu		√	Belum Lengkap
4	Teluk Pakedai		√	Belum Lengkap
5	Sungai Kakap		√	Lengkap
6	Rasau Jaya		√	Lengkap
7	Sungai Raya		√	Lengkap
8	Sungai Ambawang		√	Belum Lengkap
9	Kuala Mandor B		√	Belum Lengkap

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.110.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Untuk Memasak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sumber Penerangan					
	a. Listrik PLN	97,57	97,54	92,30	97,00	97,50
	b. Listrik Non-PLN	1,75	1,71	7,50	2,50	1,20
	c. Bukan Listrik	0,68	0,75	0,20	0,50	1,30
2	Bahan Bakar Untuk Memasak					
	a. Listrik	-	-	-	0,50	-
	b. Gas/Elpiji	96,24	95,71	93,30	94,50	95,10
	c. Minyak Tanah	-	0,33	0,20	0,60	-
	d. Arang/Briket	-	-	-	-	-
	e. Kayu Bakar	3,76	3,76	6,10	4,40	5,0
	f. Lainnya	-	-	0,40	-	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Dengan makin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kubu Raya, menyebabkan bertambahnya wisatawan yang datang. Dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kubu Raya, otomatis meningkatkan kebutuhan akan tempat menginap.

Tabel 2.111.
Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Penginapan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Berbintang	3	3	3	3	4
2	Hotel Non Berbintang	1	2	2	2	2

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.112.
Jumlah Akomodasi Hotel Berbintang Menurut Bulan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No.	Bulan	Hotel	Kamar	Tamu
1	Januari	3	171	2.095
2	Pebruari	3	171	2.024
3	Maret	3	171	1.329
4	April	3	171	629

No.	Bulan	Hotel	Kamar	Tamu
5	Mei	3	171	538
6	Juni	4	210	1.012
7	Juli	4	210	1.760
8	Agustus	4	210	1.759
9	September	4	210	1.461
10	Oktober	4	210	2.232
11	Nopember	4	210	2.212
12	Desember	4	210	2.365
Total				19.416

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan periode 2016-2020 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) (Juta)	8.010.306,71	9.240.159,61	10.312.253,36	11.211.964,35	12.751.262,63
2.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	361 PMDN 21 PMA	374 PMDN 21 PMA	386 PMDN 21 PMA	179 PMDN 17 PMA	210 PMDN 23 PMA

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya didukung tenaga oleh Aparatur Sipil Negara yang berkompeten. Data mengenai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kubu Raya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I	17	0	17
2	II	321	427	748
3	III	1.194	1.687	2.881
4	IV	732	941	1.673
	Jumlah	2.264	3.055	5.319

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.115.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	24	0	24
2	SLTP	29	6	35
3	SLTA	593	650	1.243
4	Diploma I, II/Akta I, II	323	504	827
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	241	477	718
6	Diploma IV/Sarjana/Doktor /Ph.D	1.054	1.418	2.472
	Jumlah	2.264	3.055	5.319

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.116.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Esselonering Tahun 2020

No.	Tingkat Esselonering	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon V	0	0	0
2	Eselon IV	286	161	447
3	Eselon III	114	28	142
4	Eselon II	24	4	28
5	Eselon I	0	0	0
	Jumlah	424	193	617

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.117.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural	424	193	617
2	Fungsional Tertentu	1.116	1.950	3.066
3	Fungsional Umum	724	911	1.635
	Jumlah	2.264	3.054	5.318

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sistem perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program, kegiatan dan subkegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya mengandung makna bahwa:

1. Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Belanja Daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
3. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan belanja melalui tahapan analisis belanja, standar pelayanan minimal, standar harga satuan barang dan harga satuan pokok kegiatan atas komponen belanja tiap kegiatan, sehingga dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Kubu Raya, pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaran urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja yang kurang strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) harus diminimalisir.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah

Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya khususnya Tahun 2019-2024, dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Masa lalu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2014-2018 berdasarkan data kinerja keuangan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	PENDAPATAN	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25	1.404.723.995.630,05	1.577.257.039.764,53	9,73%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	97.407.483.796,39	86.469.772.434,38	101.310.299.207,01	152.023.127.898,99	184.531.274.752,15	19,34%
1.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah	64.729.599.444,05	54.285.086.430,52	67.629.094.584,60	113.686.725.465,28	133.593.217.033,31	23,51%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	25.180.126.655,62	6.003.747.900,46	6.645.572.802,78	10.900.974.165,00	9.374.653.868,50	-3,86%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	563.736.663,41	1.724.724.757,82	2.117.382.258,00	3.341.143.372,00	4.118.712.047,00	77,44%
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	6.934.021.033,31	24.456.213.345,58	24.918.249.561,63	24.094.284.896,71	37.444.691.803,34	76,67%
1.2.	Dana Perimbangan	841.715.445.482,00	891.952.775.958,00	1.053.065.317.850,00	1.043.885.758.961,00	1.140.511.991.712,00	8,10%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.938.735.482,00	38.796.383.958,00	26.471.101.564,00	20.135.986.681,00	35.479.908.427,00	-3,69%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	787.062.196.000,00	779.055.508.000,00	782.647.725.000,00	2,89%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	120.386.150.000,00	239.532.020.286,00	244.694.264.280,00	322.384.358.285,00	44,89%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	155.718.914.640,91	315.389.815.779,10	231.965.072.896,24	208.815.108.770,06	252.213.773.300,38	21,72%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	2.962.933.000,00	67.074.250.000,00	98.965.072.896,24	58.439.043.075,06	56.703.146.267,38	541,85%
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.118.612.640,91	68.862.470.779,10	38.684.149.707,00	44.545.676.695,00	58.930.202.033,00	39,39%
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	170.479.095.000,00	77.211.484.000,00	-	-	-54,71%
1.3.4.	Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	8.974.000.000,00	12.478.800.000,00	-	-	39,06%
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	125.637.369.000,00	-	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	26.250.000.000,00	150,00%

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.6.	Dana Desa	-	-	-	98.330.389.000,00	110.330.425.000,00	12,20%
2.	BELANJA	1.095.222.447.811,57	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06	1.403.224.521.931,88	1.538.247.120.981,21	9,08%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	492.507.388.266,33	602.949.645.810,00	701.293.442.050,00	716.327.378.363,00	792.622.755.434,80	12,88%
2.1.1.	Belanja Pegawai	459.863.440.395,00	528.724.696.223,00	538.676.298.768,00	507.401.696.500,00	527.868.825.762,00	3,77%
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	128.166.666,80	0,00%
2.1.3.	Belanja Hibah	4.766.077.440,00	4.688.000.000,00	8.919.439.025,00	13.441.420.000,00	60.126.404.665,00	121,66%
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	2.961.527.608,33	1.271.525.585,00	825.199.000,00	1.295.000.000,00	1.612.500.000,00	-2,68%
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	8.184.404.600,00	14.040.314.328,00	71,55%
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	24.688.805.000,00	68.265.424.002,00	145.328.885.200,00	180.323.787.100,00	188.845.249.120,00	79,55%
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	227.537.823,00	-	7.543.620.057,00	5.681.070.163,00	1.294.893,00	-62,33%
2.2.	Belanja Langsung	602.715.059.545,24	705.508.334.130,00	611.503.004.876,06	686.897.143.568,88	745.624.365.546,41	6,15%
2.2.1.	Belanja Pegawai	48.813.960.114,00	44.464.306.041,00	46.120.205.650,00	57.085.914.400,00	74.048.888.650,00	12,08%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.298.581.264,00	294.845.345.559,00	264.535.097.640,06	373.637.834.631,88	355.491.404.098,41	22,41%
2.2.3.	Belanja Modal	312.815.279.985,00	366.198.682.530,00	300.847.701.586,00	256.173.394.537,00	316.084.072.798,00	1,94%
3.	PEMBIAYAAN	1.210.627.130,32	58.206.161.419,39	6.937.467.020,87	84.971.540.048,06	74.002.286.638,15	1432,94%
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87	90.481.710.048,06	86.002.286.638,15	180,98%
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00	5.510.170.000,00	12.000.000.000,00	238,80%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 9,73 persen, berasal dari:
 - a. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,34 persen, dari:
 - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014: Rp97.407.483.796,39
 - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015: Rp86.469.772.434,34
 - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016: Rp101.310.299.207,01
 - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017: Rp152.023.127.898,99
 - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018: Rp184.531.274.752,15,15
 - b. Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 8,10 persen, dari:
 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014: Rp841.715.445.482,00
 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2015: Rp891.952.775.958,00
 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2016: Rp1.053.065.317.850,00
 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2017: Rp1.043.885.758.961,00
 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2018: Rp1.140.511.991.71,00
 - c. Rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,72 persen, dari:
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014: Rp155.718.914.640,91
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015: Rp315.389.815.779,10
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016: Rp231.965.072.896,24
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017: Rp208.815.108.770,06
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018: Rp252.213.773.300,38
2. Rata-rata pertumbuhan Belanja sebesar 9,08 persen, berasal dari :
 - a. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 12,88 persen, dari:

- Belanja Tidak Langsung Tahun 2014: Rp492.507.388.266,33
- Belanja Tidak Langsung Tahun 2015: Rp602.949.645.810,00
- Belanja Tidak Langsung Tahun 2016: Rp701.293.442.050,00
- Belanja Tidak Langsung Tahun 2017: Rp716.327.378.363,00
- Belanja Tidak Langsung Tahun 2018: Rp792.622.755.434,80
- b. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 6,15 persen, dari:
 - Belanja Langsung Tahun 2014: Rp602.715.059.545,24
 - Belanja Langsung Tahun 2015: Rp705.508.334.130,00
 - Belanja Langsung Tahun 2016: Rp611.503.004.876,06
 - Belanja Langsung Tahun 2017: Rp686.897.143.568,88
 - Belanja Langsung Tahun 2018: Rp745.624.365.546,41
- 3. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan sebesar 143,94 persen, berasal dari:
 - a. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan sebesar 180,98 persen, dari:
 - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014: Rp8.210.627.130,32
 - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015: Rp61.617.261.419,39
 - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016: Rp43.560.545.650,87
 - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017: Rp90.481.710.048,06
 - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018: Rp86.002.286.638,15
 - b. Rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 238,80 persen, dari:
 - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2014: Rp7.000.000.000,00
 - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015: Rp3.411.100.000,00
 - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016: Rp36.623.078.630,00
 - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017: Rp5.510.170.000,00
 - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018: Rp12.000.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018 sebagian besar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah. Kedepannya diharapkan bahwa sumber pendapatan dapat dikembangkan melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD merupakan salah satu bentuk investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pendapatan daerah menjadi bertambah. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya

2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain
3. Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta
4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas
5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi PMA dan PMDN.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur (pemberi pinjaman) kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari Neraca Daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan rata-rata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1.927.576.942.888,64	1.856.551.691.794,80	2.112.568.599.035,70	2.307.753.195.190,84	6,18
1.1.	Aset Lancar	127.932.874.300,19	86.151.424.095,08	125.531.866.493,75	125.337.071.516,71	-0,68
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	61.617.261.419,39	43.562.487.842,87	80.520.135.381,06	86.008.294.706,15	
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	
1.1.3.	Piutang Pendapatan	41.498.285.752,65	50.050.936.528,72	53.822.391.776,45	38.055.625.912,46	
1.1.4.	Piutang Lainnya	17.439.152.505,00	8.817.501.213,20	12.021.756.173,20	4.326.900.786,72	
1.1.5.	Penyisihan Piutang	-	(25.120.741.735,78)	(29.208.399.424,33)	(11.183.331.405,58)	
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	-	896.867.373,72	988.429.809,72	1.541.792.195,86	
1.1.7.	Persediaan	7.378.174.623,15	7.944.372.872,35	7.387.552.777,65	6.587.789.321,10	
1.1.8.	Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	
1.2.	Investasi Jangka Panjang	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	48.623.078.630,00	54.123.078.630,00	78,60
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	48.623.078.630,00	54.123.078.630,00	
1.3.	Aset Tetap	1.782.740.813.533,47	1.750.214.221.060,73	1.837.853.469.624,45	1.540.124.428.246,55	-4,76
1.3.1.	Tanah	99.680.110.328,33	104.868.520.603,33	110.202.161.373,33	93.251.438.623,92	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	134.698.648.789,04	186.901.918.240,03	196.937.364.107,02	216.113.937.348,45	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	512.606.101.215,92	613.102.100.792,23	599.970.218.863,86	649.913.622.012,59	
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	983.350.620.132,32	1.204.411.971.508,66	1.416.793.229.880,66	970.242.941.581,94	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	35.190.450.694,99	45.039.184.863,99	45.341.640.502,99	53.487.656.469,99	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.214.882.372,87	19.025.298.650,00	10.924.866.650,00	31.998.248.521,11	
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	(423.134.773.597,51)	(542.316.011.753,41)	(474.883.416.311,45)	

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.4.	Dana Cadangan	-	-	-	-	0,00
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	
1.5.	Aset Lainnya	7.403.255.054,98	8.186.046.638,99	100.560.184.287,50	588.168.616.797,58	329,89
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	-	220.165.300,00	-	-	
1.5.2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	5.800.234.439,25	6.539.762.715,25	1.502.681.309,38	1.198.066.788,28	
1.5.4.	Aset Lain-Lain	1.603.020.615,73	1.426.118.623,74	99.057.502.978,12	586.970.550.009,30	
2	KEWAJIBAN	14.322.194.998,00	23.449.021.064,85	14.386.344.901,21	17.930.080.334,73	7,78
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	14.322.194.998,00	23.449.021.064,85	14.386.344.901,21	17.930.080.334,73	7,78
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	434.651.370,00	1.942.192,00	38.425.333,00	6.008.068,00	
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	8.333.333,33	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	381.381.525,85	349.430.729,21	493.026.671,40	
2.1.5.	Utang Beban/Utang Belanja	-	3.158.894.953,00	1.889.441.038,00	2.227.331.128,00	
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.887.543.628,00	19.906.802.394,00	12.109.047.801,00	15.195.381.134,00	
3	EKUITAS	1.913.254.747.890,64	1.833.102.670.729,95	2.098.182.254.134,49	2.289.823.114.856,11	6,17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan data pada Tabel 3.2. tersebut di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aset daerah dari Tahun 2014-2017 mencapai 6,18 persen, sedangkan kewajiban daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,78 persen, dan ekuitas rata-rata pertumbuhannya mencapai 6,17 persen.

Adapun analisis rasio keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Rasio Lancar	893,25%	367,40%	872,58%	699,03%
2	Rasio Quick	893,25%	367,40%	872,58%	662,29%
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,74%	1,26%	0,68%	0,78%
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,91%	1,28%	0,69%	0,78%
5	Rata-rata Umur Piutang	-	-	-	
6	Rata-rata Umur Persediaan	-	-	-	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah, harus mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak

pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak

ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2018 adalah data yang telah diaudit oleh BPK RI, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun APBD Kabupaten Kubu Raya masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik.

Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun Anggaran 2014	508.677.400.509,00	1.102.222.447.811,57	46,15
2	Tahun Anggaran 2015	573.189.002.264,00	1.311.869.079.940,00	43,69
3	Tahun Anggaran 2016	584.796.504.418,00	1.349.419.525.556,06	43,34
4	Tahun Anggaran 2017	564.487.610.900,00	1.408.734.691.931,88	40,07
5	Tahun Anggaran 2018	601.917.714.412,00	1.550.247.120.981,21	38,83

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 juga meningkat. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.4 tersebut di atas, menunjukkan bahwa persentase Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur:

- Tahun 2014 sebesar 46,15 persen
- Tahun 2015 sebesar 43,69 persen turun sebesar 2,46 persen dibandingkan tahun 2014
- Tahun 2016 sebesar 43,34 persen turun sebesar 0,36 persen dibandingkan Tahun 2015
- Tahun 2017 sebesar 40,07 persen turun sebesar 3,27 persen dibandingkan Tahun 2016
- Tahun 2018 sebesar 38,83 persen turun sebesar 1,24 persen dibandingkan tahun 2017

Jadi kecenderungan proporsi Belanja Aparatur turun dalam kurun waktu 2014-2018 rata-rata sebesar 1,83 persen.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25	1.404.723.995.630,05	1.577.257.039.764,53
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.095.222.447.811,57	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06	1.403.224.521.931,88	1.538.247.120.981,21
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00	5.510.170.000,00	12.000.000.000,00
	Defisit Riil	(7.380.603.892,27)	(18.056.715.768,52)	36.921.164.397,19	(4.010.696.301,83)	27.009.918.783,32

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-111,25%	-341,24%	117,98%	-2256,01%	318,41%
2.	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-249,33	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 3.6. tersebut di atas, diketahui bahwa komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2014-2018 hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang persentase kontribusi menutupi defisit anggaran berfluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar -111,25 persen menurun pada Tahun 2015 sebesar -341,24 persen, meningkat menjadi 117,98 persen pada Tahun 2016, menurun tajam menjadi -2.256,01 persen pada Tahun 2017 dan di Tahun 2018 kontribusinya meningkat menjadi 318,41 persen.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang

terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

Adapun realisasi SiLPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kubu Raya

No.	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	43.560.545.650,87	100,00	80.481.710.048,06	100,00	86.008.294.706,15	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(35.327.272.303,48)	-81,10	(32.178.730.903,27)	-39,98	-	0,00
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(29.380.125.578,00)	-67,45	(23.168.993.141,06)	-28,79	-	0,00
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	68.767.559.189,24	157,87	59.092.777.484,06	73,42	-	0,00
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	Kegiatan Lanjutan	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 3.7. tersebut di atas, Tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi SiLPA. Terhitung SiLPA Tahun 2016 berjumlah Rp43.560.545.650,87, pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp80.481.710.048,06, dan Tahun 2018 meningkat menjadi Rp86.008.294.706,15.

3.3. Kerangka Pendanaan

Gambaran kerangka pendanaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam RPJMD Perubahan ini menggunakan analisis tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2014-2018 sebagai dasar estimasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2024.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Realisasi dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8. dan Tabel 3.9. sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun (2020) *)
1.	PENDAPATAN	1.533.365.324.188,15	1.477.079.359.390,54
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	172.841.166.395,36	151.008.894.728,78
1.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah	126.455.410.972,73	108.258.139.705,97
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.860.087.470,00	6.535.379.088,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.814.712.897,00	4.148.708.997,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	34.710.955.055,63	32.066.666.937,81
1.2.	Dana Perimbangan	1.084.951.262.629,00	964.995.503.675,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.944.680.500,00	24.628.649.807,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	810.858.494.000,00	726.710.379.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	251.148.088.129,00	213.656.474.868,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	275.572.895.163,79	361.074.960.986,76
1.3.1.	Pendapatan Hibah	70.300.626.490,79	93.442.321.273,76
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.990.735.473,00	73.961.016.713,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
1.3.4.	Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	10.482.860.000,00	193.671.623.000,00
1.3.6.	Dana Desa	131.658.673.200,00	-
2.	BELANJA	1.580.265.429.953,77	1.487.430.828.191,27
2.1.	Belanja Tidak Langsung	794.927.858.913,59	795.728.523.684,81
2.1.1.	Belanja Pegawai	549.026.260.713,59	542.278.362.971,81
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-
2.1.3.	Belanja Hibah	12.455.610.000,00	21.011.558.000,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.876.400.000,00	993.300.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun (2020) *)
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	12.213.858.500,00	11.176.172.675,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	219.355.729.700,00	211.129.940.600,00
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	0,00	9.139.189.438,00
2.2.	Belanja Langsung	785.337.571.040,18	691.702.304.506,46
2.2.1.	Belanja Pegawai	83.302.724.300,00	98.177.916.884,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.405.558.028,42	453.140.817.627,53
2.2.3.	Belanja Modal	205.629.288.711,76	140.383.569.994,93
3.	PEMBIAYAAN	74.002.286.638,15	62.078.310.356,79
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.002.286.638,15	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tabel 3.9.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.425.563.846.863,00	1.412.283.397.517,00	1.563.636.526.550,93	1.682.941.993.526,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.800.238.390,00	160.877.537.935,00	178.118.637.561,71	191.709.089.607,67
4.1.01	Pajak Daerah	115.401.417.867,00	115.401.417.867,00	127.768.883.008,79	137.517.648.782,36
4.1.02	Retribusi Daerah	7.895.216.750,00	7.972.516.295,00	8.826.923.625,46	9.500.417.898,08
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.643.414.250,00	4.643.414.250,00	5.141.044.737,88	5.533.306.451,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.860.189.523,00	32.860.189.523,00	36.381.786.189,57	39.157.716.475,84
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.264.763.608.473,00	1.251.405.859.582,00	1.385.517.888.989,22	1.491.232.903.919,09
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.772.873.000,00	1.182.772.873.000,00	1.309.529.567.569,75	1.409.446.673.575,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.990.735.473,00	68.632.986.582,00	75.988.321.419,46	81.786.230.343,77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.425.563.846.863,00	1.412.283.397.517,00	1.563.636.526.550,93	1.682.941.993.526,76
5	BELANJA	1.588.942.509.194,00	1.589.950.239.933,00	1.760.419.642.222,89	1.894.739.660.924,19
5.1	BELANJA OPERASI	1.129.453.607.516,00	1.129.453.607.516,00	1.250.550.027.109,08	1.345.966.994.177,50
5.1.01	Belanja Pegawai	592.710.672.045,00	592.710.672.045,00	656.259.223.098,03	706.331.801.820,41
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.413.129.471,00	515.413.129.471,00	570.674.084.126,29	614.216.516.745,13
5.1.05	Belanja Hibah	20.334.600.000,00	20.334.600.000,00	22.514.811.066,19	24.232.691.150,54
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	995.206.000,00	995.206.000,00	1.101.908.818,56	1.185.984.461,42

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5.2	BELANJA MODAL	228.338.257.001,00	228.338.257.001,00	257.356.041.962,68	277.068.607.964,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.0000.000,00	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	226.150.644.677,00	227.158.375.416,00	251.513.573.151,13	270.704.058.782,56
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.329.662.677,00	12.337.393.416,00	13.660.169.455,76	14.702.440.385,23
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	214.820.982.000,00	214.820.982.000,00	237.853.403.695,37	256.001.618.397,33
	Jumlah Belanja	1.588.942.509.194,00	1.589.950.239.933,00	1.760.419.642.222,89	1.894.739.660.924,19
	Total Surplus/(Defisit)	(163.378.662.331,00)	(177.666.842.416,00)	(196.783.115.671,96)	(211.797.667.397,43)
6	PEMBIAYAAN	163.378.662.331,00	177.666.842.416,00	196.783.115.671,85	211.797.667.397,62
6.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163.378.662.331,00	177.666.842.416,00	195.383.115.671,85	209.797.667.397,62
6.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.400.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	163.378.662.331,00	177.666.842.416,00	196.783.115.671,85	211.797.667.397,62
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	1.588.942.509.194,00	1.589.950.239.933,00	1.759.019.642.222,78	1.892.739.660.924,38

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.9. di atas, proyeksi dilakukan berdasarkan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa secara umum proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2024 kecenderungan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,63 persen. Proyeksi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan Kabupaten Kubu Raya termasuk pertumbuhan ekonomi yang berada di atas Provinsi dan Nasional, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, daerah perbatasan, terdepan, terluar dan daerah terpencil. Disamping itu juga untuk Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya difokuskan pembangunan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pemukiman dan perumahan sehingga alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat meningkat yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Tetapi pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan APBD yang dikarenakan Pandemi Covid-19, yang berdampak sangat besar terhadap penerimaan pendapatan. Sedangkan pada Tahun 2022-2024 APBD diproyeksikan kembali ke kondisi normal.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui gambaran perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2014-2019.

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.591.088.970.504,62	1.425.563.846.863,00	1.412.283.397.517,00	1.563.636.526.550,93	1.682.941.993.526,76
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	1.591.088.970.504,62	1.425.563.846.863,00	1.412.283.397.516,00	1.563.636.526.550,93	1.682.941.993.526,76
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	892.322.439.741,30				
5	Belanja Pegawai		592.710.672.045,00	592.710.672.045,00	656.259.223.098,03	706.331.801.820,41
6	Belanja Hibah		20.334.600.000,00	20.334.600.000,00	22.514.811.066,19	24.232.691.150,54
7	Belanja Bantuan Sosial		995.206.000,00	995.206.000,00	1.101.908.818,56	1.185.984.461,42
8	Belanja Tidak Terduga		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
9	Belanja Transfer		226.150.644.677,00	227.158.375.416,00	251.513.573.151,13	270.704.058.782,56
10	Pengeluaran Pembiayaan	7.311.104.457,09	0,00	0,00	1.400.000.000,00	2.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	691.455.426.306,23	580.372.724.141,00	566.084.544.055,00	629.847.010.417,02	677.487.457.311,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.10. tersebut di atas, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai Rp691.455.426.306,23, pada tahun 2021 sebesar Rp580.372.724.141,00, pada tahun 2022 sebesar Rp566.084.544.055,00, pada tahun 2023 sebesar Rp629.847.010.417,02 dan pada tahun 2024 sebesar Rp677.487.457.311,83.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2020-2024 yang sangat terbatas tersebut, diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung Bupati bersama SKPD terkait yang dikelompokkan ke dalam dua prioritas. Prioritas I digunakan untuk membiayai tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah. Prioritas I ini juga membiayai program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar, serta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi daerah. Sedangkan Prioritas II digunakan untuk membiayai yang berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	691.455.426.306,23	580.372.724.141,00	566.084.544.055,00	629.847.010.417,02	677.487.457.311,83
	Prioritas I	542.278.362.971,81	452.690.724.829,98	441.545.944.362,90	491.280.668.125,27	528.440.216.703,22
	Prioritas II	140.383.569.994,93	127.681.999.311,02	124.538.599.692,10	138.566.342.291,75	149.047.240.608,61

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya tidak lepas dari berbagai isu strategis daerah yang mendasari suatu gagasan untuk menganalisis kondisi-kondisi daerah menuju pada perbaikan ke arah yang lebih baik. Analisis isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya diuraikan berdasarkan masukan berbagai unsur perencanaan serta kajian sinergitas dan keterkaitan berbagai elemen daerah.

Perubahan RPJMD diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan saat ini dan di masa mendatang dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dalam dua tahun sisa dari periode 5 (lima) tahun RPJMD. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap permasalahan pembangunan, baik yang dihadapi saat ini maupun berpotensi terjadi di masa depan merupakan suatu prasyarat penting dalam perencanaan yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi isu-isu strategis ataupun sebagai dasar untuk merespons isu-isu tersebut.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diharapkan (*gap expectation*). Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah; sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional, isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 juga

terdapat isu besar mengenai adanya wabah virus Covid-19 di tahun 2020, sehingga perencanaan yang dibuat mengantisipasi terjadinya virus dan dampak yang diakibatkan pasca berakhirnya virus terutama perbaikan perekonomian dan target-target capaian di tahun 2022, 2023 dan 2024. Di Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.237 orang dimana 1.031 orang dinyatakan sembuh dan 33 orang diantaranya meninggal. Jika dilihat dari perkembangan kasus di Kabupaten Kubu Raya maka sebanyak 83,35 persen dari total kasus terkonfirmasi sembuh sehingga ada keoptimisan pemerintah daerah dapat melakukan recovery ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Rincian permasalahan pembangunan yang dipilah menjadi beberapa urusan, seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus, penjabaran keempatnya disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Permasalahan Pembangunan

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	1. Masih adanya kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		2. Belum adanya pemerataan guru antar sekolah maupun antar wilayah
		3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		4. Tidak memadainya aksesibilitas siswa dan guru dari dan ke lokasi pendidikan di daerah terpencil, di samping itu tidak tersedianya sarana angkutan maupun akomodasi guru dan siswa
		5. Belum adanya konsep dan strategi penanganan yang komprehensif dalam mengatasi siswa putus sekolah, termasuk penyediaan lembaga kursus yang memberdayakan dan meningkatkan keterampilan hidup
		6. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan
		7. Masih kurang berkualitasnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
		8. Tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap yang masih rendah
		9. Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
		10. Masih kurangnya pengembangan pembinaan karakter siswa
		11. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>12. Pembinaan minat dan bakat siswa belum dilakukan secara berkesinambungan</p> <p>13. Belum adanya dukungan yang optimal bagi siswa miskin</p> <p>14. Belum optimalnya peran PKBM dalam mendukung pendidikan non formal</p>
2	Urusan Kesehatan	<p>1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal</p> <p>2. Rasio dokter/tenaga medis dan Paramedis masih kurang</p> <p>3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah</p> <p>4. Kurang memadainya alat kesehatan</p> <p>5. Kondisi/bangunan fisik sarana kesehatan yang belum memadai</p> <p>6. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat</p> <p>8. Belum optimalnya promosi dan advokasi kesehatan</p> <p>9. Tingginya keluhan masyarakat terhadap kualitas dan intensitas pelayanan kesehatan pada setiap satuan pelayanan</p> <p>10. Rendahnya etos kerja dan motivasi tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di pulau ataupun di daerah terpencil</p>
3	Urusan Pekerjaan Umum	<p>1. Jalan dan Jembatan</p> <p>a. Rasio jalan dan jembatan dalam kondisi rusak yang masih banyak dan belum tertangani</p> <p>b. Belum optimalnya penanganan jalan/jembatan Poros Kabupaten dan jalan/jembatan lingkungan</p> <p>2. Drainase</p> <p>a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting</p> <p>b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai)</p> <p>c. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase dalam skala kawasan.</p> <p>3. Irigasi/Rawa</p> <p>a. Kurangnya sinergisitas penanganan masalah-masalah irigasi/rawa antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta antar OPD dalam Kabupaten</p> <p>b. Masih terbatasnya perawatan saluran Irigasi/Rawa Kabupaten</p> <p>c. Kurangnya SDM/pengawas dan kelembagaan terkait pengaturan dan perawatan irigasi/rawa</p> <p>4. Air Minum</p> <p>a. Cakupan pelayanan air minum perkotaan masih rendah</p> <p>b. Di musim kemarau panjang terjadi kedangkalan dan intrusi air baku</p> <p>c. Keterbatasan sumber air perdesaan di beberapa desa</p> <p>d. Belum optimalnya penguatan kelembagaan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di desa</p> <p>5. Persampahan</p> <p>a. Belum optimalnya penanganan pengangkutan dan pengelolaan sampah</p>

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Belum adanya Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) untuk mengurangi volume sampah c. TPA yang ada masih bersifat open dumping d. Belum optimalnya kewenangan kecamatan dalam pengelolaan kebersihan berbasis partisipatif
		6. Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik baru maupun perubahan fungsi/fisik b. Belum diimplementasikannya pengendalian Bangunan Gedung (Perda Bangunan Gedung)
		7. Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kepemilikan fasilitas pengolahan air limbah setempat yang layak b. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi, persentase desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>) masih rendah c. Belum adanya penerapan teknologi untuk penanganan air limbah di daerah pesisir d. Belum ada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
		8. Air Baku <ul style="list-style-type: none"> a. Air Permukaan <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) b. Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pengendalian pemanfaatan air tanah
4	Urusan Penataan Ruang	1. Masih belum tersusunnya RDTRK dan Peraturan Zonasi pada kawasan yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya 2. Masih belum tersusunnya RDTRK pada kawasan strategis daerah, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya 3. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya 4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM tata ruang 5. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya 4. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang 5. Tingginya potensi alih fungsi lahan dan adanya kendala terkait dengan aturan tata ruang (misalnya aturan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) 6. Minimnya Ruang Terbuka Hijau 7. Belum tertibnya pengendalian Ruang Terbuka Non Hijau
5	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh 2. Rendahnya daya dukung sarana dan prasarana wilayah permukiman

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi 4. Masih adanya bangunan-bangunan liar di daerah sempadan sungai dan sempadan jalan 5. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman 6. Belum adanya tindakan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Produk Hukum Daerah 2. Masih tingginya pelanggaran ketertiban umum 3. Belum efektifnya peran lembaga swakarsa masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 4. Belum tersedianya <i>Early Warning System</i> di daerah rawan bencana (kebakaran hutan dan lahan)
7	Urusan Sosial	1. Belum optimalnya penerapanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)/Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 2. Masih rendahnya keterampilan/keahlian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3. Verifikasi dan validasi data Basis Data Terpadu (BDT) belum optimal 4. Masih terbatasnya penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) 5. Masih rendahnya perhatian dan penanganan atas penduduk lanjut usia 6. Belum maksimalnya penanganan pasca bencana secara terpadu 7. Masih minimnya sarana dan prasarana penanganan pasca bencana 8. Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pasca bencana belum memadai dan terlatih 9. Belum berkembangnya kelembagaan di masyarakat yang turut membantu penanganan pasca bencana 10. Masih minimnya penanganan dan pemberdayaan kaum disabilitas
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Meningkatnya angka pengangguran 2. Belum tersedianya Balai Pelatihan Kerja 3. Belum adanya data lengkap ketenagakerjaan yang didukung sistem. 4. Belum adanya rencana strategi yang komprehensif bagi penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 5. Terbatasnya lapangan kerja yang variatif 6. Masih minimnya upaya kesehatan dan keselamatan tenaga kerja
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih rendahnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender 2. Pengarusutamaan gender masih lemah 3. Belum optimalnya implementasi data terpilah dalam pengarusutamaan gender

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih terbatas
		5. Advokasi terhadap perempuan rentan masih rendah
		6. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam ketahanan rumah tangga
		7. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
		8. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak
3	Urusan Pangan	1. Belum optimalnya pengelolaan pangan non beras
		2. Penggunaan alat teknologi pangan masih rendah
		3. Belum meratanya pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
		4. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Kabupaten
		5. Minimnya pengendalian harga bahan pangan yang sering fluktuatif
4	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih sering muncul sengketa atas tanah dan masalah sertifikat ganda terkait dengan kepemilikan tanah di tingkat desa dan kabupaten/kota
		3. Masih rendahnya peran lembaga dan institusi yang berwenang dalam legalitas dan keabsahan serta koordinasi lintas lembaga dari desa, kecamatan dan kabupaten
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penerapan regulasi dalam pelestarian lingkungan hidup
		2. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin kurang terkontrol
		3. Kondisi kultur agronomi dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
		4. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut
		5. Belum adanya SDM yang bersertifikasi auditor lingkungan hidup
		6. Belum diwujudkannya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan
		2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan
		3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemerintah Desa
		2. Pembinaan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di tingkat desa masih kurang
		3. Jumlah status Desa Mandiri dan Desa Maju masih relatif sedikit dibandingkan Desa Berkembang dan Desa Tertinggal

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Belum optimalnya penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa secara partisipatif dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
		5. Masih banyaknya sengketa batas Desa
		6. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)
		7. Belum optimalnya pengelolaan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan desa
		8. Belum maksimalnya pendataan dan pengelolaan aset desa
		9. Belum optimalnya perencanaan, pemetaan dan pengembangan potensi desa
		10. Belum optimalnya penyusunan Produk Hukum Desa
		11. Belum optimalnya partisipasi <i>stakeholder</i> dan analisa masalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes
		12. Tidak proporsionalnya alokasi program, kegiatan dan penganggaran terhadap urusan-urusan desa
		13. Belum maksimalnya implementasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
		14. Belum optimalnya hubungan kerjasama antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung pemerintahan desa sesuai dengan peran dan fungsinya
		15. Belum maksimalnya pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes)
		16. Terbatasnya sarana dan prasarana desa
		17. Minimnya kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, dengan mengembangkan berbagai sentra produksi berdasarkan potensi unggulan lokal
		18. Terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan perkantoran desa yang terkoneksi secara teknologi baik sistem kerja maupun jaringan komunikasi dan teknologi informasi
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Cakupan layanan dan intervensi program KB yang menyentuh bagi keluarga miskin dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada peningkatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera
		2. Belum ditetapkan standar klinis pelayanan KB yang harus diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ataupun yang harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, termasuk tubektomi interval
		3. Belum berkembangnya kelompok masyarakat peduli KB yang diharapkan dapat memfasilitasi dan menopang program pemerintah
		4. Kurangnya sarana dan prasarana serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja 6. Belum optimalnya komitmen dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan kampung KB yang mempromosikan dan melaksanakan manajemen keluarga berencana secara holistic 7. Belum adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan
9	Urusan Perhubungan	1. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, dan perdesaan 2. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, serta tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah 3. Kuantitas dan kualitas jalan masih belum memadai terutama di daerah terpencil dan ke sentra-sentra produksi 4. Tingginya potensi daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb 5. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil 6. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen andalalin yang dimiliki
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah 3. Pelayanan jaringan komunikasi belum merata, akses jaringan komunikasi antar desa masih terbatas 4. Kapasitas media lokal sebagai sarana informasi bagi masyarakat masih terbatas, selain itu penguasaan Teknologi Informasi masih rendah 5. Belum seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki penguasaan komprehensif tentang TIK 6. Masih terbatasnya sarana pendukung untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ <i>Smart City</i>
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Masih tingginya ketergantungan usaha mikro, kecil, dan koperasi pada bantuan pemerintah 2. Masih banyaknya koperasi yang tidak berlegalitas 3. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM 4. Sulitnya akses permodalan usaha terutama untuk usaha mikro dan kecil, serta koperasi, sehingga menyulitkan mereka mengakses ke lembaga keuangan

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Sarana dan Prasarana IT untuk pengelolaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas
		6. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM
12	Urusan Penanaman Modal	1. Adanya prosedur perijinan investasi yang belum kondusif dan menghambat kegiatan investasi dan operasional dunia usaha yang berimbas pada daya saing investasi daerah
		2. Belum optimalnya promosi investasi daerah
		3. Masih lemahnya koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi daerah
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
		2. Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik
		3. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai
		4. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan
14	Urusan Statistik	1. Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang <i>update</i> dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan
		2. Lemahnya kontribusi data institusi yang didukung dengan kurangnya kompetensi aparatur terhadap ketersediaan data
		3. Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan Kabupaten Kubu Raya disertai kemudahan akses dan distribusinya
15	Urusan Persandian	1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM persandian
		2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian
16	Urusan Kebudayaan	1. Kurikulum pada institusi pendidikan belum memberi bobot yang besar pada pengembangan kebudayaan dan kesenian lokal
		2. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah
		3. Minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal relatif rendah
		4. Relatif terbatasnya kuantitas dan kualitas sanggar seni
17	Urusan Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
		2. Masih terbatasnya berbagai literatur dan sarana penunjang keperpustakaan
		3. Kurang terorganisirnya perpustakaan sesuai dengan aturan kearsipan
		4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah
		5. Kurangnya tenaga fungsional Pustakawan
18	Urusan Kearsipan	1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip daerah
		2. Kurangnya tenaga fungsional Arsiparis
		3. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
III	URUSAN PILIHAN	
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data potensi perikanan yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya terutama disebabkan oleh penjualan ilegal nelayan lokal dan <i>illegal fishing</i> 2. Terbatasnya penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) yang lebih maju 3. Belum memadainya peralatan pendukung usaha perikanan, seperti kapal penangkap yang representatif, sarana pasar untuk komoditas perikanan, <i>cold storage</i>, dan pabrik pengolahan hasil perikanan 4. Masih rendahnya produksi perikanan 5. Masih terdapatnya bantuan operasional nelayan yang salah sasaran 6. Pembinaan dan pendampingan bagi nelayan belum berlangsung secara berkelanjutan 7. Masih rendahnya konsumsi ikan di masyarakat 8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan
2	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kunjungan wisatawan manca negara di Kabupaten Kubu Raya 2. Objek-objek wisata belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal 3. Belum memadainya utilitas dan infrastruktur pariwisata sesuai standar di berbagai destinasi pariwisata 4. Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modal pada bisnis pariwisata di Kabupaten Kubu Raya 5. Masih lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku bisnis pariwisata, baik yang ada di Kabupaten Kubu Raya maupun di luar daerah 6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosi pariwisata Kabupaten Kubu Raya
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tata kelola air 2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna, baik untuk kegiatan sebelum panen, saat panen, dan pasca panen untuk menunjang produktivitas pertanian 3. Masih terdapat kendala dalam pemasaran hasil pertanian dan perkebunan secara berkesinambungan 4. Keterlibatan pihak perbankan untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan masih sangat rendah, terkait risiko bisnis dan persoalan teknis lapangan 5. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit <i>zoonosis</i> 6. Pembinaan dan pendampingan bagi petani belum berlangsung secara berkelanjutan 7. Belum adanya rencana aksi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan peternakan

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		8. Belum terinventarisasi data lahan pertanian sebagai dasar penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4	Urusan Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis Kabupaten 2. Belum terimplementasikannya penetapan 13 (tiga belas) kawasan perhutanan sosial 3. Masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan pengamanan hutan
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Masih lemahnya data potensi, eksplorasi dan eksploitasi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kubu Raya 2. Insentif untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai sementara disinsentif untuk pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi energi dan konservasi energi belum dilaksanakan secara konsisten 3. Pasokan listrik PLN bagi konsumen belum optimal (kurang tersedianya listrik di daerah terpencil) 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik
6	Urusan Perdagangan	1. Belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan di setiap kecamatan 2. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta pengembangan keunggulan lokal 3. Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif 4. Kurang terintegrasinya promosi perdagangan produk unggulan baik dari sisi hulu hilir 5. Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) 6. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pasar lokal
7	Urusan Perindustrian	1. Masih lemahnya daya saing industri daerah 2. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif 3. Dalam pembinaan industri kecil dan menengah belum berkembangnya keterampilan tenaga kerja, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi, dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik 4. Agroindustri yang ada belum kreatif dan inovatif untuk membuat produk-produk turunan yang lebih bervariasi dari komoditas unggulan yang dimiliki 6. Belum adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 7. Masih rendahnya produk industri kecil menengah yang memperoleh fasilitas HaKI
8	Urusan Transmigrasi	1. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) sering mengabaikan penyelesaian legalitas lahan dan persetujuan masyarakat, sehingga berpotensi menjadi masalah hukum atas kepemilikan lahan

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Kurangnya koordinasi lintas lembaga serta sosialisasi dan pemahaman terkait dengan program transmigrasi sehingga sering menimbulkan multitafsir seperti halnya pembebasan lahan; tuntutan ganti rugi tanah atas lahan transmigrasi oleh masyarakat
IV	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
1	Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi (dari sektor bahan galian dan jual beli tanah serta bangunan) 2. Belum tergalinya potensi penerimaan daerah lainnya 3. Masih rendahnya kesiapan SDM dan kelembagaan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak yang dialihkan pemerintah pusat ke daerah 4. Masih minimnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum terbentuknya BUMD

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 disebutkan bahwa isu strategis nasional adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sumber daya alam
2. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
3. Transformasi struktural berjalan lambat
4. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital

4.2.2. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dirumuskan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

1. Perlambatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berasal dari penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus dan terjadinya penurunan permintaan ekspor akan barang dari luar negeri
2. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran
3. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah
4. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian

5. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan
6. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi
7. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal
8. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah

4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Kubu Raya

Isu-isu strategis merupakan acuan pemerintah dalam penentuan prioritas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Penetapan isu-isu strategis Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada analisis kondisi aktual dan permasalahan-permasalahan saat ini maupun yang berpotensi muncul di masa depan. Penetapan ini juga mengakomodasi isu-isu strategis dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang relevan dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya.

Dari penjabaran permasalahan pembangunan di Kubu Raya secara umum yang dijabarkan berdasarkan urusan, kemudian dilakukan penapisan melalui kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kondisi riil masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan KLHS difokuskan pada pencapaian tujuan *Sustainability Development Goals (SDG's)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS merupakan suatu kajian dampak dari sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Oleh karena itu, hasil dari kajian ini bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian Lingkungan KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Untuk Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 masih menggunakan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 karena data kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup masih relevan untuk digunakan.

Ketercapaian indikator tujuan *Sustainability Development Goals* (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
di Kabupaten Kubu Raya

No.	Tujuan	Indikator	Pencapaian Indikator TPB		
			Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, dimanapun	18	5	8	5
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	10	8	2	0
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	26	9	8	9
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	9	2	6	1
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	6	3	3	0
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	12	1	7	4
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	3	2	0	1
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	9	2	5	2
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	8	3	1	4
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	9	4	0	5
11.	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	11	0	1	10
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	1	2	2
13.	Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	2
14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2	0	2	0

No.	Tujuan	Indikator	Pencapaian Indikator TPB		
			Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
15.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	3	1	2	0
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	12	5	4	3
17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	4	2	0	2
	Total	149	48	51	50

Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) indikator di 17 (tujuh belas) tujuan tersebut, 48 (empat puluh delapan) indikator tercapai (32,21 persen), 51 (lima puluh satu) indikator tidak tercapai (34,22 persen) dan 50 (lima puluh) indikator tidak tersedia datanya (33,56 persen). Tingginya angka indikator tujuan TPB yang tidak tercapai kemungkinan terkait kewenangan, dimana beberapa indikator dalam tujuan TPB bukan kewenangan Kabupaten sehingga sulit bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan intervensi lebih jauh.

Adapun permasalahan yang berasal dari kondisi riil Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Kemiskinan

Dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2020. Terlihat pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya sebesar 4,74 persen, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,42 persen. Menurun 0,32 poin dari tahun 2019. Atau jumlah penduduk miskin tahun 2020 tinggal sebesar 25,90 ribu jiwa. Menurun 1.470 jiwa terhadap tahun 2019.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah angka Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,19 dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,17 persen.

Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Kubu Raya lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun angka kemiskinan yang masih berada di atas 4 persen antara lain disebabkan oleh:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terjangkau secara optimal
- b. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin
- c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin
- d. Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah

2. Permasalahan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,04 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 5,62 persen. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Jumlah pengangguran di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 sebesar 7,14 persen, meningkat 1,52 persen dari tahun 2019. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya menduduki peringkat kelima tingkat Pengangguran Terbuka setelah Kabupaten Mempawah sebesar 7,55 persen, Kabupaten Ketapang sebesar 7,30 persen, Kota Singkawang 8,78 persen, dan peringkat tertinggi yaitu Kota Pontianak sebesar 12,36 persen.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pengangguran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan jumlah pengangguran di Kabupaten Kubu Raya pada 2020 sebesar 1,52 persen dari tahun 2019. Kondisi ini tidak lebih buruk dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya seperti Kabupaten Mempawah naik sebesar 2,36 persen, Kota Singkawang sebesar 2,34 persen, serta kenaikan tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 3,23 persen.

3. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah

Masalah utama dalam meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain:

- a. Pertumbuhan PDRB
- b. PDRB Per Kapita

- c. Laju Inflasi
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas jika tidak segera dikelola secara *komprehensif*, maka baik langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada lemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan, yang akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan pada akhirnya akan melemahkan daya saing pemerintah daerah.

4. Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar yang dimaksud di sini adalah fasilitas jalan, jembatan, dermaga dan irigasi. Di Kabupaten Kubu Raya, dermaga masuk menjadi kelompok infrastruktur dasar karena wilayahnya yang didominasi oleh wilayah pesisir. Irigasi juga masuk dalam kelompok infrastruktur dasar tidak hanya karena masyarakatnya mayoritas petani, tapi juga karena wilayahnya didominasi lahan gambut yang memerlukan tata air yang baik.

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan, jembatan dan dermaga tidak hanya membuka keterisolasian masyarakat di wilayah pedalaman, tapi juga menjadi faktor penting dalam rantai pemasaran produk-produk desa. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih dalam kondisi belum memadai.

Pertumbuhan jalan masih sangat lambat secara umum. Penambahan ruas jalan baru per tahun hanya 100 km, tidak berimbang dengan pertambahan jumlah kendaraan. Demikian pula dengan pertambahan jumlah jembatan. Jembatan menjadi salah satu sarana infrastruktur vital di Kabupaten Kubu Raya mengingat kondisi wilayah yang memiliki banyak sungai dan anak sungai.

Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara umum. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya telah dibagi posisi masing-masing kecamatan dan desa dalam tata struktur wilayah. Hal tersebut hendaknya menjadi acuan bagi perencana dalam meletakkan fasilitas-fasilitas infrastruktur sesuai tingkatan struktur wilayah sehingga tidak terjadi kesalahan perencanaan dan wilayah-wilayah yang direncanakan menjadi wilayah pendorong atau pemicu bagi wilayah

sekitarnya dapat dicapai. Dengan demikian efisiensi penganggaran dapat dioptimalkan.

5. Permasalahan di Bidang Pelayanan Dasar

Masalah pokok di bidang pembangunan kemasyarakatan adalah masih belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat. Jenis layanan dasar masyarakat terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Di bidang pendidikan, pemerataan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu isu utama. Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terbagi antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan membuat disparitas ketersediaan fasilitas pelayanan dasar terlihat lebih mencolok. Fasilitas dan tenaga pendidik terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan sedangkan di daerah perdesaan masih kekurangan keduanya.

Di bidang kesehatan, sarana kesehatan sudah cukup memadai dari segi fisik gedung pelayanan. Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type D, dan juga terdapat beberapa rumah sakit vertikal milik TNI dan beberapa klinik swasta, bahkan puskesmas yang ada di Kecamatan juga sudah berfungsi sebagai Puskesmas Rawat Inap. Hanya masalah tenaga kesehatan terutama dokter/dokter spesialis yang belum merata, demikian pula dengan prasarana unit kesehatan standar seperti pelayanan USG bagi ibu hamil atau pun sarana X Ray atau alat-alat laboratorium di puskesmas-puskesmas di kecamatan, fasilitas kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular terutama Covid-19 juga masih perlu banyak penambahan.

Penyakit menular juga menjadi salah satu permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Kubu Raya. Penyakit-penyakit menular ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kabupaten Kubu Raya, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (Covid-19) yang tertular dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya atau penularan dari warga yang berkunjung dari kota lain, antara lain:

- a. Penyakit menular potensial mewabah: diare, demam berdarah (*dengue*), dan malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor, konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi, dan kebiasaan sebagian kecil masyarakat yang masih menerapkan budaya

- buang air besar (BAB) di sungai sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Penyakit menular endemik tinggi: tuberkulosis paru, di mana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
 - c. Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit: penyakit menular seksual, sifilis (raja singa), gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
 - d. Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan secara khusus Kabupaten Kubu Raya mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun *Work From Home* (WFH) maupun *School From Home* (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan sosial (*social distancing*) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatas sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan sosial meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi Covid-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang membuat urusan ketataruangan di Kabupaten Kubu Raya sedikit terlambat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Perda Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya baru ditetapkan pada tahun 2016 dan saat ini belum memiliki peraturan detail tata ruang (RDTR).

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, saat ini urusan tata ruang di Kabupaten Kubu Raya baru berada di tahapan perencanaan dan mulai bergerak pada tahapan pemanfaatan. Sedangkan

tahapan pengendalian masih sangat rendah dan hampir tidak tersentuh. Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pada tahun 2014 yang berkedudukan di BAPPEDA, dan sejak tahun 2019 berganti menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) berkedudukan di Dinas PUPRPRKP. Tim ini merupakan tim *ad hoc* yang dibentuk untuk membahas persoalan-persoalan tata ruang di tingkat kabupaten.

Di bidang sosial, kemiskinan juga merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Dimana kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi, dimana hal ini juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

6. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah merupakan faktor utama pendukung kegiatan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dan terjadinya *loss of income* pada sektor bahan galian dan BPHTB. Hal ini menyebabkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal

394 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

7. Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Kualitas kelestarian lingkungan hidup harus tetap dijaga dalam kerangka mencegah dan mengendalikan kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) dari dampak aktivitas sosial perekonomian. SDA Kabupaten Kubu Raya yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

a. *Mangrove*

Ekosistem *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya terus menerus mengalami penurunan. *Mangrove* yang memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengurangi emisi karbon dan penahan abrasi pantai mutlak harus dilindungi. Meskipun Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW-nya, namun upaya penyelamatan *mangrove* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih sangat lambat. Kesejahteraan masyarakat di kawasan *mangrove* berkaitan erat dengan penyelamatan kawasan *mangrove* karena ketidakadaan alternatif ekonomi bagi masyarakat di kawasan *mangrove* membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain merambah *mangrove* sebagai sumber mata pencaharian.

b. Gambut

Sama halnya dengan *mangrove*, gambut juga menjadi ciri khas Kabupaten Kubu Raya dan memegang peranan penting dalam penyimpanan cadangan karbon. Gambut di Kabupaten Kubu Raya meliputi hampir 80 persen wilayah dan tersebar tidak hanya di desa-desa namun juga daerah perkotaan dengan kedalaman yang bervariasi. Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah *hinterland* Kota Pontianak saat ini menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan wilayah perkotaan terutama kebutuhan akan pengembangan pemukiman. Banyak wilayah-wilayah gambut di perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang telah dirambah dan dibuka secara besar-besaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam pengelolaan kawasan gambut sehingga dalam 2 tahun terakhir sering terjadi kebakaran lahan saat musim kering dan banjir saat musim penghujan.

c. Air tanah dan air permukaan

Pembangunan industri hiburan dan pariwisata serta kawasan pemukiman di Kabupaten Kubu Raya dalam tiga tahun belakangan ini sangat masif. Bertambahnya aktivitas masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan membuat kebutuhan air meningkat dan perusahaan daerah yang memberikan layanan air bersih juga masih sangat terbatas cakupan pelayanannya. Hal ini mendorong masyarakat dan pengusaha memanfaatkan air tanah dan air permukaan secara berlebihan. Dikhawatirkan jika pemanfaatan air tanah dan air permukaan tidak dikendalikan, dalam arti hanya sebatas eksploitasi saja sementara pengendalian dan perlindungan tidak dilakukan dapat berdampak negatif pada lingkungan.

8. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi juga masih perlu mendapatkan perhatian. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengembangan kompetensi dan kemampuan manajerial ASN juga menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang peningkatan kompetensi ASN. ASN dituntut untuk tidak hanya mengikuti pelatihan dan Diklat-diklat keahlian namun juga wajib mengikuti pelatihan dan diklat-diklat struktural. Di Kabupaten Kubu Raya, jumlah pejabat struktural yang sudah menempuh diklat struktural masih sangat minim dan perkembangannya sangat lambat. Data keikutsertaan ASN dalam diklat struktural dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.
Data Pejabat Struktural yang Sudah dan Belum Mengikuti
Diklat Kepemimpinan di Kabupaten Kubu Raya

No.	Jenis Diklat	2017		2018		2019		2020	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1.	Diklat PIM II	11	20	11	12	12	10	8	20
2.	Diklat PIM III	35	73	47	72	99	41	24	118
3.	Diklat PIM IV	152	273	149	259	215	133	105	345
	TOTAL	198	366	207	343	326	184	137	483

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya, 2021

Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar SKPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

9. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berkolerasi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan selanjutnya berdampak domino terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

- a. Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel
- b. Penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, cepat, tepat, mudah dan murah
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
- e. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan benar perlu

terus menerus diwujudkan, terutama meliputi perundang-undangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta *mind set* dan *culture set*. Perlunya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

10. Permasalahan dalam Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti dengan Lembaga Legislatif (DPRD), akan terus didorong dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

11. Kerja Sama Antar Daerah dan Dunia Usaha

Permasalahan di bidang kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit, masih ditemui berbagai kendala baik teknis maupun administratif. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU)/*Memorandum of Understanding* yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah, maka berbagai kesepakatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama akan diimplementasikan. Dengan implementasi tersebut diharapkan akan mendorong terjadinya berbagai kemajuan, diantaranya meningkatnya arus investasi, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan terbukanya lapangan kerja baru.

Permasalahan pembangunan di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

No.	Permasalahan	Uraian
1	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kenaikan angka kemiskinan dalam pada tahun 2016 dan 2017, tapi kemudian di tahun 2018-2020 mengalami penurunan • Indeks Gini dari tahun 2016-2020 secara garis besar mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 sempat meningkat
2	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, tapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan terutama disebabkan karena adanya pandemi Covid-19
3	Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita cenderung melambat, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan • Angka Inflasi berfluktuasi tapi cenderung meningkat pada kebutuhan dasar seperti Listrik dan Gas serta sektor Transportasi • Angka Pengangguran Terbuka cenderung tinggi
4	Infrastruktur Dasar	Jalan, Jembatan, Dermaga dan sarana Irigasi yang ada masih dalam kondisi buruk dan penyebarannya tidak merata di setiap kecamatan dan desa
5	Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan : tidak meratanya sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan • Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan terutama untuk penanganan kesehatan ibu hamil dan pemeriksaan laboratorium dasar - Masih belum selesainya pandemi Covid-19 • Penataan Ruang : RDTR belum ada. Masalah penataan ruang baru pada tataran perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang masih sangat terbatas dan belum sampai pada pengendalian tata ruang • Sosial : penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum optimal
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas fiskal daerah • Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah belum optimal • Informasi keuangan daerah belum terpublikasi dengan baik • Pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah belum optimal
7	Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem <i>mangrove</i> terancam demikian pula dengan perekonomian masyarakat di sekitarnya

No.	Permasalahan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">• Lahan gambut mengalami eksploitasi besar-besaran sehingga rawan akan bencana kebakaran dan banjir• Air Tanah dan air permukaan mengalami peningkatan eksploitasi seiring berkembangnya industri hiburan dan rekreasi serta sektor pemukiman
8	Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Penempatan aparatur belum sesuai dengan kebutuhan organisasi• Penempatan aparatur belum proporsional antar kecamatan• Penerapan manajemen aparatur sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN belum optimal• Pengembangan kompetensi dan kemampuan manajerial ASN masih sangat terbatas
9	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Perlu penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel• Perlu peningkatan pelayanan publik• Harus berorientasi pada pemenuhan SPM dan SOP
10	Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan peraturan daerah belum optimal
11	Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha	Belum ada kerangka kerjasama yang konkrit antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal, maka rumusan isu strategis Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien

Dalam rangka menjawab isu strategis belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*one data-one entry-one solution*), yang berimplikasi pada:
 - 1) Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan terintegrasi (*e-government*)
 - 2) Percepatan penguatan manajemen sekolah yang sistemik dan terintegrasi
 - 3) Penguatan manajemen persampahan

- 4) Penguatan manajemen penanggulangan kemiskinan terpadu
 - 5) Penataan ulang data dan pengelolaan pendapatan asli daerah
 - 6) Kemudahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan
 - 7) Sarjana kembali ke desa melalui rekrutmen admin desa, kecamatan, puskesmas, UPT pendidikan dan organisasi perangkat daerah
 - 8) Menerapkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang terintegrasi dengan program-program unggulan daerah
- b. Pemenuhan fasilitas layanan pemerintahan dengan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dan beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
 - d. Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
 - e. Reviu peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan
 - f. Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) indikator
 - g. Meningkatkan ruang kerja sama dan kemitraan (*government to government, government to corporations, dan government to non-governmental organizations*)
 - h. Pengembangan kelompok-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan
 - i. Peningkatan tertib administrasi kependudukan
 - j. Penerapan sistem non-tunai dalam pengelolaan Dana Desa melalui inovasi *Cash Management System* (CMS)
 - k. Penerapan kurikulum wakaf
 - l. Pemekaran Kecamatan dan Desa

2. Belum optimalnya pelayanan mendasar serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

a. Bidang Pendidikan

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang pendidikan, khususnya yang menjadi kewenangan pemda kabupaten sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
- 2) Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- 4) Peningkatan kualitas pembelajaran yang bertujuan meningkatkan daya saing lulusan untuk memasuki pasar kerja
- 5) Pemerataan kualifikasi dan penempatan guru
- 6) Pemantapan kesejahteraan guru

b. Bidang Kesehatan

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
- 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis
- 4) Kepastian layanan jaminan kesehatan
- 5) Pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis
- 6) Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)
- 7) Layanan “jemput bola” untuk mengatasi masalah *stunting* (berat badan rendah/BBR) dan gizi buruk untuk mendukung Program Kesehatan Selasa Jum’at Terpadu (Salju Terpadu)
- 8) Pencegahan dan penurunan angka terkonfirmasi Covid-19

c. Bidang Sosial

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- 1) Fasilitasi kebijakan peningkatan penanganan PPKS
- 2) Penguatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan daerah
- 3) Pemberdayaan kelembagaan sosial
- 4) Penguatan jejaring pengaman sosial
- 5) Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba

3. Belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata

Dalam rangka menjawab isu strategis pada sektor infrastruktur dasar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan penanganan jalan poros dan jalan lingkungan)
- b. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD
- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas jembatan
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas irigasi
- e. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih
- f. Penanganan banjir dan abrasi
- g. Pembangunan fasilitas umum milik pemerintah, yaitu Masjid Agung dan GOR Kabupaten Kubu Raya

4. Belum memadainya penguatan struktur ekonomi melalui perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian

Dalam rangka menjawab isu strategis pada sektor penguatan struktur ekonomi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- b. Peningkatan iklim investasi perdagangan dan perindustrian di semua tingkatan/skala
- c. Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi

- d. Pembangunan, peningkatan, penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
- e. Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect*
- f. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian
- g. Pengembangan hortikultura, peternakan, budi daya perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis kelompok dan rumah tangga yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
- h. Pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi
- i. Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya

Selain itu untuk penguatan struktur ekonomi juga dilakukan dengan membangun perekonomian berbasis pesantren, dimana saat ini jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak. Untuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini dilakukan melalui pemberdayaan santri, pesantren serta alumni pondok pesantren. Program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan yang Islami kepada para santri, mendorong menjadi *start up* bisnis di sektor ekonomi syariah serta menghasilkan produk pesantren yang unggul, berdaya saing, inovatif dan kompetitif. Selain itu juga bertujuan menjadikan pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat sekitar yang saling menguntungkan bagi masyarakat, mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberdayaan ekonomi pesantren serta membangun sinergi antar pondok pesantren untuk ekosistem bisnis yang berkualitas. Program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini disinergikan dengan program-program yang ada di SKPD dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan perekonomian Kabupaten Kubu Raya.

5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka menjawab isu strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan

berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup
- c. Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut

6. Belum optimalnya penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan lokal

Dalam rangka menjawab isu strategis pada penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada:

- a. Fasilitasi kebijakan penguatan kelompok kerja pengelolaan keuangan dan aset desa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
- b. Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun (IDM) melalui strategi “*Kepong Bakol*” guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal
- c. Pemberdayaan masyarakat di perdesaan dalam mengurangi derasnya arus urbanisasi
- d. Optimalisasi aset-aset sumber daya alam perdesaan (lahan desa)
- e. Penguatan produktivitas pangan perdesaan yang dikuasai non warga perdesaan
- f. Pemberdayaan kaum muda di perdesaan
- g. Pengembangan dan pemberdayaan Bumdes dan Bumdesma
- h. Pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes)

7. Belum optimalnya pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budaya lokal

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada:

- a. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan partisipasi rohaniwan

- b. Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji
- c. Peningkatan dorongan pembinaan dan kegiatan kerohanian
- d. Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan
- e. Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
- f. Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan pembinaan kerohanian
- g. Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti

8. Belum optimalnya peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan pengembangan model peningkatan kemandirian pangan
- b. Fasilitasi kebijakan pengembangan model peningkatan kemandirian ekonomi dan daya beli keluarga

9. Belum optimalnya pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi Pasangan Usia Subur (laki-laki dan perempuan) sebagai akseptor KB
- b. Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu
- c. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis *home industry*
- d. Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
- e. Fasilitasi kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas Kampung KB

10. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
- b. Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa
- c. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan

11. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah

Kabupaten Kubu Raya mempunyai potensi yang cukup besar di sektor pertanian, sektor perkebunan tanaman jenis kelapa dalam dan sektor perikanan. Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang investasi bagi para investor sehingga dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Dalam mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ini diperlukan pengelolaan yang mandiri dan profesional, selain memberikan kesempatan usaha secara umum dan utamanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan pengelolaan yang optimal dapat menjadikan potensi dan keunggulan memberikan manfaat dan menunjang keberlangsungan layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tetapi saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bekerjasama dan menjadi wadah (*holding*) bagi BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan potensi sektor-sektor unggulan.

Di sektor Penerangan Jalan Umum, pada situasi dan kondisi dimana jaringan kabel PLN tidak tersedia optimal dan dengan biaya yang sangat mahal, sistem lampu penerangan jalan tenaga surya merupakan salah satu solusi permasalahan dan dibutuhkan pembentukan BLUD untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya.

Sebelas isu strategis sebagaimana terdapat dalam daftar di atas merupakan elaborasi antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis provinsi (regional), nasional dan internasional. Hal tersebut berarti bahwa kesebelas isu tersebut sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Secara ringkas elaborasi isu-isu strategis daerah, nasional dan internasional tersaji dalam Tabel 4.5 berikut.

TABEL 4.5.
Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Global	Isu-Isu Strategis Nasional	Isu-Isu Strategis Propinsi	Isu-Isu Strategis KLHS	Isu-Isu Strategis Kabupaten
1. Perlambatan ekonomi global 2. SDG's <i>Transforming our world : The 2030 Agenda for Sustainable Development</i>	1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	1. Perlambatan ekonomi menjadi dampak covid-19 yang berasal dari penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus dan terjadinya penurunan permintaan ekspor akan barang dari luar negeri 2. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran 3. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relative rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah	1. Peningkatan ketahanan pangan, penurunan <i>stunting</i> , dan pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar 4. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang layak dan produktif 6. Membangun infrastruktur yang layak, meningkatkan akses dan konektivitas guna mengurangi kesenjangan antar wilayah	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien 2. Belum optimalnya pelayanan dasar serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3. Belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata 4. Belum memadainya penguatan struktur ekonomi melalui perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian 5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan berkelanjutan

Isu-Isu Strategis Global	Isu-Isu Strategis Nasional	Isu-Isu Strategis Propinsi	Isu-Isu Strategis KLHS	Isu-Isu Strategis Kabupaten
		<p>4. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian</p> <p>5. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>6. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi</p> <p>7. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal</p>	<p>7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dan para pemangku kepentingan</p> <p>8. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan</p> <p>9. Penanganan kawasan kumuh, mewujudkan Kota Layak Huni dan meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>10. Penyusunan dokumen kebencanaan dan mitigasi bencana</p> <p>11. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya perikanan</p> <p>12. Pengendalian pemanfaatan tata ruang</p> <p>13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>6. Belum optimalnya penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan local</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budaya lokal</p> <p>8. Belum optimalnya peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>9. Belum optimalnya pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>10. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif</p> <p>11. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah</p>

Isu-Isu Strategis Global	Isu-Isu Strategis Nasional	Isu-Isu Strategis Propinsi	Isu-Isu Strategis KLHS	Isu-Isu Strategis Kabupaten
		8. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah		

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara *sustainable* atau berkelanjutan. Perencanaan pembangunan diselaraskan dengan visi dan misi daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah:

- 1. Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
- 2. Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
 - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Jaminan keadilan yang meliputi:
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*)
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat

3. **Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
4. **Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. **Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

5.2. Misi

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,

Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya sistem pendeteksian dini (*early warning system*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundangundangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan

perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pada kondisi era pandemi Covid-19, percepatan pembangunan infrastruktur akan membantu konektivitas antar daerah bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ketiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan: penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat

Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkuat pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Kelima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tujuan:

Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran:

- 1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
- 3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah
- 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran:

- 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 3. Meningkatkan konektivitas wilayah
- 4. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat

5. Meningkatnya daya saing daerah
6. Meningkatnya sektor UMKM
7. Meningkatnya investasi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
10. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana

Misi Ketiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tujuan:

Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran:

Meningkatnya status desa

Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan:

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
2. Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)

Misi Kelima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Tujuan:

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak

Sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak

Tabel 5.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				Kondisi Akhir
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi					-	CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)	B (62,00)	B (64,00)	B (66,00)	B (66,00)
						S.1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,48)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Baik (88,00)	Baik (88,00)
						S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai SAKIP	-	CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	BB (71,50)	BB (71,50)
						3		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat	T.2	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					-	67,65	67,95	68,13	68,72	69,41	70,01	70,01
						S.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	4	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	13,64	13,85	13,95	14,09	14,26	14,41	14,41
								5	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,82	6,83	6,84	7,00	7,10	7,20	7,20
						S.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,59	70,72	70,89	71,03	71,25	71,25

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				Kondisi Akhir
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		T.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	3	Indeks Infrastruktur					-	59,64	59,19	61,54	63,22	65,01	66,74	66,74
						S.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	7	Indeks Konektivitas	-	4,00	3,11	3,78	4,22	4,67	5,00	5,00
								8	Indeks Moblitas	-	0,44	0,39	0,42	0,45	0,47	0,48	0,48
						S.6	Meningkatnya kualitas perumahan yang sehat	9	Persentase Rumah Layak Huni	%	N/A	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
				10	Persentase Daerah Bebas Genangan			%	32,05	38,52	39,00	40,00	45,00	50,00	50,00		
	T.4	Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi					%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	6,59	
			5	Angka Kemiskinan					%	4,74	4,42	4,39	4,16	4,03	3,97	3,97	
					S.7	Meningkatnya daya saing daerah	11	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	6,59	
					S.8	Meningkatnya sektorUMKM	12	Laju pertumbuhan UMKM	Omset	8.035.540.000	13.451.800.000	45.430.612.675	54.971.041.337	60.468.145.470	66.514.960.017	66.514.960.017	
					S.9	Meningkatnya investasi	13	Nilai investasi	Juta	11.211.964,25	12.751.262,63	13.902.444,49	15.053.626,36	16.204.808,23	17.355.990,10	17.355.990,10	
					S.10	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	14	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,62	7,14	6,89	6,13	5,67	5,31	5,31	
	T.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					-	N/A	N/A	68,87	69,30	69,74	70,17	70,17	
					S.11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	N/A	N/A	68,87	69,30	69,74	70,17	70,17	

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				Kondisi Akhir
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
								16	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten	%	80,12	81,25	82,00	82,75	83,50	84,25	84,25
				S.12	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	17	Indeks Resiko Bencana	-	168,40	168,38	167,97	164,92	162,84	161,36	161,36		
3	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T.6	Meningkatnya kemandirian desa	7	Indeks Desa Membangun				-	Berkembang (0,6751)	Maju (0,7168)	Maju (0,7590)	Maju (0,8008)	Mandiri (0,8448)	Mandiri (0,8912)	Mandiri (0,8912)	
						S.13	Meningkatnya status desa	18	Jumlah Desa Mandiri	Desa	14	21	42	55	65	75	75
4	Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	T.7	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	8	Indeks Kerukunan Umat Beragama				-	0	0	0	0	0	0	0	
						S.14	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	19	Jumlah kasus konflik antar agama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
				9	Indeks Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)				-	92,80	92,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						S.15	Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	20	Jumlah kasus Pekat	Kasus	45	40	35	30	25	20	20

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				Kondisi Akhir
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi	T.8	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					-	84,60	84,30	85,13	85,96	86,79	87,62	87,62
						S.16	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	72,43	73,24	73,54	73,84	74,14	74,44	74,44
				11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)					-	53,73	55,87	59,87	64,47	65,55	69,29	69,29
						S.17	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	22	Status Kabupaten Layak Anak	-	Pratama (500)	Pratama (520)	Pratama (550)	Pratama (600)	Pratama (610)	Pratama (650)	Pratama (650)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi **Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius**, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja

3. Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel
4. Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja
5. Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja
6. Meningkatkan kompetensi APIP

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
4. Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah
5. Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung pendidikan non formal atau kesetaraan
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan
7. Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat
8. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan seperti TB, HIV/AIDS dan Covid-19
9. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan
10. Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat
11. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
12. Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga
13. Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa
14. Mengembangkan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni
15. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi
16. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
17. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian

18. Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan
19. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung
20. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri
21. Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen
22. Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
23. Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
24. Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM
25. Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
26. Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
27. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup
28. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW
29. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Strategi yang dilakukan adalah:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa bersatatus mandiri

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan lembaga/aparat penegak hukum beragama

Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Strategi yang dilakukan adalah:

- 1. Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender
- 2. Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
- 4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Kubu Raya

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berlualitas dan Religius					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI 1: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)					
T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	ST.1	Meningkatkan pelayanan publik
		S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	ST.2	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja
				ST.3	Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel
				ST.4	Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja
				ST.5	Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja
				ST.6	Meningkatkan kompetensi APIP
MISI 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat					
T.2	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing	S.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	ST.7	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
				ST.8	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
				ST.9	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
				ST.10	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah

				ST.11	Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung Pendidikan non formal atau kesetaraan
		S.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ST.12	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan
				ST.13	Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat
				ST.14	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, seperti TB, HIV/AIDS dan COVID-19
				ST.15	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan
				ST.16	Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat
T.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	S.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	ST.17	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
				ST.18	Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga
				ST.19	Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa
		S.6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	ST.20	Mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni
				ST.21	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi
				ST.22	Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
T.4	Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	S.7	Meningkatnya daya saing daerah	ST.23	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian

				ST.24	Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan
				ST.25	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung
				ST.26	Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri
				ST.27	Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen
				ST.28	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
				ST.29	Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
		S.8	Meningkatnya sektor UMKM	ST.29	Meningkatkan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangn pelaku UMKM
		S.9	Meningkatnya investasi	ST.30	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
		S.10	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	ST.31	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
		T.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S.11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				ST.32	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup
				ST.33	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah seduai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW
		S.12	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	ST.34	Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan
MISI 3: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal					
T.6	Meningkatnya kemandirian desa	S.13	Meningkatnya status desa	ST.35	Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandiri

MISI 4: Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat					
T.7	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	S.14	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	ST.36	Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama
		S.15	Menurunnya penyakit masyarakat (PEKAT)	ST.37	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan lembaga/aparat penegak hukum
MISI 5: Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi					
T.8	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak	S.16	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	ST.38	Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender
				ST.39	Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik
		S.17	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	ST.40	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
				ST.41	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Arah kebijakan:

1. Peningkatan kinerja *One Stop Service* dan kepuasan masyarakat
2. Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*one data-one entry-one solution*)
3. Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
4. Peningkatan tertib administrasi kependudukan

5. Meningkatkan ruang kerja sama dan kemitraan (*government to governments, government to corporations, dan government to non government organizations*)
6. Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) indikator SDG's
7. Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "A"
8. Peningkatan komitmen memenuhi penilaian WTP
9. Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
10. Peningkatan komitmen SKPD mampu melakukan pengendalian internal
11. Pengembangan kelompok kerja-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan
12. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional
13. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Arah kebijakan:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
2. Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat pendidikan berbasis pemenuhan indikator-indikator standar pelayanan minimal
3. Peningkatan pemenuhan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (wajib belajar 9 tahun)
4. Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Penguatan Pendidikan Non Formal
6. Penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
7. Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
9. Pengembangan dan peningkatan sekolah berakreditasi
10. Pengembangan dan peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
11. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer

12. Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
13. Percepatan pelayanan kesehatan keliling terpadu
14. Percepatan taman beraktivitas bagi warga lanjut usia
15. Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan yang berkelanjutan
16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
17. Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata
18. Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
19. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalan penghubung antar kabupaten)
20. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD
21. Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan, baik jembatan antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten
22. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dermaga
23. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet di desa
24. Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan layak huni
25. Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan
26. Penanganan air limbah domestik
27. Peningkatan pengelolaan sampah
28. Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perkotaan
29. Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perdesaan
30. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian
31. Pengembangan hortikultura berbasis kelompok dan rumah tangga
32. Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya
33. Pengembangan *food estate*
34. Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan serta berbasis kelompok rumah tangga

35. Pengembangan budi daya perikanan berbasis kelompok dan rumah tangga
36. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
37. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
38. Peningkatan iklim investasi perindustrian di semua tingkatan/skala
39. Menumbuhkan industri kecil menengah dan industri pengolahan serta manufaktur berbasis sumber daya lokal
40. Peningkatan iklim investasi perdagangan di semua tingkatan/skala
41. Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
42. Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (*safe travel*)
43. Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
44. Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi
45. Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
46. Kemudahan proses perizinan
47. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
48. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja
49. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
50. Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup
51. Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup
52. Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan *mangrove*
53. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan
54. Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan
55. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Arah kebijakan:

Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Arah kebijakan:

1. Fasilitasi peningkatan kehidupan toleransi umat beragama
2. Peningkatan fasilitasi kerjasama dan partisipasi rohaniwan
3. Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji
4. Peningkatan dorongan pembinaan dan event-event kerohanian
5. Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan
6. Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
7. Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan event-event pembinaan kerohanian
8. Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti
9. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba
10. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah
11. Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
12. Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa

**Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk
Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Arah kebijakan:

1. Peningkatan anggaran responsif gender
2. Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu
3. Peningkatan kompetensi perempuan pada sektor publik
4. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis *home industry*
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
6. Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
7. Peningkatan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

Tabel 6.2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kabupaten Kubu Raya

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat Terdepan, Berkualitas dan Religius	1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	ST.1	Meningkatkan pelayanan publik	AK.1	Peningkatan kinerja <i>One Stop Service</i> dan kepuasan masyarakat
									AK.2	Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>one data-one entry-one solution</i>)
									AK.3	Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
									AK.4	Peningkatan tertib administrasi kependudukan
									AK.5	Meningkatkan ruang kerjasama dan kemitraan (<i>government to governments, government to corporations, dan government to non government organizations</i>)
									AK.6	Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) indikator SDG's

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
					S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	ST.2	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja	AK.7	Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "A"
							ST.3	Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel	AK.8	Peningkatan komitmen memenuhi penilaian WTP
									AK.9	Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
							ST.4	Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja	AK.10	Peningkatan komitmen SKPD mampu melakukan pengendalian internal
									AK.11	Pengembangan kelompok kerja-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan
							ST.5	Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja	AK.12	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional
							ST.6	Meningkatkan kompetensi APIP	AK.13	Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
	2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang	T.2	Meningkatnya sumber daya	S.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	ST.7	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	AK.14	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
		Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat		manusia yang berdaya saing					AK.15	Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat pendidikan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
									AK.16	Peningkatan pemenuhan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (wajib belajar 9 tahun)
									AK.17	Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
									AK.18	Penguatan Pendidikan Non Formal
									AK.19	Penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
							ST.8	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman	AK.20	Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata
							ST.9	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	AK.21	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
							ST.10	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah	AK.22	Pengembangan dan peningkatan sekolah berakreditasi

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
					S.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ST.11	Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung pendidikan non formal atau kesetaraan	AK.23	Pengembangan dan peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
							ST.12	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan	AK.24	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer
									AK.25	Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
									AK.26	Percepatan pelayanan kesehatan keliling terpadu
									AK.27	Percepatan taman beraktivitas bagi warga lanjut usia
							ST.13	Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat	AK.28	Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan yang berkelanjutan
							ST.14	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, seperti TB, HIV/AIDS dan Covid-19	AK.29	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
							ST.15	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan	AK.30	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata
							ST.16	Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat	AK.31	Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
			T.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	S.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	ST.17	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	AK.32	Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan pembangunan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalan penghubung antar kabupaten)
									AK.33	Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD
									AK.34	Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan, baik jembatan antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
							ST.18	Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga	AK.35	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dermaga
							ST.19	Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa	AK.36	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet di desa
					S.6	Meningkatnya kualitas perumahan yang sehat	ST.20	Mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni	AK.37	Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan layak huni
									AK.38	Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan
							ST.21	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi	AK.39	Penanganan air limbah domestik
									AK.40	Peningkatan pengelolaan sampah
							ST.22	Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	AK.41	Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perkotaan
									AK.42	Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perdesaan
					T.4	Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	S.7	Meningkatnya daya saing daerah	ST.23	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
									AK.43	Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
									AK.44	Pengembangan hortikultura berbasis kelompok dan rumah tangga
									AK.45	Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya
									AK.46	Pengembangan <i>food estate</i>
							ST.24	Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan	AK.47	Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan serta berbasis kelompok dan rumah tangga
							ST.25	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung	AK.48	Pengembangan budi daya perikanan berbasis kelompok dan rumah tangga
									AK.49	Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
									AK. 50	Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
							ST.26	Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri	AK.51	Peningkatan iklim investasi perindustrian di semua tingkatan/skala
									AK.52	Menumbuhkan industri kecil menengah dan industri pengolahan serta manufaktur berbasis sumber daya lokal
							ST.27	Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen	AK.53	Peningkatan iklim investasi perdagangan di semua tingkatan/skala

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
									AK.54	Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
							ST.28	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah	AK.55	Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya <i>multiplier effect</i> dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (<i>safe travel</i>)
							ST.29	Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial	AK.56	Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
					S.8	Meningkatnya sektor UMKM	ST.30	Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM	AK.57	Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi/digital
					S.9	Meningkatnya investasi	ST.31	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah	AK.58	Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
									AK.59	Kemudahan proses perizinan

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
					S.10	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	ST.32	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja	AK.60	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
									AK.61	Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja
			T.5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S.11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	ST.33	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup	AK.62	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
									AK.63	Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup
									AK.64	Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup
									AK.65	Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan <i>mangrove</i>
							ST.34	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah seduai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW	AK.66	Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan
									AK.67	Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan
					S.12	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	ST.35	Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan	AK.68	Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	3.	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T.6	Meningkatnya kemandirian desa	S.13	Meningkatnya status desa	ST.36	Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandiri	AK.69	Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal
	4.	Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	T.7	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	S.14	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	ST.37	Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama	AK.70	Fasilitasi peningkatan kehidupan toleransi umat beragama
									AK.71	Peningkatan fasilitasi kerja sama dan partisipasi rohaniwan
									AK.72	Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji
									AK.73	Peningkatan dorongan pembinaan dan event-event kerohanian
									AK.74	Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
									AK.75	Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
									AK.76	Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan event-event pembinaan kerohanian
									AK.77	Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti
									AK.78	Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba
					S.15	Menurunnya penyakit masyarakat (PEKAT)	ST.38	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum	AK.79	Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah
									AK.80	Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
									AK.81	Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	5.	Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi	T.8	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak	S.16	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	ST.39	Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender	AK.82	Peningkatan anggaran responsif gender
									AK.83	Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu
							ST.40	Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik	AK.84	Peningkatan kompetensi perempuan pada sektor publik
									AK.85	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis <i>home industry</i>
					S.17	Meningkatnya pemenuhan dan hak anak	ST.41	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak	AK.86	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
									AK.87	Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
							ST.42	Meningkatkan kualitas khusus perlindungan terhadap anak	AK.88	Peningkatan kualitas khusus perlindungan terhadap anak

Dalam rangka mewujudkan Visi dan merealisasikan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka dirumuskan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Tahapan arah kebijakan tahunan tersebut untuk Tahun 2019 merupakan arah kebijakan transisi dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 periode akhir dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 periode awal, yakni melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan, dan daya saing daerah yang sudah dicapai.

Memperhatikan keseluruhan data-data dan informasi yang tercakup dalam gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, dan strategi, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2020 adalah Peningkatan Infrastruktur Mendasar, Pelayanan Sosial Dasar, serta Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah membangun kerangka dasar untuk pembangunan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, pada awalnya arah pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan kemandirian desa. Namun, kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 menuntut adanya respon terkait dampak ekonomi dan sosial yang terjadi. Sehingga akan menjadi logis pada tahun 2021 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber Daya Manusia, Kemandirian Desa Didukung Infrastruktur Mendasar Dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 diharapkan akan memperkuat struktur perekonomian, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di bidang kesehatan, dan mendorong penguatan Indeks Desa Mandiri sehingga menciptakan kemandirian desa secara kuantitatif dan kualitatif, yang kesemuanya berjalan secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2022 direncanakan akan mulai melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta pengarusutamaan gender. Dengan demikian, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun

2022 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan serta Pengarusutamaan Gender Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 diharapkan semakin memperkuat daya saing daerah serta dapat mendorong tumbuh-kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kemandirian ekonomi keluarga serta pengembangan perdagangan digital pasca fase pemulihan pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan adanya penguatan strategi dalam mengintegrasikan perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Pada Tahun 2023 masih melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis partisipatif dan bernuansa religius. Oleh karena itu, yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Partisipatif dan Bernuansa Religius Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 diharapkan semakin meningkat tingkat kesejahteraan berdimensikan kebahagiaan, yakni antara lain adanya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, pekerjaan bernilai tambah pada pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga dan hubungan sosial, kelayakan hunian dan asetnya, kelestarian lingkungan hidup, dan keamanan yang kondusif. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 diharapkan juga dapat mendorong tumbuh-kembangnya partisipatif masyarakat Kubu Raya dari semua tingkatan dan kalangan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk melakukan akselerasi setelah pada tahun 2020 terjadi masalah pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan dapat terpeliharanya pengembangan karakter Sumber Daya Manusia yang belandaskan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, serta keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Pada Tahun 2024 adalah akhir periode pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan sekaligus adalah tahun transisi untuk RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2029. Adapun arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sosial Budaya, Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Kebahagiaan dan Religius. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yakni terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius; serta terealisasinya Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yakni meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Arah Kebijakan					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi dan ekspansi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan dan daya saing daerah yang sudah dicapai	Peningkatkan infrastruktur mendasar, pelayanan sosial dasar, serta budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa	Peningkatan perekonomian daerah, Sumber Daya Manusia, kemandirian desa didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar	Peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pengarusutamaan gender didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar	Peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis partisipatif dan bernuansa religius didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial budaya, perekonomian daerah, serta daya saing daerah yang berkelanjutan berbasis kebahagiaan dan religius

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD akan menjadi pedoman bagi prioritas pembangunan tahunan. Dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya akan ditetapkan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari RPJMD. Adapun prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan terutama terhadap penanganan pandemi Covid-19
2. Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan
4. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
5. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
6. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Peningkatan daya saing kepariwisataan
10. Peningkatan kesempatan kerja

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Bupati.

Berkenaan dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra Perubahan SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 7.1. di bawah. Sedangkan berkenaan dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada Tabel 7.2. di bawah.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		Proyeksi (Rp.)			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	BELANJA	1.580.265.429.953,77	1.487.430.828.191,27				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	794.927.858.913,59	795.728.523.684,81				
2.1.1.	Belanja Pegawai	549.026.260.713,59	542.278.362.971,81				
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-				
2.1.3.	Belanja Hibah	12.455.610.000,00	21.011.558.000,00				
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.876.400.000,00	993.300.000,00				
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	12.213.858.500,00	11.176.172.675,00				
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	219.355.729.700,00	211.129.940.600,00				
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	0,00	9.139.189.438,00				
2.2.	Belanja Langsung	785.337.571.040,18	691.702.304.506,46				
2.2.1.	Belanja Pegawai	83.302.724.300,00	98.177.916.884,00				
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.405.558.028,42	453.140.817.627,53				
2.2.3.	Belanja Modal	205.629.288.711,76	140.383.569.994,93				
5	BELANJA			1.588.942.509.194	1.999.720.819.028	2.234.199.243.638	2.535.413.465.956
5.1	BELANJA OPERASI			1.129.453.607.516	1.390.904.912.964	1.552.183.509.853	1.758.572.074.183
5.1.01	Belanja Pegawai			592.710.672.045	818.373.960.886	891.428.622.945	975.266.872.999
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			515.413.129.471	545.039.628.299	631.068.614.425	751.248.731.988
5.1.05	Belanja Hibah			20.334.600.000	24.941.529.882	26.932.899.199	29.083.262.442

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		Proyeksi (Rp.)			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			995.206.000	2.549.793.898	2.753.373.284	2.973.206.754
5.2	BELANJA MODAL			228.338.257.001	315.276.453.811	365.039.649.481	434.557.459.409
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			5.000.000.000	1.007.325.984	1.087.752.408	1.174.600.199
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000.000	1.007.325.984	1.087.752.408	1.174.600.199
5.4	BELANJA TRANSFER			226.150.644.677	292.532.126.269	315.888.331.897	341.109.332.164
5.4.01	Belanja Bagi Hasil			11.329.662.677	15.411.516.534	16.641.995.229	17.970.717.198
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			214.820.982.000	277.120.609.736	299.246.336.667	323.138.614.967
	Jumlah Belanja			1.588.942.509.194	1.999.720.819.028	2.234.199.243.638	2.535.413.465.956

Tabel 7.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
URUSAN WAJIB																		
1	Pelayanan Dasar																	
	1	Pendidikan																
	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			3.856.556.900		4.708.966.574		5.749.783.232								14.315.306.706	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Peningkatan APK TK/RA/PAUD	-	98,36	95,22		92,17		89,23								80,94	
	2	Peningkatan APM TK/RA/PAUD	-	90,28	88,97		87,68		86,41								82,71	
	2	Program Pendidikan Non Formal			1.397.692.700		1.341.681.252		1.287.914.420								4.027.288.372	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Angka Melek Huruf	%	93,23	93,91		94,60		95,29								97,39	
	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			3.302.993.250		3.949.454.205		4.722.440.325								11.974.887.780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/D4	%	85,00	87,50		90,00		92,50								100,00	
	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			6.047.551.000		11.696.761.950		22.623.081.658								40.367.394.608	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Persentase Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	%	75,00	77,50		80,00		82,50								90,00	
	5	Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas			180.000.000		180.606.074		181.214.189								541.820.263	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Jumlah Sekolah Berprestasi	Sekolah	5,00	5,00		5,00		5,00								15,00	
	6	Program Pendidikan Sekolah Dasar			48.306.329.200		43.180.768.512		38.599.057.312								130.086.155.024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	-	98,36	95,22		92,17		89,23								80,94	
	2	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	-	90,28	88,97		87,68		86,41								82,71	
	7	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			16.082.471.190		12.192.290.071		9.243.102.967								37.517.864.228	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	9,27	90,51		90,76		91,01								91,76	
	2	Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	86,78	89,82		92,97		96,22								106,68	
	3	Peningkatan rata-rata lama sekolah	Tahun	6,81	6,92		7,04		7,16								7,52	
2	Kesehatan																	
	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			4.678.760.140		4.891.140.616		5.113.161.566								14.683.062.322	Dinas Kesehatan
	1	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	%	93,00	100,00		100,00		100,00								100,00	
	2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	%	80,90	82,00		85,00		87,00								92,30	
	3	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	%	70,00	90,00		100,00		100,00								100,00	
	4	Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	0,00	0,00		65,00		70,00								85,00	
	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			52.843.624.660		75.292.479.807		107.277.983.901								235.414.088.368	Dinas Kesehatan
	1	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned	Puskesmas	5,00	5,00		5,00		6,00								7,00	
	2	Jumlah Puskesmas Dengan Kesiapsiagaan Akses Layanan Rujukan	Puskesmas	5,00	5,00		5,00		5,00								7,00	
	3	Persentase Penurunan Rujukan Masyarakat Miskin	%	40,00	35,00		30,00		30,00								10,00	
	4	Cakupan Rumah Sakit Umum Daerah yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	%	0,00	0,00		100,00		100,00								100,00	
	5	Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) Sesuai Standar	%	61,00	75,00		80,00		80,00								100,00	
	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan			128.110.250		140.486.147		154.057.599								422.653.996	Dinas Kesehatan
	1	Persentase Makanan Memenuhi Syarat/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	%	60,40	70,00		75,00		80,00								95,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong				13.147.625.200		14.280.913.459		15.511.887.973								42.940.426.632	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	45,00	50,00		55,00		60,00								75,00			
	3	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong			-		14.280.913.459		15.511.887.973									29.792.801.432	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Turap/ Talud/ Bronjong Dalam Kondisi Baik	%	40,00	45,00		50,00		55,00								70,00			
	4	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				7.782.667.100		5.961.441.332		4.566.401.504								18.310.509.936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / Jembatan Kabupaten	Km	2,94	3,56		5,00		5,00								13,56			
	5	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan				8.930.000.000		-		-								8.930.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	%	53,00	56,00		59,00		62,00								65,00			
	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				40.691.828.000		43.460.423.152		46.417.388.291								130.569.639.443	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Luas Daerah Irigasi dan Rawa yang Fungsional	Ha	3.144,00	628,00		628,00		628,00								1.884,00			
	2	Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang Berfungsi Dengan Baik	M	7.165,00	145,00		145,00		145,00								435,00			
	3	Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik	Unit	82,00	16,00		16,00		16,00								48,00			
	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				4.326.949.000		4.197.603.159		4.072.123.864								12.596.676.023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	%	18,00	19,00		20,00		21,00								24,00			
	2	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	%	48,00	49,00		50,00		51,00								55,00			
	3	Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	%	60,00	62,00		64,00		66,00								72,00			
	8	Program Perencanaan Tata Ruang				2.905.722.050		3.588.542.265		4.431.819.481								10.926.083.796	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	80,00	82,50		85,00		87,50								95,00			
	2	Tersedianya RDTR	Dokumen	0,00	0,00		1,00		1,00								2,00			
	9	Program Pemanfaatan Ruang				1.025.605.000		1.269.114.952		1.570.441.604								3.865.161.556	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang	-	Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia								Tersedia			
	10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				408.716.000		413.956.344		419.263.876								1.241.936.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Ketaatan Terhadap RTRW	Objek / Kasus	-	35,00		35,00		35,00								105,00			
	11	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				100.800.000		159.129.230		251.211.426								511.140.656	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi	%	98,00	98,00		98,00		98,00								100,00			
	12	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				417.242.850		1.007.153.949		2.431.099.963								3.855.496.762	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00			
	13	Program Penyelenggaraan Jalan			-		3.338.554.319		1.248.146.130									4.586.700.449	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	%	53,00	56,00		59,00		62,00								71,00			
	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
	1	Program Pengembangan Perumahan				400.049.550		428.033.278		457.974.487								1.286.057.315	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	1	Rasio Rumah Layak Huni	%	75,00	77,50		80,00		82,50								90,00			
	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan				3.637.425.000		4.166.383.943		4.772.264.764								12.576.073.707	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar	%	65,00	67,00		69,00		71,00								77,00			
	3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				858.053.100		716.167.951		597.744.515								2.171.965.566	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)	Menit	20,00	20,00		18,00		16,00								11,00			
	4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			-		428.033.278		457.974.487									886.007.765	Dinas Pekerjaan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		1	Persentase Areal Pemukiman yang Dikelola Dengan Baik	%	-	-		40,00		42,50								50,00		Umum dan Penataan Ruang	
		5	Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman				549.945.000		1.006.873.085		1.843.445.090								3.400.263.175	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		1	Persentase Peningkatan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00			
		2	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	50,00	55,00		60,00		65,00								80,00			
		5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
		1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				3.932.602.200		4.332.415.148		4.772.875.582								13.037.892.930	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah/Per Satuan Wilayah	-	2 Kali/Hari	3 Kali/Bulan		1 Kali/Hari		2 Kali/Hari								3 Kali/Hari			
		2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				210.253.600		220.766.280		231.804.594								662.824.474	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	Kali	10,00	10,00		10,00		10,00								30,00			
		3	Program Pendidikan Politik Masyarakat				79.073.500		68.808.527		59.876.108								207.758.135	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kali	5,00	5,00		5,00		5,00								15,00			
		4	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				241.724.360		332.910.618		458.495.286								1.033.130.264	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	Angka Kejadian Bencana	-	20,00	18,00		16,00		14,00								8,00			
		2	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00								1,00			
		3	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan	-	1,00	1,00		1,00		1,00								1,00			
		4	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Orang	40,00	35,00		30,00		25,00								10,00			
		5	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Juta	1.000,00	900,00		800,00		700,00								2.400,00			
		5	Program Kewaspadaan Dini/Daerah				126.236.900		135.620.646		145.701.927								407.559.473	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1	Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat	%	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00			
		2	Angka Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk	-	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00			
		6	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah				424.925.000		950.322.398		2.125.346.026								3.500.593.424	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	Kali	18,00	18,00		18,00		18,00								54,00			
		6	Sosial																		
		1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				193.515.150		344.959.382		614.923.302								1.153.397.834	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00			
		2	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				166.844.300		151.564.572		137.684.173								456.093.045	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial	%	33,00	33,00		40,00		50,00								80,00			
		3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				27.355.550		21.380.746		16.710.916								65.447.212	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00			
		4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				48.144.250		35.143.357		25.653.231								108.940.838	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri	%	75,00	77,50		80,00		82,50								90,00			
		5	Program Keluarga Harapan				311.908.400		362.309.605		420.855.129								1.095.073.134	Dinas Sosial dan	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				220.200.000		215.270.226		210.450.818								645.921.044	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		1	Indeks Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	-	DDL < 1	DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1								DDL < 1		
		4	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				93.400.000		91.740.279		90.110.052								275.250.331	
		1	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00								3,00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				85.445.000		104.913.059		128.816.782								319.174.841	
		1	Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup	-	Di bawah Baku Mutu	Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu								Di bawah Baku Mutu		
		2	Jumlah Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru	Peserta	5,00	7,00		9,00		11,00								27,00		
		3	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	%	5,00	7,50		10,00		12,50								20,00		
		4	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan	5,00	7,00		9,00		11,00								17,00		
		6	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				799.152.350		1.667.201.902		3.478.138.030								5.944.492.282	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		1	Jumlah Titik Hotspot	Titik	50,00	45,00		40,00		35,00								20,00		
		7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				6.013.634.200		7.903.855.311		10.388.215.628								24.305.705.139	
		1	Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan	%	0,25	0,30		0,35		0,40								0,55		
		8	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan				907.606.000		984.429.396		1.067.755.430								2.959.790.826	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan	%	80,00	82,50		85,00		87,50								95,00		
		6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
		1	Program Penataan Administrasi Kependudukan				3.594.613.210		4.487.390.847		5.601.903.580								13.683.907.637	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		
		2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Kependudukan				32.596.000		35.855.600		39.441.160								107.892.760	
		1	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diarsipkan	Dokumen	10.000,00	20.000,00		30.000,00		40.000,00								90.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
		1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				218.076.350		328.587.749		495.101.412								1.041.765.511	
		1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	75,00	80,00		85,00		90,00								255,00		
		2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				135.598.800		152.768.663		172.112.617								460.480.080	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah BUMDes/ BUMADES	-	31,00	55,00		69,00		82,00								117,00		
		3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				868.929.400		984.276.258		1.114.934.944								2.968.140.602	
		1	Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		
		2	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	16,00	13,00		10,00		7,00								0,00		
		3	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	60,00	55,00		50,00		40,00								8,00		
		4	Jumlah Desa Berkembang	Desa	31,00	31,00		27,00		25,00								15,00		
		5	Jumlah Desa Maju	Desa	10,00	10,00		14,00		21,00								46,00		
		6	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0,00	8,00		16,00		24,00								48,00		
		4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				3.669.570.450		6.016.474.357		9.864.359.926								19.550.404.733	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
	5		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		65.057.100		66.279.727		67.525.332								198.862.159	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00					
	6		Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			312.497.450		363.953.314		423.881.907							1.100.332.671	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1		Persentase Desa yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00					
	7		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPMD			128.735.200		-		-							128.735.200	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPMD	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00					
	8		Program Penataan Wilayah Administrasi Desa			177.166.650		157.962.779		140.840.500							475.969.929	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1		Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00					
	9		Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa			176.133.400		196.817.729		219.931.134							592.882.263	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1		Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Inventarisasi Aset Desa	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00					
	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
	1		Program Keluarga Berencana			427.439.950		450.363.932		474.517.348							1.352.321.230	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1		Cakupan Sasaran PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif (67 = 100%)	-	64,00	64,42		64,95		65,25							66,21					
	2		Program Kesehatan Reproduksi Remaja			40.144.000		50.259.960		62.925.059							153.329.019	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1		Cakupan Sekolah Siaga Kependudukan	-	1,00	4,00		4,00		6,00							8,00					
	3		Program Pelayanan Kontrasepsi			-		75.000.000		75.000.000							150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27,00	27,34		27,45		27,60							28,00					
	4		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri			2.378.500.600		2.919.843.130		3.584.394.263							8.882.737.993	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1		Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB	-	1 Desa 20%	1 Desa 20%		1 Desa 20%		1 Desa 40%							1 Desa 100%					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
12			Penanaman Modal																		
		1	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi				490.811.500		570.431.647		662.967.889								1.724.211.036	Sekretariat Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	100,00	100,00		100,00	100,00								100,00				
		2	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi			84.550.000		-	-									84.550.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Milyar	6.137,29	6.500,00		6.750,00	7.000,00							7.750,00					
		3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah			67.585.000		-	-									67.585.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	%	100,00	100,00		100,00	100,00								100,00				
		4	Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan			513.845.000		-	-									513.845.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100,00	100,00		100,00	100,00								100,00				
		5	Program Pengelolaan dan Peningkatan Investasi			-		539.308.083		566.032.965								1.105.341.048	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Milyar	6.137,29	6.500,00		6.750,00	7.000,00								7.750,00				
		6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			-		539.308.083		566.032.965								1.105.341.048	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai	Perizinan dan Non Perizinan	0,00	0,00		2.585,00	2.630,00								5.215,00				
13			Kepemudaan dan Olah Raga																		
		1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			828.190.000		992.538.471		1.189.500.739								3.010.229.210	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Semua Kecamatan		
		1	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	5,00	5,00		5,00	5,00								15,00				
		2	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga			50.000.000		52.500.000		55.125.000								157.625.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	%	100,00	100,00		100,00	100,00								100,00				
		3	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga			772.000.000		976.908.523		1.236.205.002								2.985.113.525	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Jumlah Prestasi Olah Raga	-	35,00	36,00		37,00	38,00								111,00				
		4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga			250.000.000		360.843.918		520.833.333								1.131.677.251	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk	-	0,00	0,00		1,00	1,00								1,00				
14			Statistik																		
		1	Program Pengembangan Data/Informasi			940.615.250		1.017.588.941		1.100.861.646								3.059.065.837	Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		1	Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	%	100,00	100,00		100,00	100,00								100,00				
15			Kebudayaan																		
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya			694.758.450		792.685.905		904.416.412								2.391.860.767	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	2,00	3,00		4,00	5,00								12,00				
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			35.377.600		36.563.671		37.789.506								109.730.777	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	10,00	10,00		10,00	10,00								30,00				
		3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya			82.180.000		84.942.404		87.797.663								254.920.067	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1	Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah	Orang	20,00	25,00		26,00	27,00								78,00				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16				Perpustakaan																	
				1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan			614.816.500		776.513.300		980.736.375								2.372.066.175	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				1	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	85,00	100,00		125,00		150,00							375,00		
17				Kearsipan																	
				1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			68.006.100		63.754.526		59.768.750								191.529.376	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				1	Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00		
				2	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah			68.754.800		63.850.981		59.296.918								191.902.699	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				1	Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00		
				3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan			8.999.900		5.224.825		3.033.234								17.257.959	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				1	Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Kali	5,00	5,00		5,00		5,00							15,00		
				4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			2.412.114.000		2.819.521.360		3.295.740.043								8.527.375.403	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Sekretariat Daerah
				1	Tersedianya Sistem Arsip Elektronik	-	Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia							Tersedia		
URUSAN PILIHAN																					
1				Kelautan dan Perikanan																	
				1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			686.876.000		955.240.936		1.328.457.024								2.970.573.960	Dinas Perikanan
				1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.472,00	3.500,00		4.000,00		4.500,00							12.000,00		
				2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			3.287.680.940		3.058.735.034		2.845.732.351								9.192.148.325	Dinas Perikanan
				1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.855,00	26.250,00		26.500,00		26.750,00							79.500,00		
				3	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			2.674.318.000		2.742.739.669		2.812.911.887								8.229.969.556	Dinas Perikanan
				1	Persentase Luasan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	%	75,00	77,50		80,00		82,50							90,00		
				4	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Perikanan			150.000.000		-		-								150.000.000	Dinas Perikanan
				1	Tersedianya Sistem Informasi/Database Perikanan	-	Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia							Tersedia		
				5	Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan			625.581.800		1.063.221.722		1.807.022.568								3.495.826.090	Dinas Perikanan
				1	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Dibina	Kelompok	180,00	200,00		250,00		300,00							750,00		
				6	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan			521.138.850		649.690.366		809.952.226								1.980.781.442	Dinas Perikanan
				1	Jumlah Nelayan yang Difasilitasi	Nelayan	200,00	250,00		300,00		350,00							900,00		
				7	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan			472.218.200		348.467.616		257.147.393								1.077.833.209	Dinas Perikanan
				1	Jumlah Produksi ikan Hasil Olahan	Ton	2.559,00	3.000,00		3.250,00		3.500,00							9.750,00		
2				Pariwisata																	
				1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			50.000.000		42.740.690		36.535.332								129.276.022	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				1	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	10,46	11,46		12,46		13,46							16,00		
				2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.120,00	2.159,00		2.223,00		2.290,00							6.672,00		
				3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	54.280,00	58.351,00		60.102,00		61.905,00							180.358,00		
				2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			4.063.268.000		4.266.431.400		4.479.752.970								12.809.452.370	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				1	Jumlah Pengembangan Kawasan Pariwisata	Kawasan	1,00	4,00		3,00		3,00							10,00		
				3	Program Pengembangan Kemitraan			190.000.000		187.836.423		185.697.482								563.533.905	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				1	Jumlah Usaha/Kegiatan Pariwisata yang Memiliki Legalitas	Tempat Usaha	46,00	56,00		66,00		76,00							198,00		
				4	Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif			765.000.000		1.016.916.450		1.351.789.630								3.133.706.080	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				1	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	Komunitas	5,00	5,00		6,00		7,00							18,00		
3				Pertanian																	
				1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			1.038.069.600		1.071.163.624		1.105.312.697								3.214.545.921	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	94,60	95,00		96,00		97,00							100,00			Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)			2.591.053.510		2.698.954.044		2.811.347.935							8.101.355.489		Dinas Pertanian	
			1	Skor PPH	-	89,10	89,60		90,10		90,60							92,10			
			3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan			2.794.040.950		2.321.893.012		1.929.530.474								7.045.464.436		Dinas Pertanian
			1	Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	-	Skala Nasional	Skala Nasional		Skala Nasional									Skala Nasional			
			4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan			83.876.250		57.620.961		39.584.211								181.081.422		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Komoditas yang Bersertifikat	Komoditas	10,00	10,00		10,00									10,00			
			5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan			1.761.373.200		1.610.209.828		1.472.019.495								4.843.602.523		Dinas Pertanian
			1	Indeks Pertanaman	-	110,00	112,00		115,00		118,00							127,00			
			6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			597.414.050		582.431.835		567.825.351								1.747.671.236		Dinas Pertanian
			1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	-	23 : 1	23 : 1		23 : 1									23 : 1			
			7	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak			179.606.350		137.696.684		105.566.294								422.869.328		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Ekor	-	550,00		500,00		475,00							400,00			
			8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			850.834.200		757.097.047		673.686.999								2.281.618.246		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	5,00	5,00		5,00		5,00							5,00			
			9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			85.588.500		107.430.908		134.847.556								327.866.964		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	5,00	5,00		5,00		5,00							5,00			
			10	Program Sistem Informasi/ Database Pertanian			129.531.700		139.250.175		149.697.805								418.479.680		Dinas Pertanian
			1	Tersedianya Sistem Informasi/ Database Pertanian	-	Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia							Tersedia			
			11	Program Pengembangan Agribisnis			985.826.350		944.635.140		905.165.040								2.835.626.530		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan	Ijin	200,00	190,00		180,00									140,00			
			12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			3.804.383.000		3.593.011.746		3.393.384.264								10.790.779.010		Dinas Pertanian
			1	Produktivitas Padi	Kw/ Ha	27,20	27,30		27,40		27,50							27,80			
			13	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUHI)			105.867.800		89.412.774		75.515.353								270.795.927		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Pencapaian Swasembada Daging Sapi	Ekor	-	850,00		950,00		1.050,00							1.350,00			
			14	Program Perlindungan Perkebunan			184.402.600		202.842.860		223.127.146								610.372.606		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Persentase Peningkatan Perlindungan Perkebunan	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
4	Kehutanan																				
			1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan			85.000.000		93.500.000		102.850.000								281.350.000		Sekretariat Daerah
			1	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)		Satuan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)	
Energi dan Sumber Daya Mineral																																					
	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan						85.000.000				93.500.000				102.850.000																281.350.000		Sekretariat Daerah			
	1	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		%		100,00		100,00						100,00				100,00												100,00							
Perdagangan																																					
	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						449.931.900				469.572.907				490.071.309																1.409.576.116		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian			
	1	Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha		Pelaku Usaha		50,00		60,00				70,00				80,00														210,00							
	2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan						2.556.082.875				2.941.980.399				3.386.137.731																8.884.201.005		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian			
	1	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima		Kali		2,00		4,00				6,00				8,00														18,00							
	3	Program Penyelenggaraan Metrologi Legal						262.993.100				196.264.474				146.466.746																605.724.320		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian			
	1	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTU (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)		Kali		5,00		5,00				5,00																		15,00							
Perindustrian																																					
	1	Program Penataan Struktur Industri						449.931.900				469.572.907				490.071.309																1.409.576.116		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian			
	1	Persentase Peningkatan Penataan Struktur Industri		%		100,00		100,00				100,00																		100,00							
	2	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial						426.424.500				416.462.403				406.733.041																1.249.619.944		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian			
	1	Jumlah Sentra Industri Potensial yang Mendapat Fasilitas		Sentra Industri		5,00		5,00				5,00																		15,00							
Transmigrasi																																					
	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						44.760.800				46.998.840				49.348.782																141.108.422		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	1	Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi		%		60,00		65,00				70,00				75,00														90,00							
	2	Program Transmigrasi Lokal						23.653.400				-				-																23.653.400		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	1	Persentase Peningkatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal		%		100,00		100,00				100,00				100,00														100,00							
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																					
Administrasi Perkantoran																																					
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						28.663.549.690				28.329.675.971				27.999.691.221																84.992.916.882		Semua SKPD			
	1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%		100,00		100,00				100,00																		100,00							
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						54.837.505.262				60.593.470.596				66.953.605.225																182.384.581.083		Semua SKPD			
	1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%		100,00		100,00				100,00				100,00														100,00							
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						2.175.582.370				2.083.216.949				1.994.772.948																6.253.572.267		Semua SKPD			
	1	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu		%		100,00		100,00				100,00																		100,00							
	2	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)		-		CC		CC				CC				B														BB							
	4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						9.091.335.700				9.049.973.126				9.008.798.739																27.150.107.565		Sekretariat DPRD			
	1	Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan		Perda		10,00		10,00				10,00																		30,00							
	5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						2.424.940.000				3.138.047.496				4.060.860.099																9.623.847.595		Sekretariat Daerah			
	1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/ Luar Negeri		Kali		10,00		10,00				10,00																		30,00							
	6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi						618.939.200				709.758.990				813.905.184																2.142.603.374		Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD			
	1	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi		%		100,00		100,00				100,00																		100,00							
	7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						359.086.100				356.225.764				353.388.212																1.068.700.076		Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD			
	1	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		%		100,00		100,00				100,00																		100,00							

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				295.000.000		340.087.921		392.067.098							1.027.155.019	Sekretariat Daerah	
		1	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama	5,00	5,00		5,00		5,00							15,00			
		9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				3.516.918.500		3.787.061.582		4.077.955.012							11.381.935.094	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD	
		1	Persentase Raperda yang Disetujui DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				613.000.000		558.636.670		509.094.500							1.680.731.170	Sekretariat Daerah	
		1	Jumlah Koordinasi Penegasan Batas Daerah	Kali	5,00	5,00		5,00		5,00							15,00			
		11	Program Penataan Kelembagaan				944.575.500		1.026.466.580		1.115.457.303							3.086.499.383	Sekretariat DPRD	
		1	Jumlah Pelantikan Kepala Daerah	Kali	0,00	1,00		0,00		0,00							1,00			
		12	Program Penataan Kecamatan/ Kelurahan				184.000.000		371.256.806		749.084.871							1.304.341.677	Sekretariat Daerah	
		1	Jumlah Pemekaran Kecamatan	-	0,00	0,00		1,00		1,00							2,00			
		13	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				3.699.489.625		4.822.752.008		6.287.066.404							14.809.308.037	Semua SKPD	
		1	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
	2	Pengawasan																		
		1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				2.150.386.900		2.260.597.049		2.376.455.612							6.787.439.561	Inspektorat Daerah	
		1	Jumlah LHP Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di OPD dan Desa	Dokumen	-	100,00		105,00		115,00							320,00			
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	-	75,00		80,00		85,00							100,00			
		2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				100.400.000		108.730.648		117.752.528							326.883.176	Inspektorat Daerah	
		1	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti BinteK Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	%	-	50,00		50,00		55,00							70,00			
		3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				102.767.000		-		-							102.767.000	Inspektorat Daerah	
		1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
	3	Perencanaan																		
		1	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				250.600.000		-		-							250.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		2	Program Perencanaan Pembangunan Dearah				4.210.713.200		4.397.677.438		4.592.943.269							13.201.333.907	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				499.392.100		530.596.548		563.750.802							1.593.739.450	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		2	PDB Per Kapita	Ribu	46,72	51,85		57,54		63,85							87,26			
		3	Tingkat pertumbuhan PDB Riil Per Orang Per Tahun	%	1,00	1,00		1,00		1,00							1,00			
		4	Program Perencanaan Sosial Budaya				601.190.500		911.465.947		1.381.875.083							2.894.531.530	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1	Persentase Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam				865.277.300		1.060.630.659		1.300.088.878							3.225.996.837	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1	Persentase Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
		6	Program Penelitian dan Pengembangan				500.375.000		550.412.500		605.453.750							1.656.241.250	Badan Perencanaan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			1	Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00		Pembangunan Daerah	
			7	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				2.554.005.750		3.203.675.560		4.018.603.755							9.776.285.065	Sekretariat Daerah	
			1	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	Kegiatan	25,00	30,00		35,00		40,00							105,00			
			8	Program Pemberdayaan Kecamatan				3.380.070.800		3.031.252.355		2.718.431.472							9.129.754.627	Semua Kecamatan	
			1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
			9	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah				167.258.550		163.727.161		160.270.332							491.256.043	Sekretariat Daerah	
			1	Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
			10	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah				2.934.552.000		310.430.838		328.388.474							3.573.371.312	Sekretariat Daerah	
			1	Laju Inflasi Daerah	%	5,19	5,17		5,14		5,12							5,06			
			11	Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah				130.000.000		136.500.000		143.325.000							409.825.000	Sekretariat Daerah	
			1	Persentase Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
4 Keuangan																					
			1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				12.041.480.285		12.342.007.148		12.650.034.451							37.033.521.884	Semua SKPD	
			1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
5 Kepegawaian																					
			1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.370.185.850		1.418.970.700		1.469.492.513							4.258.649.063	Semua SKPD	
			1	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
			2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS				41.998.800		45.665.160		49.651.581							137.315.541	Badan Kepegawaian dan Pembagian Sumber Daya Manusia	
			1	Jumlah SK Pensiun PNS	SK	250,00	270,00		290,00		310,00							870,00			
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.738.686.800		6.669.978.800		7.752.403.771							20.161.069.371	Semua SKPD	
			1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			
			4	Program Pendidikan Kedinasan				451.088.100		473.642.505		497.324.630							1.422.055.235	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			1	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan	PNS	125,00	200,00		200,00		200,00							100,00			
			5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				4.875.353.400		6.725.516.808		9.277.804.626							20.878.674.834	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			1	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	%	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan																		
	1	Program Pengelolaan Pendidikan																		
		1	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan yang Representatif	%	92,19	97,16		97,77	77.684.153.778		98,02	93.705.586.686		98,27	130.726.328.564		207.072.117.885	509.188.186.913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Persentase Kualitas Manajemen Sekolah yang Kondusif, Profesional dan Representatif	%	23,15	19,71		44,23	47,73		55,23	63,73		73,23		73,23				
		3	Persentase Prestasi Siswa Melalui Kinerja Sekolah yang Berkualitas dan Bermutu	%	127,78	78,28		92,82	93,27		93,52	94,17		94,42		94,42				
	2	Program Pengembangan Kurikulum																		
		1	Persentase Anak Usia 4-6 Tahun Bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	98,77	55,75		76,00	78,50		82,00	63.799.375.067		86,50	65.394.359.444		67.029.218.430	258.466.245.689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Persentase Peserta Didik Pendidikan Non Formal dari Buta Huruf Menjadi Melek Huruf	%	95,19	87,69		80,19	72,69		65,19	57,69		50,19		50,19				
		3	Persentase APM, APK, APS dan Angka Kelulusan yang Berkualitas pada Jenjang Sekolah Dasar	%	22,39	40,32		56,70	64,20		72,70	82,20		89,70		89,70				
		4	Persentase APM, APK, APS dan Angka Kelulusan yang Berkualitas pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	22,90	101,03		82,57	84,32		86,07	96,82		97,57		97,57				
	3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
		1	Persentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Melaksanakan Tugas Serta Fungsinya Dengan Proporsional dan Profesional	%	97,98	74,57		45,29	65,29		80,29	90,29		95,29		95,29				
	2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan																		
		1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,80			70,72			70,89		71,03		71,25		71,25			
		2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	14,00			13,00			11,00		9,00		8,00		8,00			
		3	Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	Kasus	37,00				27,00		24,00		22,00		19,00		19,00			
		4	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	Kasus	38,00				28,00		25,00		23,00		20,00		20,00			
		5	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Kasus	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
		6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)	%	25,60			22,00		21,00		20,00		19,00		19,00				
		7	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita	%	14,70			10,00		9,00		8,00		7,00		7,00				
		8	Jumlah Fasyankes Swasta yang Terakreditasi	Fasyankes	0,00			27,00		32,00		38,00		43,00		43,00				
		9	Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) Sesuai Standar	%	61,00			80,00		90,00		95,00		100,00		100,00				
		10	Insiden Tuberkulosis (ITB) Per 1.000 Penduduk	-	319,00			244,00		219,00		194,00		190,00		190,00				
		11	Persentase Capaian SPM HIV/AIDS	%	24,00			21,00		20,00		19,00		18,00		18,00				
		12	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	72,30			81,70		85,00		90,00		95,00		95,00				
		13	Angka Kesakitan DBD [Inseiden Rate] < 49 Per 1.000 Penduduk	-	< 383 Kasus			< 314 Kasus		< 308 Kasus		< 301 Kasus		< 294 Kasus		< 294 Kasus				
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		1	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	-			65,00		71,00		75,00		80,00		80,00				
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
		1	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	-															
		1	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	-															

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	2	Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	%	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	3	Persentase Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	-				45,00		50,00		60,00		70,00		70,00				
	1	Persentase Monitoring dan Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	%	85,00				92,50		95,00		97,50		100,00		100,00				
	2	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	%	50,00				80,00		90,00		100,00		100,00		100,00				
	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman							5.267.219.165		5.499.318.194		5.773.155.476		6.044.700.628		22.584.393.463	Dinas Kesehatan		
	1	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	%	93,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	%	80,90				87,00		89,00		90,00		92,30		92,30				
	3	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	%	70,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4	Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	0,00				70,00		75,00		80,00		85,00		85,00				
	5	Persentase Makanan Memenuhi Syarat/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	%	60,40				80,00		85,00		90,00		95,00		95,00				
	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							12.002.218.017		18.885.721.979		29.780.255.095		47.017.095.669		107.685.290.760		Dinas Kesehatan	
	1	Persentase Rumah Tangga Hidup Bersih dan Sehat	%	63,60				75,00		80,00		85,00		90,00		90,00				
	2	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	76,00				82,00		84,00		86,00		88,00		88,00				
	3	Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 18 Tahun	%	9,10				8,90		8,80		8,80		8,70		8,70				
	4	Proporsi Populasi yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air	%	70,00				77,50		80,00		82,50		85,00		85,00				
	5	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	38,00				89,00		98,00		107,00		117,00		117,00				
	6	Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa	10,00				40,00		50,00		60,00		70,00		70,00				
	3	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							61.929.276.264		66.424.508.780		71.249.868.578		76.429.909.779		276.033.563.401		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1	Luas Daerah Irigasi dan Rawa yang Fungsional	Ha	3.144,00				628,00		628,00		628,00		628,00		2.512,00				
	2	Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang Berfungsi Dengan Baik	M	7.165,00				145,00		145,00		145,00		145,00		580,00				
	3	Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik	Unit	82,00				16,00		16,00		16,00		18,00		66,00				
	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							4.072.123.864		3.950.395.531		3.832.306.034		3.717.746.596		15.572.572.025		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	%	18,00				21,00		22,00		23,00		24,00		24,00				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	2	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	%	48,00				51,00		52,00		53,00		55,00		55,00					
	3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							-		-		-		-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Penanganan Sampah	%	65,00				80,00		85,00		90,00		95,00		95,00					
	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							8.844.388.628		9.416.649.071		10.093.469.076		10.889.415.884		39.243.922.659	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	%	60,00				66,00		68,00		70,00		72,00		72,00					
	2	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar	%	65,00				71,00		73,00		75,00		77,00		77,00					
	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							15.511.887.973		16.848.969.024		18.301.302.694		19.878.823.437		70.540.983.128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	45,00				60,00		65,00		70,00		75,00		75,00					
	6	Program Pengembangan Permukiman							145.280.579.411		146.588.002.410		147.907.191.295		149.238.251.953		589.014.025.069	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	60,00				75,00		80,00		85,00		90,00		90,00					
	7	Program Penataan Bangunan Gedung							-		-		-		-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1																				
	8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya							-		-		-		-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1																				
	9	Program Penyelenggaraan Jalan							151.095.127.045		150.552.447.793		150.760.934.756		151.355.780.875		603.764.290.469	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	65,00				74,00		77,00		80,00		83,00		83,00					
	2	Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / Jembatan Kabupaten	Km	2,94				5,00		5,00		5,00		5,00		20,00					
	3	Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	%	53,00				62,00		62,00		65,00		65,00		65,00					
	10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi							2.682.311.389		6.264.843.936		14.791.068.235		35.180.278.571		58.918.502.131	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi	%	98,00				98,00		98,00		100,00		100,00		100,00					
	2	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							6.421.524.961		7.841.211.611		9.594.227.791		11.759.103.747		35.616.068.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	1	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	80,00				87,50		90,00		92,50		95,00		95,00					
		Tersedianya RDTR	Dokumen	0,00				1,00		1,00		1,00		1,00		4,00					
	3	Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang	-	Tersedia				Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia					
	4	Ketaatan Terhadap RTRW	Objek / Kasus	-				35,00		35,00		35,00		35,00		140,00					
	4	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
	1	Progran Pengembangan Perumahan							457.974.487		490.010.103		524.286.631		560.960.824		2.033.232.045	Dinas Pekerjaan			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			1	Rasio Rumah Layak Huni	%	75,00					82,50		85,00		87,50		90,00		90,00		Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			2	Program Kawasan Permukiman							1.843.445.090			3.375.092.501		6.179.326.660			11.313.490.804		22.711.355.055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			1	Persentase Peningkatan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh							1.843.445.090			3.375.092.501		6.179.326.660			11.313.490.804		22.711.355.055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			2	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	50,00					65,00		70,00		75,00		80,00		80,00			
			5	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																		
			1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							6.898.221.608			10.011.340.507		16.423.025.440			30.155.798.020		63.488.385.575	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah/Per Satuan Wilayah	-	2 Kali/Hari					2 Kali/Hari		2 Kali/Hari		3 Kali/Hari		3 Kali/Hari		3 Kali/Hari			
			2	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	Kali	18,00					18,00		18,00		18,00		18,00		72,00			
			2	Program Penanggulangan Bencana							458.495.286			631.454.558		869.659.670			1.197.723.466		3.157.332.980	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Angka Kejadian Bencana	-	20,00					14,00		12,00		10,00		8,00		8,00			
			2	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	1,00					1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			3	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan	-	1,00					1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			4	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Orang	40,00					25,00		20,00		15,00		10,00		10,00			
			5	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Juta	1.000,00					700,00		600,00		500,00		400,00		2.200,00			
			3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							4.075.882.545			7.755.039.484		15.554.250.742			31.928.316.474		59.313.489.245	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)	Menit	20,00					16,00		14,00		12,00		11,00		11,00			
			2	Jumlah Titik Hotspot	Titik	50,00					35,00		30,00		25,00		20,00		20,00			
			6	Urusan Pemerintah Bidang Sosial																		
			1	Program Pemberdayaan Sosial							446.508.360			507.586.832		581.525.039			669.593.540		2.205.213.771	Dinas Sosial
			1	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri	%	75,00					82,50		85,00		87,50		90,00		90,00			
			2	Jumlah peserta PKH	KK	150,00					300,00		350,00		400,00		450,00		1.500,00			
			3	Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	10,00					25,00		30,00		35,00		40,00		130,00			
			3	Program Rehabilitasi Sosial							769.318.391			1.234.295.964		2.077.839.501			3.594.405.850		7.675.859.706	Dinas Sosial
			1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial	%	33,00					50,00		60,00		70,00		80,00		80,00			
			3	Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							1.071.117.601			2.977.792.877		8.278.503.139			23.014.902.998		35.342.316.615	Dinas Sosial
			1	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	Orang	100,00					250,00		300,00		350,00		400,00		1.300,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
7	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja																				
		2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Orang	-						94.508.305		95.467.721		96.436.878		97.415.873		383.828.777		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	-					15,00		20,00		25,00		25,00		85,00			
		2	Jumlah Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Orang	-					30,00		35,00		35,00		35,00		135,00			
		3	Persentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja								225.934.956		236.324.474		247.191.750		258.558.752		968.009.932		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Jumlah Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-					598.426,00		611.109,00		624.389,00		638.301,00		2.472.225,00			
		4	Program Hubungan Industrial								153.911.971		155.442.487		156.988.223		158.549.330		624.892.011		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Nilai Upah Minimum Kabupaten	-	2.075.000,00					2.615.000,00		2.825.000,00		3.050.000,00		3.295.000,00		3.295.000,00			
		2	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketrnagakerjaan	Orang	-					33.700,00		36.600,00		39.500,00		42.400,00		152.200,00			
8	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
		1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								384.700.000		384.700.000		384.700.000		384.700.000		1.538.800.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	%	15,00					30,00		35,00		35,00		40,00		40,00			
		2	Program Perlindungan Perempuan								219.600.000		219.600.000		219.600.000		219.600.000		878.400.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapatkan Pelayanan Konverensif	%	87,64					90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga																		
		1																			
		4	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak																		
		1																			
		5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		2.360.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Kelembagaan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Standar (Forum Anak Kab/Kota, Forum Anak Kecamatan, Kelurahan, Kelana, Dekelana, Ila, Tesa, Pisa)	%	10,00					25,00		30,00		35,00		40,00		40,00			
		2	Persentase Perangkat Daerah (Gugus Tugas KLA) yang Melaksanakan Anggaran Responsif Anak	%	15,00					33,00		39,00		45,00		51,00		51,00			
		6	Program Perlindungan Khusus Anak								912.000.000		912.000.000		912.000.000		912.000.000		3.648.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Peningkatan Perlindungan Anak	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	-	1/100					1/250		1/300		1/350		1/400		1/400			
		3	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Layanan Sesuai Standar, Sekolah PMTAS	%	3,00					2,80		2,70		2,60		2,50		2,50			
9	Urusan Pemerintah Bidang Pangan																				
		2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								3.540.216.571		3.654.045.194		3.772.763.658		3.896.574.925		14.863.600.348		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1	Skor PPH	-	89,10					90,60		91,10		91,60		92,10		92,10			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
10	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan																				
	1	Program Pengelolaan Izin Lokasi							9.565.061.325		8.905.668.305		8.291.732.302		7.720.119.615		34.482.581.547	Sekretariat Daerah			
		1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						380.567.277		465.658.470		569.775.237		697.171.515		2.113.172.499				
		1	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah			
	8	Program Penatagunaan Tanah							9.565.061.325		8.905.668.305		8.291.732.302		7.720.119.615		34.482.581.547				
		1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																				
	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup							90.110.052		88.508.793		86.935.990		85.391.134		350.945.969	Dinas Lingkungan Hidup			
		1	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	Dokumen	1,00				1,00		1,00		1,00		1,00		4,00				
	2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							616.282.057		493.090.782		404.594.376		340.692.330		1.854.659.545	Dinas Lingkungan Hidup			
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	Baik				Baik		Baik		Baik		Baik		Baik				
		2	Indeks Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	-	DDL < 1				DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							10.846.190.115		14.143.476.631		18.469.346.197		24.146.558.092		67.605.571.035				
		1	Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan	%	0,25				0,40		0,45		0,50		0,55		0,55				
	4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)							128.816.782		158.166.805		194.204.030		238.452.090		719.639.707	Dinas Lingkungan Hidup			
		1	Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup	-	Di bawah Baku Mutu				Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu		Di bawah Baku Mutu				
		2	Jumlah Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru	Peserta	5,00				11,00		13,00		15,00		17,00		56,00				
		3	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	%	5,00				12,50		15,00		17,50		20,00		20,00				
		4	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan	5,00				11,00		13,00		15,00		17,00		17,00				
	10	Program Pengelolaan Persampahan							25.900.891.068		30.085.091.657		34.951.821.808		40.612.985.087		131.550.789.620	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		1	Persentase Penanganan Sampah	%	65,00				80,00		85,00		90,00		95,00		95,00				
		2	Persentase Timbunan Sampah yang Didaur Ulang	%	0,50				2,54		3,39		4,24		5,08		5,08				
		3	Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan	%	80,00				87,50		90,00		92,50		95,00		95,00				
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
	1	Program Pendaftaran Penduduk							2.800.951.790		3.496.611.371		4.365.048.740		5.449.175.924		16.111.787.825	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	2	Program Pencatatan Sipil									2.800.951.790		3.496.611.371		4.365.048.740		5.449.175.924		16.111.787.825	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1	Persentase Penduduk yang Melakukan Pencatatan Sipil	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							39.441.160		43.385.276		47.723.804		52.496.184		183.046.424	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diarsipkan	Dokumen	10.000,00					40.000,00		50.000,00		60.000,00		70.000,00		220.000,00				
	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
		3	Program Administrasi Pemerintahan Desa							11.936.061.028		18.495.047.696		29.127.486.814		46.418.936.422		105.977.531.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	16,00					7,00		4,00		1,00		0,00		0,00				
		2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	60,00					40,00		30,00		20,00		8,00		8,00				
		3	Jumlah Desa Berkembang	Desa	31,00					25,00		20,00		18,00		15,00		15,00				
		4	Jumlah Desa Maju	Desa	10,00					21,00		31,00		38,00		46,00		46,00				
		5	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0,00					24,00		32,00		40,00		48,00		48,00				
		6	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		7	Persentase Desa yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		8	Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		9	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Inventarisasi Aset Desa	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							562.626.744		814.791.141		1.194.122.013		1.765.050.039		4.336.589.937	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	75,00					90,00		95,00		100,00		105,00		390,00				
		2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				
		1	Program Pengendalian Penduduk								62.925.059		78.781.660		98.633.994		123.488.954		363.829.667	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	Cakupan Sekolah Siaga Kependudukan	-	1,00					6,00		6,00		8,00		8,00		8,00				
		2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								7.294.802.095		8.624.081.132		10.212.010.174		12.111.162.840		38.242.056.241	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27,00					27,60		27,75		27,85		28,00		28,00				
		2	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB	-	1 Desa 20%					1 Desa 40%		1 Desa 60%		1 Desa 80%		1 Desa 100%		1 Desa 100%				
		3	Persentase PPKBD dan Sub PPKBD yang Dibentuk	%	64,00					67,00		68,00		69,00		70,00		70,00				
		4	Cakupan Balai Penyuluh KB dan Kampung KB	-	9 Balai dan 20 Kampung KB					9 Balai dan 20 Kampung KB		9 Balai dan 20 Kampung KB		9 Balai dan 20 Kampung KB		9 Balai dan 20 Kampung KB		9 Balai dan 20 Kampung KB				
		3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								1.377.128.958		1.920.443.551		2.781.999.187		4.164.662.537		10.244.234.233	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	Cakupan Sasaran PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif (67 = 100%)	-	64,00					65,25		65,67		65,97		66,21		66,21				
		1	Cakupan PUS Peserta KB /Anggota UPPKS yang ber-KB (87 = 100%)	-	76,00					77,30		77,60		77,90		78,20		78,20				
		1	Jumlah Kelompok PIK Remaja	Kelompok	65,00					78,00		81,00		84,00		87,00		87,00				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
		1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									82.201.461.904		225.599.068.245		800.938.899.216		3.222.457.819.730		4.331.197.249.095	Dinas Perhubungan
		1	Persentase Layanan Angkutan Darat		%	0,07					0,08		0,08		0,09		0,10		0,10		
		2	Tingkat Kecukupan Perlengkapan Jalan		%	59,20					71,44		75,00		77,00		79,00		79,00		
		3	Persentase Wajib Uji Kendaraan Bermotor		%	80,92					50,93		70,00		72,00		75,00		75,00		
		2	Program Pengelolaan Pelayaran									52.183.421.493		182.743.773.369		739.816.815.162		3.135.345.961.409		4.110.089.971.433	Dinas Perhubungan
		1	Persentase Layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan		%	0,47					0,44		0,45		0,50		0,55		0,55		
		2	Persentase Dermaga Dalam Keadaan Baik dan Berfungsi		%						76,30		86,79		93,26		100,00		100,00		
16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
		1	Program Informasi dan Komunikasi Publik									4.137.213.972		4.115.543.818		4.117.388.515		4.145.065.128		16.515.211.433	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda atau yang Bermitra Dengan Pemda		Media	10,00					10,00		10,00		10,00		10,00		40,00		
		2	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi		%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Program Aplikasi Informatika									264.586.904		222.668.020		196.787.144		181.783.334		865.825.402	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan		Aplikasi	1,00					1,00		1,00		1,00		1,00		4,00		
		2	Persentase Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		%	-					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		3	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet		%	-					82,50		85,00		87,50		90,00		90,00		
		4	Cakupan Layanan Mobile Broadband		%	-					55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
		5	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet		%	-					55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
		5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi									221.791.752		238.286.583		256.008.147		275.047.679		991.134.161	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi		%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		7	Program Pengembangan UMKM									362.711.249		308.205.748		262.843.758		224.818.557		1.158.579.312	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah UMKM yang Mendapat Pelatihan dan Bantuan		UMKM	100,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		2	Jumlah UMKM yang Difasilitasi		UMKM	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		400,00		
		3	Jumlah UMKM yang Melakukan Kemitraan		UMKM	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		400,00		
18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
		1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal									-		-		-		-		-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah		%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Program Promosi Penanaman Modal									662.967.889		770.515.494		895.509.625		1.040.780.484		3.369.773.492	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal									566.032.965		594.082.171		623.521.329		654.419.315		2.438.055.780	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai		Perizinan dan Non Perizinan	0,00					2.630,00		2.655,00		2.680,00		2.752,00		10.717,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
	(1)	4	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								566.032.965		594.082.171		623.521.329		654.419.315		2.438.055.780	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Milyar	6.137,29					7.000,00		7.250,00		7.500,00		7.750,00		7.750,00			
	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																		
		1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								1.189.500.739		1.425.548.781		1.708.438.894		2.047.466.558		6.370.954.972	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		1	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	5,00					5,00		5,00		5,00		5,00		20,00			
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan								1.812.163.335		2.373.964.804		3.125.382.071		4.134.934.008		11.446.444.218	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		1	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2	Jumlah Prestasi Olah Raga	-	35,00					38,00		39,00		40,00		41,00		158,00			
		3	Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk	-	0,00					1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																		
		1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								1.100.861.646		1.190.948.835		1.288.408.160		1.393.842.908		4.974.061.549	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1	Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																		
		1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								-		-		-		-		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1																			
	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																		
		1	Program Pengembangan Kebudayaan								87.797.663		90.784.900		93.799.339		96.952.316		369.334.218	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan Serta Dikembangkan Sebagai Ciri Khas Daerah	%	96,59	97,63		84,47		86,52		88,57		90,62		92,67		92,67			
		2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional								904.416.412		1.031.895.535		1.177.343.070		1.343.291.696		4.456.946.713	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional Sebagai Ciri Khas Daerah	%	97,37	97,56		97,44		97,89		98,24		98,49		98,64		98,64			
		3	Program Pembinaan Sejarah								37.789.506		38.734.244		39.702.600		40.695.165		156.921.514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1	Persentase Kompetensi Tenaga Teknis Dalam Menjaga dan Melestarikan Sejarah Daerah	%	96,13	87,62		89,20		89,45		89,70		89,85		90,30		90,30			
		4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya								37.789.506		39.056.438		40.365.846		41.719.153		158.930.943	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1	Persentase Pemahaman serta Melestarikan Cagar Budaya yang Dimiliki Sebagai Aset Daerah yang Bernilai Ekonomis	%	58,82	50,00		47,50		67,50		82,50		92,50		97,50		97,50			
	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																		
		1	Program Pembinaan Perpustakaan								980.736.375		1.238.670.139		1.564.440.508		1.975.888.517		5.759.735.539	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		1	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	85,00					150,00		175,00		200,00		225,00		750,00			
	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																		
		1	Program Pengelolaan Arsip								3.355.508.793		3.908.424.475		4.555.592.630		5.312.878.493		17.132.404.391	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		1	Tersedianya Sistem Arsip Elektronik	-	Tersedia					Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia			
		2	Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip								62.330.152		56.828.587		52.162.349		48.086.064		219.407.152	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		1	Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2	Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Kali	5,00					5,00		5,00		5,00		5,00		20,00			
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																		
		1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								2.845.732.351		2.647.562.643		2.463.192.980		2.291.662.360		10.248.150.334	Dinas Perikanan	
		1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.855,00					26.750,00		27.000,00		27.250,00		27.500,00		108.500,00			
		2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								4.141.368.911		4.732.369.427		5.527.999.268		6.607.535.568		21.009.273.174	Dinas Perikanan	
		1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.472,00					4.500,00		5.000,00		5.500,00		6.000,00		21.000,00			
		2	Persentase Luasan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	%	75,00					82,50		85,00		87,50		90,00		90,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						2.874.122.187		4.270.671.458		6.618.525.142		10.543.886.605		24.307.205.392	Dinas Perikanan		
		1	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Dibina	Kelompok	180,00			300,00		350,00		400,00		450,00		1.500,00				
		2	Jumlah Nelayan yang Difasilitasi	Nelayan	200,00			350,00		400,00		450,00		500,00		1.700,00				
		3	Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan	Ton	2.559,00			3.500,00		3.750,00		4.000,00		4.250,00		15.500,00				
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																			
		1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						4.665.450.452		4.887.323.517		5.120.420.044		5.365.299.728		20.038.493.741	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Jumlah Pengembangan Kawasan Pariwisata	Kawasan	1,00			3,00		3,00		3,00		3,00		12,00				
		2	Jumlah Usaha/Kegiatan Pariwisata yang Memiliki Legalitas	Tempat Usaha	46,00			76,00		86,00		96,00		106,00		364,00				
		2	Program Pemasaran Pariwisata						-		-		-		-		-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	10,46			13,46		14,46		15,46		16,00		16,00				
		2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.120,00			2.290,00		2.359,00		2.430,00		2.503,00		9.582,00				
		3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	54.280,00			61.905,00		63.762,00		65.675,00		67.645,00		258.987,00				
		4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1.351.789.630		1.796.937.402		2.388.673.469		3.175.269.733		8.712.670.234		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		1	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	Komunitas	5,00			7,00		8,00		9,00		10,00		34,00				
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																			
		1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						2.616.916.403		2.513.432.693		2.425.792.861		2.351.888.156		9.908.030.113	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perkebunan		
		1	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	94,60			97,00		98,00		99,00		100,00		100,00				
		2	Indeks Pertanaman	-	110,00			118,00		121,00		124,00		127,00		127,00				
		3	Jumlah Komoditas yang Bersertifikat	Komoditas	10,00			10,00		10,00		10,00		10,00		10,00				
		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						5.546.041.884		5.053.758.819		4.629.280.905		4.262.938.460		19.492.020.068	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perkebunan		
		1	Produktivitas Padi	Kw/Ha	27,20			27,50		27,60		27,70		27,80		27,80				
		2	Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-	Skala Nasional			Skala Nasional		Skala Nasional		Skala Nasional		Skala Nasional		Skala Nasional				
		3	Persentase Peningkatan Perlindungan Perkebunan	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						989.616.202		913.438.586		861.792.580		834.393.827		3.599.241.195	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Ekor	-			475,00		450,00		425,00		400,00		400,00				
		2	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	5,00			5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
		3	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	5,00			5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
		4	Jumlah Pencapaian Swasembada Daging Sapi	Ekor	-			1.050,00		1.150,00		1.250,00		1.350,00		1.350,00				
		5	Program Perizinan Usaha Pertanian						905.165.040		867.344.136		831.103.519		796.377.160		3.399.989.855	Dinas Perkebunan		
		1	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan	Ijin	200,00			170,00		160,00		150,00		140,00		140,00				
		6	Program Penyuluhan Pertanian						567.825.351		553.585.175		539.702.120		526.167.231		2.187.279.877	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	23 : 1			23 : 1		23 : 1		23 : 1		23 : 1		23 : 1				
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																			
		3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						3.386.137.731		3.897.350.484		4.485.742.166		5.162.964.650		16.932.195.031	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		
		1	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Kali	2,00			8,00		10,00		12,00		14,00		44,00				
		5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						146.466.746		109.304.080		81.570.610		60.873.890		398.215.326	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		
		1	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTPP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)	Kali	5,00			5,00		5,00		5,00		5,00		20,00				
		6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						490.071.309		511.464.534		533.791.643		557.093.404		2.092.420.890	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		
		1	Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha	Pelaku Usaha	50,00			80,00		90,00		100,00		110,00		380,00				
31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																			
		1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						490.071.309		511.464.534		533.791.643		557.093.404		2.092.420.890	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		1	Persentase Peningkatan Penataan Struktur Industri	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Perdagangan dan Perindustrian
		2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota							406.733.041		397.230.974		387.950.895		378.887.616		1.570.802.526			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Sentra Industri Potensial yang Mendapat Fasilitas	Sentra Industri	5,00					5,00		5,00		5,00		5,00		20,00			
32 Ususan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																					
		1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi							49.348.782		51.816.221		54.407.032		57.127.384		212.699.419			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi	%	60,00					75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			
IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
1 Sekretariat Daerah																					
		1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							45.614.405.408		106.740.314.891		266.034.544.514		684.107.480.591		1.102.496.745.404			Sekretariat Daerah; Dinas Sosial
		1	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana	%	100,00	90,00		97,54		100,00		100,00		100,00		100,00					
		2	Program Perekonomian dan Pembangunan							2.629.380.390		2.990.514.429		3.410.493.849		3.899.107.970		12.929.496.638			Sekretariat Daerah
		1	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	%	100,00	96,59		99,48		100,00		100,00		100,00		100,00					
2 Sekretariat DPRD																					
		1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							13.440.141.963		13.709.577.620		14.003.282.727		14.323.104.403		55.476.106.713			Sekretariat DPRD
		1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
1 Perencanaan																					
		1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							4.592.943.269		4.796.879.300		5.009.870.506		5.232.318.955		19.632.012.030			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Persentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					
		2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							3.245.714.763		4.287.649.373		5.766.130.716		7.886.223.122		21.185.717.974			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Kualitas Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					
2 Keuangan																					
		1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							12.650.034.451		12.965.749.387		13.289.343.821		13.621.014.406		52.526.142.065			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					
		2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							6.325.017.226		6.482.874.694		6.644.671.911		6.810.507.203		26.263.071.033			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					
		3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							6.325.017.226		6.482.874.694		6.644.671.911		6.810.507.203		26.263.071.033			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		1	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					
3 Kepegawaian																					
		1	Program Kepegawaian Daerah							9.271.547.865		10.586.287.182		12.107.433.573		13.868.219.066		45.833.487.686			Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Kualitas Kepegawaian Daerah	%	100,00	100,00		98,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
4 Pendidikan dan Pelatihan																					
		1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							9.775.129.256		13.320.859.149		18.203.976.131		24.931.599.830		66.231.564.366			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100,00	97,00		46,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
5 Penelitian dan Pengembangan																					
		1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							605.453.750		665.999.125		732.599.038		805.858.941		2.809.910.854			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	%	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	1	Inspektorat Daerah																
	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen	80,00					2.494.208.140		2.625.775.074	2.764.394.936	2.910.454.918	10.794.833.068				Inspektorat Daerah
		1	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan					61,00		135,00		135,00		135,00		466,00		
	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							326.352.997		342.670.647	359.804.179	377.794.388	1.406.622.211				Inspektorat Daerah
		1	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen				3,00		2,00		2,00		2,00		9,00		
		2	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen				14,00		27,00		27,00		27,00		95,00		
VII	UNSUR KEWILAYAH																	
	1	Kecamatan																
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							543.686.294		487.578.651	437.261.235	392.136.505	1.860.662.685				Semua Kecamatan
		1	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							543.686.294		487.578.651	437.261.235	392.136.505	1.860.662.685				Semua Kecamatan
		1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum							543.686.294		487.578.651	437.261.235	392.136.505	1.860.662.685				Semua Kecamatan
		1	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							543.686.294		487.578.651	437.261.235	392.136.505	1.860.662.685				Semua Kecamatan
		1	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							543.686.294		487.578.651	437.261.235	392.136.505	1.860.662.685				Semua Kecamatan
		1	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	1	Kesatuan Bangsa dan Politik																
	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							59.876.108		52.103.256	45.339.441	39.453.675	196.772.480				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kali	5,00			5,00		5,00		5,00		5,00		20,00		
	4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							231.804.594		243.394.824	255.564.565	268.342.793	999.106.776				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	Kali	10,00			10,00		10,00		10,00		10,00		40,00		
	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							145.701.927		156.532.595	168.168.354	180.669.050	651.071.926				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat	%	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		2	Angka Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk	-	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9	NON URUSAN																	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							107.295.995.897		117.015.990.648	128.411.812.533	141.839.944.774	494.563.743.852				Semua SKPD
		1	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lima tahun kedepan. Dalam masa pandemi ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya cukup optimis untuk menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun lima tahunan tersebut diatas 6 persen. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Kubu Raya menargetkan sebesar 70,01, lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 71,25 dan IPM nasional sebesar 75,54 poin. Peningkatan IPM ini dipicu oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan yaitu semakin meratanya sarana dan prasarana kesehatan, kemudahan untuk mengakses persalinan medis, untuk bidang pendidikan yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Untuk Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Kubu Raya dijabarkan dalam pelayanan urusan wajib baik terkait pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar, dan pelayanan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan.

Sedangkan Aspek Daya Saing terfokus kepada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas dan infrastruktur wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia. Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, dimana semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dari pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKU sebagaimana dalam Tabel 8.1. Adapun penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKD sebagaimana dalam Tabel 8.2. dan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tabel 8.3.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)	B (62,00)	B (64,00)	B (66,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,48)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Baik (88,00)
3	Nilai SAKIP	-	CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	BB (71,50)
4	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	13,64	13,85	13,95	14,09	14,26	14,41
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,82	6,63	6,84	7,00	7,10	7,20
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,01	70,72	70,89	71,03	71,25
8	Indeks Konektivitas	-	4,00	3,11	3,78	4,22	4,67	5,00
9	Indeks Mobilitas	-	0,44	0,39	0,42	0,45	0,47	0,48
10	Persentase Rumah Layak Huni	%	N/A	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
11	Persentase Daerah Bebas Genangan	%	32,05	38,52	39,00	40,00	45,00	50,00
12	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59
13	Laju Pertumbuhan UMKM	Omset	8.035.540.000	13.451.800.000	45.430.612.675	54.971.041.337	60.468.145.470	66.514.960.017
14	Nilai Investasi	Juta	11.211.964,25	12.751.262,63	13.902.444,49	15.053.626,36	16.204.808,23	17.355.990,10
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,62	7,14	6,89	6,13	5,67	5,31
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	N/A	N/A	68,87	69,30	69,74	70,17

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
17	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan RTRW Kabupaten	%	80,12	81,25	82,00	82,75	83,50	84,25
18	Indeks Resiko Bencana	-	168,40	168,38	167,97	164,92	162,84	161,36
19	Jumlah Desa Mandiri	Desa	14	21	42	55	65	75
20	Jumlah Kasus Konflik Antar Agama	Kasus	0	0	0	0	0	0
21	Jumlah Kasus Pekat	Kasus	45	40	35	30	25	20
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	72,43	73,24	73,54	73,84	74,14	74,44
23	Status Kabupaten Layak Anak	-	Pratama (500)	Pratama (520)	Pratama (550)	Pratama (600)	Pratama (610)	Pratama (650)

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kubu Raya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59
2.	Laju Inflasi	%	2,64	2,11	2,50	2,40	2,30	2,10
3.	PDRB per Kapita	Milyar	29.110,82	28.932,30	31.671,45	34.975,48	39.044,16	43.801,74
4.	Indeks Gini	-	0,295	0,290	0,287	0,285	0,282	0,280
5.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	-	0,401	0,408	0,409	0,412	0,415	0,418
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	67,65	67,95	68,13	68,52	68,83	69,21
7.	Angka Melek Huruf	%	91,59	97,76	97,81	97,86	97,91	97,96
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,82	6,83	6,84	6,85	6,86	6,87
9.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,59	70,72	70,89	71,03	71,25
10.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	9,92	6,60	10,00	9,00	8,00	7,00
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	64,48	67,71	70,94	74,17	77,40	80,63
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,62	7,14	6,89	6,13	5,67	5,31
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,48)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Baik (88,00)
14.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	73,70	76,00	78,20	80,20	82,70	85,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
16.	Penguatan Cadang Pangan	Kg	9.514,00	9.484,00	9.285,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
17.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kg	N/A	5.500,00	2.600,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
18.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	12,04	13,05	12,70	12,44	12,04	11,62
19.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	114.753,80	99.613,60	139.750,00	140.400,00	141.050,00	141.700,00
20.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	3,30	3,49	3,33	3,26	3,16	3,10
21.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	32,40	34,01	33,53	33,24	33,21	33,26
22.	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Terhadap PDRB	%	0,33	0,40	0,32	0,34	0,34	0,34
23.	Kontribusi Sektor Pengadaan Air Bersih dan Daur Ulang Terhadap PDRB	%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
24.	Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap PDRB	%	11,75	11,84	12,41	12,29	12,23	12,16
25.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	9,86	9,87	9,47	9,60	9,73	9,88
26.	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB	%	11,97	8,20	10,44	10,74	10,95	10,98
27.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Terhadap PDRB	%	1,63	1,51	1,55	1,56	1,58	1,60
28.	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB	%	3,23	3,56	3,11	3,18	3,25	3,32
29.	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDRB	%	1,30	1,30	1,29	1,30	1,32	1,33

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
30.	Kontribusi Sektor Real Estate Terhadap PDRB	%	2,87	3,02	2,81	2,85	2,89	2,94
31.	Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan Terhadap PDRB	%	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42
32.	Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan Terhadap PDRB	%	3,52	3,95	3,39	3,49	3,56	3,63
33.	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan Terhadap PDRB	%	3,87	3,65	3,71	3,75	3,78	3,83
34.	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Terhadap PDRB	%	0,64	0,92	0,69	0,70	0,71	0,73
35.	Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Terhadap PDRB	%	0,84	0,80	0,81	0,81	0,82	0,83
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	Ribu	8.773,00	8.709,00	8.732,00	8.771,00	8.803,00	8.854,00
2.	Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa	%	11,86	17,80	35,59	46,61	55,08	63,56
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Siswa	1.205	3.713	3.898	4.084	4.269	4.456

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.2.	Angka Partisipasi Kasar							
1.2.1.	Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI/Paket A	%	108,24	103,14	102,19	101,23	100,00	99,33
1.2.2.	Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPB/MTs/Paket B	%	116,12	94,11	93,30	92,49	91,68	90,87
1.2.3.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C	%	80,31	70,60	69,72	68,84	67,96	67,08
1.3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan							
1.3.1.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	%	100,00	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	%	99,98	101,49	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA/SMK	%	100,00	104,50	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	96,58	89,17	88,25	87,32	86,40	85,48
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	81,11	79,56	78,58	77,60	76,62	75,64
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C	%	53,24	49,99	49,05	48,11	47,17	46,23
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah							
1.5.1.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	99,93	92,36	91,44	90,51	89,59	88,66
1.5.2.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	113,89	104,48	103,56	102,56	101,73	100,81
1.5.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK/Paket C	%	80,40	64,01	63,21	63,21	61,62	60,83

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.6.	Angka Putus Sekolah							
1.6.1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,33	0,22	0,10	0,05	0,00	0,00
1.6.3.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	0,29	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00
1.7.	Angka Kelulusan							
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.3.	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.	Angka Melanjutkan							
1.8.1.	Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.2.	Angka Melanjutkan Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Fasilitas Pendidikan							
1.9.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Unit	544	545	547	549	561	563
1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Unit	240	240	241	242	243	244
1.9.3.	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Unit	137	139	141	143	145	147
1.10.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Unit	42	43	44	45	46	47

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	%	98,89	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Guru/Murid	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
1.13.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah	Guru/Murid	36,00	51,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.14.	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	Kelas/Murid	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.15.	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah	Kelas/Murid	12,00	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.16.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	99,99	99,44	100,00	100,00	100,00	100,00
1.17.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)	%	5,84	5,76	5,68	5,60	5,52	5,44
1.18.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	5	97,76	97,76	96,84	96,38	95,92	95,46
1.19.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	78,48	78,92	79,36	79,80	80,24	80,68
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	-	2,75	2,86	2,70	2,60	2,50	2,40
2.2.	Angla Kematian Neonantal per 1.000 Kelahiran Hidup	-	2,75	2,86	2,70	2,60	2,50	2,40
2.3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	142,10	107,30	102,00	97,00	92,00	87,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.4.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	49,76	44,11	70,00	72,00	74,00	76,00
2.5.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	88,74	86,86	88,00	89,00	91,00	93,00
2.6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	66,70	43,70	62,00	72,00	82,00	92,00
2.7.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8.	Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Kasus	5	1	4	4	4	4
2.9.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	3,93	1,27	7,00	8,00	9,00	10,00
2.10.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	78,90	61,20	85,00	90,00	90,00	90,00
2.11.	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	-	316	316	316	316	316	316
2.12.	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	%	2,66	1,59	1,40	1,30	1,20	1,00
2.13.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	Kasus	639	503	900	1.300	1.600	1.928
2.14.	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DPTS	%	97,34	98,41	98,60	98,70	98,80	99,00
2.15.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Kasus	350	101	< 290	< 290	< 290	< 290
2.16.	Penderita Diare yang Ditangani	%	88,40	82,30	85,00	90,00	95,00	100,00
2.17.	Angka Kejadian Malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.18.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0
2.19.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi (per 1.000 Penduduk)	%	0,70	1,10	0,24	0,24	0,24	0,24
2.20.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.21.	Cakupan Kunjungan Bayi	%	83,05	75,76	92,00	93,00	94,00	95,00
2.22.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	89,10	87,12	94,00	95,00	96,00	97,00
2.23.	Cakupan Pelayanan Nifas	%	87,26	86,12	88,00	89,00	91,00	93,00
2.24.	Caupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	30,21	32,83	35,00	37,00	39,00	40,00
2.25.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	68,00	73,40	85,00	90,00	95,00	100,00
2.26.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.27.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	95,30	94,00	85,00	90,00	95,00	100,00
2.28.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.29.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.30.	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	67,55	60,60	64,50	69,00	73,00	77,00
3.2.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	13,58	16,05	18,96	22,39	26,45	31,24
3.3.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	%	67,55	60,60	64,50	69,00	73,00	77,00
3.4.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	69,01	53,43	55,43	60,00	62,00	65,00
3.5.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	32,05	38,52	39,00	40,00	45,00	50,00
3.6.	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	%	72,37	80,57	89,70	99,87	100,00	100,00
3.7.	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	83,39	86,93	90,61	94,46	98,46	100,00
3.8.	Rasio Jaringan Irigasi	%	72,31	76,90	81,78	86,96	92,48	98,35
3.9.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	18,82	23,28	51,00	52,00	53,00	55,00
3.10.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	%	18,82	23,28	51,00	52,00	53,00	55,00
3.11.	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,26
3.12.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	%	60,00	61,85	63,76	65,73	67,75	69,85
3.13.	Ketaatan Terhadap RTRW	%	80,01	81,25	82,00	82,75	83,50	84,25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1.	Rasio Permukiman Layak Huni	%	99,56	99,66	99,76	99,86	99,96	100,00
4.2.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	7,27	7,37	7,47	7,57	7,67	7,77
4.3.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	6,94	7,04	7,14	7,24	7,34	7,44
4.4.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,50	0,46	0,42	0,38	0,34	0,30
4.5.	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	9,84	9,74	9,64	9,54	9,44	9,34
4.6.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	9,84	9,74	9,64	9,54	9,44	9,34
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	8,01	8,11	8,21	8,31	8,41	8,51
5.2.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Sosial							
6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	15,19	19,10	24,03	30,23	38,03	47,84
6.2.	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar	%	23,62	23,99	24,36	24,73	25,10	25,47
6.3.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6.4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	56,00	61,93	67,86	73,79	79,72	85,65
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							
1.1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	-	28	26	24	22	20	18
1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	12	11	10	9	8	7
1.3.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	43.525	46.067	48.609	51.151	53.693	56.235
1.4.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Sengketa	28	26	24	22	20	18
1.5.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	48	58	68	78	88	98
1.6.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	48	58	68	78	88	98
1.7.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	48	58	68	78	88	98
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	39,27	41,06	42,85	44,64	46,43	48,22
2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	%	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	64,95	72,82	80,69	88,56	96,43	100,00
2.4.	Rasio KDRT	%	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19
2.5.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	%	0,90	0,84	0,79	0,74	0,70	0,66
2.6.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	%	0,88	0,78	0,68	0,60	0,53	0,46
2.7.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	%	0,95	0,84	0,73	0,62	0,51	0,40
2.8.	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun	%	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72	0,68
3.	Pangan							
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	-	29,94	30,07	30,20	30,33	30,46	30,59
3.2.	Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kapita/hari	1.843,26	1.846,53	1.849,81	1.853,09	1.856,38	1.859,67
3.3.	Ketersediaan Protein per Kapita	kkal/kapita/hari	57,75	59,14	60,56	62,01	63,49	65,02
4.	Pertanahan							
4.1.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Kasus	4	3	2	2	1	1
4.2.	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	2	3	4	5	6	7
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5.2.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	%	7,00	8,63	10,63	13,10	16,14	19,88
5.3.	Penetapan Hak MHA	%	7,00	8,63	10,63	13,10	16,14	19,88
5.4.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Kali	4	8	16	32	64	128
5.5.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kali	3	3	3	3	3	3
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	96,81	97,07	97,33	97,59	97,85	98,11
6.2.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	%	90,08	92,65	95,30	98,03	100,00	100,00
6.3.	Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	19,99	23,24	27,02	31,41	36,52	42,45
6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	83,28	92,88	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	3.125	3.261	3.403	3.552	3.707	3.869
7.2.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	-	9	9	9	9	9	9

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,74	1,57	1,41	1,28	1,15	1,04
8.2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	7,00	9,28	12,31	16,33	21,66	28,73
8.3.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	3	4	6	9	12	18
8.4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	5.292	7.060	9.419	12.566	16.766	22.368
8.5.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	3.994	6.650	11.074	18.439	30.705	51.128
8.6.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	2.805	3.770	5.068	6.813	9.159	12.313
8.7.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1
8.8.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	-	118	121	124	128	131	135
9.	Perhubungan							
9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	3.3488.376	3.655.853	3.831.371	4.015.316	4.208.092	4.410.123
9.2.	Rasio Izin Trayek	-	0,00029	0,00031	0,00034	0,00037	0,00040	0,00043
9.3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	4.382	4.875	5.423	6.033	6.711	7.465

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-	7	7	7	7	7	7
9.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18
9.6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	77,78	78,29	78,80	79,32	79,84	80,37
9.7.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	111,98	104,33	97,20	90,56	84,37	78,61
9.8.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	54.394.929	56.294.078	58.259.534	60.293.613	62.398.709	64.577.303
9.9.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Orang	54.368.463	56.266.092	58.229.954	60.262.362	62.365.706	64.542.464
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
10.1.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	94,85	95,05	95,25	95,45	95,65	95,85
10.2.	Persentase BPR/LKM Aktif	%	11,41	16,67	24,37	35,62	52,07	76,11
11.	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Investor	196	233	273	323	373	423
11.1.1	PMDN	Investor	179	210	250	300	350	400
11.1.2	PMA	Investor	17	23	23	23	23	23
11.2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Rp.	11.211.964.347.233,50	12.751.262.627.233,50	13.902.444.494.254,20	15.053.626.361.275,00	16.204.808.228.295,70	17.355.990.095.316,40
11.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja							
11.3.1	Akumulasi Tahunan	Org / Thn / Perusahaan	-	149	155	175	180	200

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
11.3.2	Tahun Berjalan	Org / Thn / Perusahaan	-	10	15	20	25	30
11.4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	19	19	15	15	15	15
12.	Kepemudaan dan Olahraga							
12.1.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	200	259	336	436	566	734
12.2.	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	24	32	43	58	79	106
13.	Statistik							
13.1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.2.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.3.	Buku “PDRB”	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Persandian							
14.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50
15.	Kebudayaan							
15.1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	14	18	23	28	36	44
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	10	10	10	10	10	10
15.3.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	-	10	10	10	10	10	10
16.	Perpustakaan							
16.1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	2.902	3.239	3.616	4.037	4.506	5.030

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
17.2.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	-	1,27	1,44	1,62	1,83	2,06	2,32
17.3.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	5.617	5.945	6.273	6.601	6.929	7.257
17.	Kearsipan							
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	23,36	24,72	26.08	27,44	28,80	30,16
	Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata							
1.1.	Kunjungan Wisatawan	Orang	56.687	56.974	57.261	57.548	57.835	58.122
1.2.	PAD Sektor Pariwisata	%	9,40	8,61	8,00	8,20	8,51	8,80
2.	Pertanian							
2.1.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Juta	2.394.418	2.493.713	2.593.007	2.692.301	2.791.595	2.890.889
2.2.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Juta	413.047	408.968	409.936	410.904	411.872	412.840
2.3.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Juta	1.154.822	1.213.238	1.271.653	1.330.068	1.388.483	1.446.898
2.4.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Kw/Ha	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85
2.5.	Cakupan Bina Kelompok Petani	Poktan/PPL	23	23	23	23	23	23
3.	Kelautan dan Perikanan							
3.1.	Produksi Perikanan	Ton	24.005,74	22.603,09	21.282,39	20.038,86	18.867,99	17.765,54
3.2.	Konsumsi Ikan	%	30,50	28,61	26,84	25,17	23,61	22,15
3.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	10	10	10	10	10	10

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	21.865,78	20.509,77	19.237,85	18.044,81	16.925,76	15.876,10
	Urusan Penunjang							
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Keuangan							
2.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	30,31	28,83	27,43	26,09	24,82	23,60
2.4.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10,03	11,02	12,11	13,31	14,62	16,07

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.5.	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	%	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70
2.6.	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	-	12.239.546.50 0,00	14.144.158.24 9,97	16.345.149.11 1,56	18.888.639.02 3,78	21.827.924.70 9,38	25.224.596.46 3,44
2.7.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1.	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20
3.2.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	59,00	56				
3.3.	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM II)	Orang	10,00	11	9	17	25	28
3.4.	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM III)	Orang	41,00	41	31	46	61	76
3.5.	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM IV)	Orang	133	106	98	113	128	143
3.6.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	-	27	29	29	29	29	29
3.7.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	-	576	579	579	216	216	216
3.8.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	-	4.811	4.701	5.279	5.279	5.279	5.279

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5.	Pengawasan							
5.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	0,70	0,81	0,93	1,07	1,23	1,42
5.2.	Jumlah Temuan BPK	Kasus	7	5	4	3	2	1
6.	Sekretariat Dewan							
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupateb	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 8.3.
Standar Pelayanan Minimal Daerah
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	URUSAN PENDIDIKAN							
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	16,66	17,07	17,48	17,89	18,30	18,71
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	5,40	5,76	6,12	6,48	6,84	7,20
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	32,77	32,13	32,41	32,69	32,97	33,25
II.	URUSAN KESEHATAN							
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	89,11	92,60	85,00	90,00	95,00	100,00
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	88,74	88,90	85,00	90,00	95,00	100,00
3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	75,76	91,30	85,00	90,00	95,00	100,00
4.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	68,00	73,40	85,00	90,00	95,00	100,00
5.	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	57,18	20,60	85,00	90,00	95,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	57,89	45,50	85,00	90,00	95,00	100,00
7.	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	43,60	75,20	85,00	90,00	95,00	100,00
8.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	35,98	39,90	85,00	90,00	95,00	100,00
9.	Jumlah Warga Negara Penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	30,12	84,20	85,00	90,00	95,00	100,00
10.	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	%	116,02	71,00	85,00	90,00	95,00	100,00
11.	Jumlah Warga Negara Terduga <i>Tuberculosis</i> yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	81,39	70,20	85,00	90,00	95,00	100,00
12.	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	60,85	72,10	85,00	90,00	95,00	100,00
III.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	42,95	43,77	49,47	52,87	56,37	60,00

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	61,27	61,54	62,65	63,04	64,95	66,15
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT							
1.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
V.	URUSAN TRANTIBUMLINMAS							
1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	43,39	58,13	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
VI.	URUSAN SOSIAL							
1.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	N/A	44,90	55,00	65,00	70,00	80,00
3.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	92,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi pedoman dan arahan bersama bagi Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 menjadi tanggung jawab serta kerjasama semua pihak dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utamanya, serta mewujudkan strategi dan kebijakan daerah.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan diperlukannya penyesuaian atas RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan R-APBD Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan pada masa tersebut.

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kubu Raya. Gambaran pencapaian target-target kinerja akan terlihat pada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini kepada *stakeholder* yang terkait.

- b. Target-target yang telah tercantum di dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 agar didukung oleh semua SKPD maupun *stakeholder* melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsisten, transparan, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra Perubahan SKPD Tahun 2019-2024.
- d. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi penyelarar antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, sekaligus penghubung dokumen jangka pendek di bawahnya (RKPD) setiap tahunnya dari tahun 2019-2024. Oleh karena itu, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terhindar dari duplikasi-duplikasi dalam implementasinya di SKPD sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*).
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini.

Akhirnya, semoga RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan, dan tata kelola kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, sehingga terwujud **Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius.**

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...10... November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021. NOMOR 3 ..